



# Aku Memilih DAMAI

Kisah Perjuangan  
Lima Perempuan Muda Menyikapi Konflik

*Denisa K.*  
2011

NATIONAL COMMISSION ON  
VIOLENCE AGAINST WOMEN

**KOMNAS PEREMPUAN**  
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

# Aku Memilih DAMAI

Kisah Perjuangan  
Lima Perempuan Muda Menyikapi Konflik

Meri Djami – CIS  
Baihajar Tualeka – Ambon  
Andy Yentriyani – Jakarta  
Feri\* – Aceh  
Th. J. Erlijna – Jakarta

**AKU MEMILIH DAMAI**  
**Kisah Perjuangan Lima Perempuan Muda**  
**Menyikapi Konflik**

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan  
(Komnas Perempuan)

Desain cover: Tim Referensia

Ilustrasi sampul muka: *Glancing and Asking* — Yanuar Ernawati

Ilustrasi sampul belakang: Karya lukis Semsar Siahaan

Tata letak: Tim Referensia

Buku ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Komnas Perempuan** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

ISBN 978-979-26-7560-3

**Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan**

Jl. Latuharhari No. 4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

mail@komnasperempuan.or.id

<http://www.komnasperempuan.or.id>

## Daftar Isi

Aku Memilih Damai. Kisah Perjuangan Lima Perempuan Muda Menyikapi Konflik	1
Mengubah Penderitaan Menjadi Kekuatan — <i>Meri Djami, CIS</i>	9
Perjuangan untuk Membebaskan — <i>Baihajar Tualeka, Ambon</i>	31
Demi Mimpi — <i>Andy Yentriyani, Jakarta</i>	57
Mendekap Kebebasan — <i>Feri*, Aceh</i>	79
Memaknai Perjalanan — <i>Th. J. Erlijna, Jakarta</i>	106



# Aku Memilih Damai

## Kisah Perjuangan Lima Perempuan Muda Menyikapi Konflik

### Pendahuluan

Pada bulan November 2009 **Komnas Perempuan** menerbitkan sebuah buku berjudul *Kita Bersikap: Empat Dasawarsa Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perjalanan Bangsa*. Buku ini memaparkan pengalaman perempuan dalam berbagai situasi konflik yang terjadi di bumi Nusantara ini, termasuk peristiwa kerusuhan Mei 1998; konflik bersenjata di bekas daerah operasi militer Timor Timur, Aceh dan Papua; konflik komunal di Maluku; serta, penyerangan dan pembunuhan massal tahun 1965. Peristiwa-peristiwa ini dijelaskan dalam konteks perjalanan bangsa dan posisi perempuan di dalamnya, sejak mimpi Indonesia mulai terbayang hingga saat bangsa tercabik-cabik oleh konflik dan kekerasan.

Saat ini, setahun kemudian, Komnas Perempuan menerbitkan sebuah buku yang mengedepankan kisah perjuangan lima perempuan muda dalam menyikapi sejumlah konflik yang tercatat dalam buku *Kita Bersikap* tersebut.

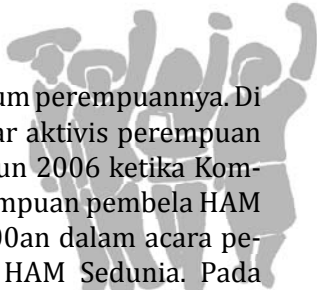




Kedua buku ini saling terkait, yang satu memberikan gambaran besar perjalanan bangsa, sedangkan yang lain menyingkap sisi personal dari pengalaman pahit bangsa dilihat dari sudut pandang perempuan muda.

Gagasan menuliskan pengalaman pribadi kelima perempuan ini muncul dari sebuah pertemuan antar aktivis perempuan yang diselenggarakan oleh *Development Alternatives with Women for A New Era* (DAWN) di Chennai, India, pada tahun 2008. Semua aktivis yang berkumpul berasal dari daerah yang sedang dilanda konflik pada saat itu, yaitu Srilanka, Nepal, India, Burma dan Indonesia. Semua gelisah dengan kekerasan yang tak kunjung berhenti dan upaya-upaya perdamaian yang tak pernah melibatkan perempuan. Padahal, begitu besar perjuangan perempuan untuk membantu korban konflik, menentang impunitas dan membangun perdamaian. Situasi ini menimbulkan tekad bersama untuk **mendokumentasikan sendiri** segala upaya perempuan tersebut, sekaligus menyimak dimana letak kekhasan kerja perempuan dalam hal membangun perdamaian serta membongkar makna perdamaian itu sendiri karena selama ini cenderung ditentukan oleh kepentingan-kepentingan politik tinggi yang didominasi oleh laki-laki. Bagi para penggagas yang usianya berkisar separuh abad, inisiatif ini juga dicanangkan sebagai awal bagi sebuah **dialog lintas generasi** yang dirasa mendesak mengingat betapa panjangnya perjalanan yang masih perlu ditempuh untuk mencapai kehidupan tanpa kekerasan di muka bumi ini.

Bagi Komnas Perempuan, yang ikut hadir dalam pertemuan di Chennai tersebut, ini merupakan peluang yang baik untuk menjawab kebutuhan bersama ini, sekaligus membangun pengetahuan gerakan perempuan di Asia



tentang Indonesia dan perjuangan kaum perempuannya. Di Indonesia, dialog lintas generasi antar aktivis perempuan juga telah mulai dijalankan pada tahun 2006 ketika Komnas Perempuan mengumpulkan perempuan pembela HAM dari tahun 1950an hingga tahun 2000an dalam acara peringatan Hari Perempuan Pembela HAM Sedunia. Pada awal tahun 2009, pertemuan lanjutan berlangsung di Kathmandu, Nepal, di mana tulisan oleh empat perempuan muda Indonesia disampaikan pada forum.

## Para Pendamai & Pelaku Perubahan

**Lima orang** yang menuliskan kisahnya untuk buku ini adalah perempuan-perempuan muda yang berjumpa dengan Komnas Perempuan dalam proses pelaksanaan mandat komisi nasional ini. Mereka diminta kesediaannya untuk terlibat dalam proses pendokumentasian ini atas dasar usianya yang tergolong muda dan prestasinya kerja di tengah konflik bersenjata dan dengan komunitas korban.

**5 Meri Djami** umur 29, adalah seorang pekerja kemanusiaan di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur, yang bertahun-tahun mendukung para pengungsi dari Timor-Leste dalam memenuhi hak-hak dasar mereka dan memfasilitasi terbangunnya hubungan baik antara komunitas pengungsi dan warga penduduk setempat. Kisah Merri dimulai dari kerjanya di kamp-kamp pengungsi ini dan keterpautannya dengan pengalaman kekerasan yang dialaminya sendiri di masa lalu.

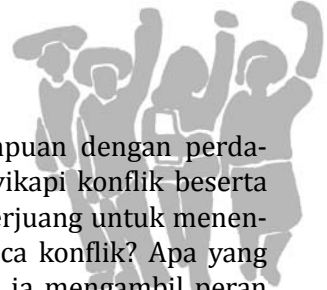
**Baihajar Tualeka** umur 36, adalah seorang *community organizer* yang andal di Ambon, Maluku. Ia setia melakukan

pemberdayaan bagi korban kekerasan pada masa konflik dan korban ketidakadilan pada masa damai. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan korban dengan para pengambil keputusan di lingkungan pemerintah maupun lembaga-lembaga sosial yang berpengaruh. Kisahnya dimulai pada saat ia sendiri menjadi pengungsi akibat konflik di Ambon.

**Andy Yentriyani** umur 33, adalah seorang pembela HAM yang tumbuh dan berkembang di dalam tubuh Komnas Perempuan sendiri. Ia bergabung pada tahun 2001 ketika Komnas Perempuan sedang mengembangkan konsep perlindungan saksi dan korban, terdorong oleh semangat untuk memperjuangkan keadilan bagi para perempuan korban perkosaan dari komunitas Tionghoa pada kerusuhan Mei 1998. Kisah Andy dimulai dari pengalamannya sendiri dengan diskriminasi rasial.

**Feri** (bukan nama sebenarnya), umur 31, adalah seorang aktivis perempuan di Aceh yang berperan sebagai pekerja kemanusiaan mendampingi komunitas dan menjalankan evakuasi aktivis yang terancam sepanjang masa konflik bersenjata, membantu korban tsunami, memperjuangkan keadilan kini saat Syariat Islam berlaku pasca perjanjian damai di Aceh. Kisah Feri dimulai dari masa kecilnya di desa ketika ia menyimak perbedaan peran antara ayah dan ibunya, jauh sebelum konflik memporak-porandakan Aceh.

**Theodora J. Erlijna** umur 35, adalah seorang sejarawan muda yang bertekad menempatkan dirinya dalam kurun perjalanan sejarah dari para pendahulunya. Ia tidak kenal lelah melacak keberadaan para perempuan yang telah menjadi pelaku dan saksi sejarah pada tahun 1965/66, yang cerita hidupnya terkubur selama puluhan tahun akibat tabir yang diciptakan oleh otoritarianisme Orde Baru. Kisah hidup Erlijna sendiri dimulai dari pengenalannya dengan realitas kemiskinan di kota Jakarta.



## Makna Damai

Apa yang dimaksudkan oleh perempuan dengan perdamaian ketika ia bekerja untuk menyikapi konflik beserta dampak-dampaknya dan ketika ia berjuang untuk menentang impunitas dan ketidakadilan pasca konflik? Apa yang menjadi motivasi perempuan ketika ia mengambil peran ini kendati pun ia tak pernah dilibatkan dalam proses negosiasi perdamaian di tingkat formal? Apa yang dilakukan oleh perempuan untuk perdamaian di akar rumput dan dalam keseharian hidup bermasyarakat walaupun ia tidak menjadi bagian dari sebuah perumusan 'rencana aksi nasional' yang dibuat untuk melaksanakan komitmen-komitmen negara pada komunitas internasional? Semua pertanyaan ini hanya bisa terjawab jika kita bertanya langsung kepada para perempuan yang menjalankan kerja ini di tengah konflik yang terjadi di sekelilingnya. Jawaban dari lima orang perempuan muda yang hidup di Aceh, Maluku, NTT dan Jakarta disampaikan sebagian melalui tulisan reflektif tentang perjalanan hidup masing-masing dan sebagian dalam sebuah percakapan bersama tentang makna perdamaian pada suatu malam di bulan Februari 2009.

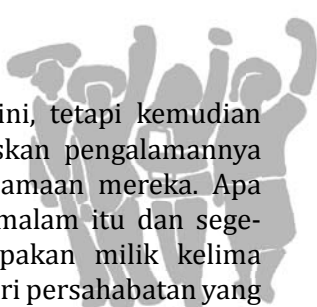
Dari percakapan antar lima perempuan muda ini, kita mencatat sebuah keyakinan bahwa perempuan bergerak membangun perdamaian bukan sebagai sesuatu yang alamiah melainkan merupakan proses memilih secara sadar: **kesadaran akan realitas ketertindasan**. Betapa pun dahsyat dan menakutkannya konflik, mereka menegaskan bahwa perempuan masih bisa menjadi pembuat keputusan. Pilihan untuk menjadi pendamai dan pelaku perubahan dipicu oleh keinginan untuk berbagi dengan orang lain dan didasarkan pada kesadaran sejarah tentang perjalanan bangsa dan kesadaran tentang apa artinya menjadi perempuan. Bahkan ditegaskan bahwa kesadaran menjadi bagian dari sejarah adalah proses pengupayaan damai itu sendiri.

**Damai adalah bebas dari kekerasan**, bebas dari halangan untuk memilih dan bebas untuk bicara, demikian catatan dari percakapan antara lima perempuan penulis dalam buku ini. Damai adalah saat dimana seseorang bisa mengungkapkan kebenaran, saat dimana rekonsiliasi yang dicapai bukan sekedar dengan menghukum pelaku melainkan juga dengan mengikis relasi kuasa yang timpang, dan saat dimana kita mampu membangun kembali rasa kemanusiaan.

### **Dari Kesunyian Pribadi ke Ruang Publik**

Proses pendokumentasian dimulai dari penetapan bentuk dokumentasi berupa narasi personal yang berangkat dari jati diri kita dan yang kemudian menggambarkan apa yang kita lakukan dan mengapa kita memilih langkah ini; apa harapan, kekecewaan, kebanggaan, kebingungan kita; dan, pada akhirnya, bagaimana kita memaknai arti ‘damai’ dalam siklus impunitas terkait kekerasan terhadap perempuan? Pertanyaan-pertanyaan ini menempatkan pilihan peran dan kerja kelima perempuan muda ini dalam pijakan kokoh keberadaan dirinya masing-masing yang, pada gilirannya, juga merupakan hasil bentukan konstruksi sosial di sekitarnya. Melalui pendekatan ini, pemahaman yang terbangun tentang kerja membangun perdamaian dan menghentikan impunitas menjadi tidak terlepas dan terpisahkan dari kehidupan dan pilihan-pilihan personal masing-masing perempuan dalam perjalanan hidupnya.

Proses yang ditempuh Meri, Baihajar, Andy, Feri dan Erlijn dimulai dengan penulisan sebuah naskah awal yang disiapkan di rumah masing-masing setelah sama-sama memahami maksud dari proses pendokumentasian ini. Setelah empat tulisan selesai maka semua saling membaca hasil tulisan masing-masing dan semua berkumpul kembali di Jakarta untuk berbagi pengalaman tentang proses penulisan. Andy pada awalnya berperan sebagai fasilitator



dalam dialog antar empat penulis ini, tetapi kemudian ia pun tergerak untuk ikut menuliskan pengalamannya sebagai bagian integral dari kebersamaan mereka. Apa yang terungkap dalam percakapan malam itu dan sege-nap percakapan lanjutannya merupakan milik kelima perempuan ini dan menjadi bagian dari persahabatan yang berkembang diantara mereka. Untuk tahap selanjutnya, setiap penulis bersepakat untuk kembali menulis ulang guna menambahkan ataupun mengurangi apa yang sempat dituliskan pada naskah pertama. Proses ini kemudian berkembang menjadi sebuah pergumulan tersendiri yang membentang waktu hampir dua tahun.

Ketika semakin jelas bahwa tulisan-tulisan pribadi ini berpotensi diterbitkan menjadi bahan pendidikan publik, semakin banyak pula pertimbangan yang penuh dilema yang harus dilakukan oleh para penulis. Pada setiap keputusan untuk mengisahkan porsi tertentu dari kehidupannya, tersirat pula adanya pilihan untuk tidak mengungkapkan bagian lain dari perjalanan hidup itu. Sebagaimana memainkan peran sebagai pendamai dan pelaku perubahan adalah sebuah pilihan, memindahkan bagian dari hidup pribadi ke ruang publik pun sebuah keputusan yang dilakukan secara sadar dengan hitungan dampak pada diri, keluarga dan komunitasnya. Pergumulan ini sudah hampir pasti menjadi bagian yang tak terelakkan dari proses pengambilan keputusan semacam ini oleh perempuan yang hidupnya penuh pengalaman diskriminasi dan kekerasan yang menyakitkan, mengecilkan hati dan membangkitkan bara yang tak kunjung padam. Apa yang diterbitkan dalam buku ini adalah wujud komitmen masing-masing penulis untuk menjadikan hidupnya bagian dari perjuangan bersama untuk mengikis segala bentuk ketimpangan dalam relasi kuasa. Kita hargai keputusan ini sebagai sebuah tindakan politik dari lima perempuan muda.



Akhir kata, pada saat Indonesia sedang resah, merindukan munculnya pemimpin sejati yang dapat mengantarkan warga bangsanya ke masa depan yang lebih baik, kita patut bersyukur akan adanya lima orang perempuan muda yang, melalui pilihan-pilihannya, menunjukkan jalan bagi kita semua. Meri, Baihajar, Andy, Feri dan Erlijn, terima kasih atas kebesaran hatinya berbagi sekelumit dari hidupnya dengan kita demi masa depan yang lebih baik. Ketahuilah, melalui hidup dan perjuanganmu, Anda memberi kita harapan.

**Kamala Chandrakirana**

Ketua Komnas Perempuan

(Periode 2004-2006 dan 2007-2009)

# Mengubah Penderitaan Menjadi Kekuatan

Meri Djami – CIS



*Tiada perubahan tanpa revolusi batin yang menyentuh kemanusiaan dengan cara kreatif. Sampai akhirnya kita akan menyadari kenapa kita tetap berdiri di sini.*

*Seperti sebuah proses untuk MENJADI, mungkin inilah hidup yang menembus segala ruang dan waktu, sekali lagi dengan cara yang kreatif. Thank's God.*

## **Menjadi Relawan**

**S**etelah tamat SMU pada 1999, saya tidak langsung melanjutkan kuliah. Saya bergabung dengan sebuah organisasi relawan yang dibentuk oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Angkatan Muda

Kristen Indonesia (GAMKI). Organisasi itu bernama Centre Internally Displaced People's Service Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia–Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia disingkat **CIS GAMKI-GMKI**. CIS dibentuk pada 9 September 1999 untuk membantu orang-orang dari Timor-Timur yang mengungsi pasca pengumuman hasil jajak pendapat Timor-Timur.

Pada saat itu saya adalah relawan termuda di antara tiga puluh lima relawan di CIS dan bertugas membantu para pengungsi di lokasi Kupang Barat, Desa Manulai, Batakte dan Oematnunu. Tugas saya adalah mendapatkan data umum dan informasi tentang keadaan pengungsi seperti bantuan yang sudah diterima, kesehatan, hunian, keamanan, kesejahteraan dan penerimaan warga lokal setempat.

Di lokasi tersebut saya tidak bekerja sendiri dan bersama saya ada tiga teman lain. Kami melebur menjadi satu tim. Tim kami mengunjungi para pengungsi hampir setiap hari dan cepat menjadi akrab dengan mereka. Di Desa Batakte para pengungsi berjumlah dua belas keluarga ditempatkan di perumahan swasta yang belum ditempati. Perumahan itu disebut RSS (Rumah Sangat Sederhana), sebuah proyek perumahan kerja sama pemerintah daerah dan pihak swasta. Lima keluarga di antaranya adalah keluarga janda. Dari para janda inilah, saya mendapatkan

### Timor-Timur dalam Konteks Sejarah

Pada saat Indonesia diproklamakan, Timor Timur yang berbagi pulau dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak termasuk sebagai wilayah Indonesia karena ia dijajah oleh Portugis. Bergabungnya Timor Timur, karenanya, selalu dielu-elukan sebagai keberhasilan ABRI membawa pulang “adik kecil” ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sedikit masyarakat Indonesia di luar wilayah itu yang tahu bahwa saat pasukan Indonesia menyerbu masuk ke Timor Timur terjadi pembunuhan terhadap penduduk. Selama 24 tahun berikutnya, masyarakat Timor Timur hidup dalam ketakutan dan



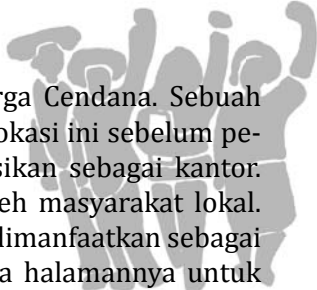
*Kamp Tuapukan 1999-2003. Foto: Meri Djami.*

informasi bahwa kehidupan mereka sangat tidak aman. Hampir setiap malam mereka tidur tidak nyaman karena selalu ada orang yang mengawasi tempat tinggal mereka. Seorang ibu mengatakan, “Tiap malam saya dengar suara langkah sepatu keliling ini rumah, kadang-kadang mereka ketok pintu atau ketok jendela. Selalu begitu, tidak bersuara. Kalau siang, baru kami rasa aman.” Seorang ibu yang lain menuturkan harapannya, “Kalau ada kapal yang bawa orang pulang, kami mau pulang saja ke Timor. Di sini tidak aman.”

kekerasan. Dengan alasan memberantas kelompok Fretilin yang ingin memerdekakan Timor Timur, pasukan Indonesia melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil. Tempat pemukiman yang dicurigai sebagai daerah asal ataupun tempat persembunyian Fretilin dikepung. Warga disandera dan kebun-kebun dihancurkan sehingga warga kekurangan pangan. Mereka yang dituduh menjadi anggota Fretilin dibunuh, ditangkap, dan tidak pernah dikembalikan kepada keluarganya. Mereka yang ditahan mengalami penyiksaan, termasuk penyiksaan seksual dan pemerkosaan.

Saya hanya bertugas selama tiga bulan di Kupang Utara. Saya kemudian dipindahkan ke kamp Tuapukan, salah satu konsentrasi kamp pengungsi yang padat di Timor Barat. Dua bulan setelah kepindahan saya ke Tuapukan, saya datang ke RSS Batakte untuk mengunjungi pengungsi di sana. Namun waktu tiba di RSS, saya hanya melihat satu keluarga saja yang tinggal di situ dan seorang bapak anggota keluarga itu tidak mengetahui kapan dan ke mana sebelas keluarga yang lain pindah. Saya bertanya, kapan terakhir masih bersama dengan sebelas keluarga itu. Dia hanya menjawab, "Sudah lama." Saya mencoba mengejar dengan beberapa pertanyaan lagi, tapi reaksi bapak itu menunjukkan kesan tidak suka. Setelah mengucapkan terima kasih, saya meninggalkan bapak itu dan pergi mencari informasi ke kantor desa. Dari sekretaris desa, saya mendapat informasi bahwa pengungsi di Batakte adalah orang-orang pro kemerdekaan Timor-Timur. Bapak sekretaris tidak memberikan informasi pasti tapi memberi kemungkinan, "Mungkin mereka dijemput tentara. Saya lihat truk tentara beberapa waktu lalu keluar dari RSS!" Selama 1999-2002, tentara selalu terlihat hilir mudik sambil memegang senjata di wilayah-wilayah pengungsian. Di tahun itu pula konflik antara pengungsi dan masyarakat lokal sering terjadi di wilayah desa yang terdapat konsentrasi pengungsi. Seorang teman relawan CIS berada di kamp Tuapukan saat pecah konflik antar warga. Warga saling melempar batu, menembak dengan senjata rakitan, dan perempuan serta anak-anak berteriak histeris, ketakutan. Ia memotret situasi itu dan dari fotonya terlihat beberapa tentara hanya menjadi penonton.

Kamp Tuapukan adalah kamp dengan populasi pengungsi terbesar di Kabupaten Kupang. Pada 2002 terdapat lebih dari tujuh ribu jiwa pengungsi masih menetap di sana. Jumlah ini melebihi jumlah penduduk lokal Desa Tuapukan yang pada waktu itu hanya berjumlah seribu jiwa. Lokasi kamp ini awalnya akan dijadikan lokasi tam-



bang garam oleh perusahaan keluarga Cendana. Sebuah gedung bertingkat dua dibangun di lokasi ini sebelum pengungsian, rencananya akan difungsikan sebagai kantor. Gedung itu disebut pabrik garam oleh masyarakat lokal. Sejak pengungsian, gedung tersebut dimanfaatkan sebagai posko bantuan kesehatan, sementara halamannya untuk tempat apel tentara dan berkumpul pengungsi untuk mendengar pengumuman-pengumuman.

Kondisi kamp Tuapukan sangat memprihatinkan. Ribuan tenda terpal dan bilik-bilik yang terbuat dari triplek berjejeran membentuk barak memanjang. Tidak ada ruangan khusus seperti kamar tidur, begitu juga dengan hunian tenda. Dalam ruangan yang sempit anggota keluarga para pengungsi berkumpul, tidur, memasak, berdoa atau melakukan aktivitas lain. Barak-barak sempit ini berlantai tanah lembab karena sedang musim hujan. Saya melihat banyak orang, anak-anak, perempuan dan laki-laki tidur beralaskan tikar tipis di atas tanah yang lembab. Saat itu banyak di antara mereka terserang flu, diare, ispa, penyakit kulit dan penyakit-penyakit lain. Ketika itu hampir setiap hari ada anak yang meninggal karena diare dan ispa. Perempuan-perempuan dan laki-laki tampak lebih tua daripada usianya, mungkin karena tekanan hidup yang membebani mereka. Mereka tercabut dari tanah kelahiran dan sulit memastikan akan seperti apa kehidupan selanjutnya. Relawan CIS memberi pelayanan kesehatan umum dan khusus bagi ibu serta balita, namun kapasitas pelayanan terbatas karena tidak bisa menjangkau kebutuhan tiap orang, belum lagi tenaga dokter dari Rumah Sakit Bethesda, Yogyakarta, yang bermitra dengan CIS, jumlahnya tidak sampai sepuluh orang.

Seorang laki-laki sedang membersihkan tikar dengan air hujan yang tengah turun deras. Ia mendapatkan seorang bayi laki-laki pagi itu. Istrinya baru saja melahirkan di atas tikar beralas tanah lembab. Tikar itu yang sedang ia

bersihkan. Sang istri berbaring di atas tikar kering sambil melingkarkan lengannya, melindungi sang bayi dari serangan dingin. "Ini anak kami yang kesepuluh, Tuhan kasih kami terlalu banyak," ujar sang istri kepada saya. Kami berdua bercerita sepanjang hari itu, sesekali salah satu anaknya merengek ingin dibelikan jajanan yang banyak terdapat di lokasi kamp dan anak-anak yang lain hanya menunggu respons sang ibu atau mungkin juga teman baru ibunya.

Para pengungsi bertahan dalam keterbatasan; antrean panjang untuk mengambil air bersih, menunggu nama mereka dipanggil untuk menerima bantuan dan kadang-kadang juga sempat berebut bantuan; sering menjadi pemandangan yang terlihat mata. Anak-anak telanjang tanpa alas kaki dengan hidung yang terus berair bermain bebas tanpa beban. Sepertinya Tuhan menciptakan dunia khusus yang warganya adalah anak-anak. Orang dewasa sulit masuk ke dunia itu. Perempuan bekerja keras setiap hari, berdagang di depan barak mereka, mengurus semua keperluan anggota keluarga, melakukan semua pekerjaan rumah tangga, mengikat benang dan menenun kain. Jika waktu santai para perempuan duduk mengobrol sambil mencari kutu kepala. Kebanyakan laki-laki sering terlihat tengah berkumpul sambil menyodok bola biliar, bermain kartu atau mengelus-elus ayam jagonya. Hanya sebagian kecil laki-laki yang memikul kayu bakar, mengambil air atau menggendong anak.

Selama enam bulan melawan CIS mengunjungi kamp-kamp pengungsian dengan misi kesehatan, penyediaan pangan dan sandang serta informasi. Tugas sebagai relawan saya jalani dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman. Tidak lebih! Pada satu waktu di tahun 2000, semua relawan CIS menuliskan sesuatu yang ia pikirkan tentang pengungsi Timor-Timur lewat sebuah permainan yang diberi nama permainan kelopak bunga. Berbagai





*Aksi turun ke jalan menuntut perhatian pemerintah untuk penuntasan persoalan pengungsi Timor-Timur pada tahun 2004. Foto: Meri Djami.*

identitas miring tentang pengungsi muncul lewat tulisan kami di papan tulis dalam kelopak-kelopak bunga yang kami gambar sendiri; kotor, malas, sangat bergantung kepada bantuan, jahat, kasar, pernah membunuh, tinggal di tempat yang tidak layak dan anggapan miring lain terlukis dengan spidol hitam dari tangan-tangan relawan yang selama enam bulan bekerja untuk kemanusiaan di kamp-kamp pengungsi. Setelah puas melukis kelopak bunga pengungsi, kami membuat kelopak bunga diri kami sendiri dan hasilnya tidak ada bagian kelopak yang negatif. Kami adalah anak kuliah, bagian dari salah satu marga, pecinta musik, anggota organisasi pemuda, dan lain-lain. Tidak ada satu pun relawan yang menyadari tujuan permainan ini. Mbak Myra kemudian mengkritik tentang konsep pengungsi yang ada di benak masing-masing relawan. Kami tersadar ketika membandingkan kelopak bunga pengungsi dan kelopak bunga kami sendiri.

Secara mendasar, kami lupa bahwa pengungsi adalah juga manusia seperti kami yang tentu juga mempunyai iden-

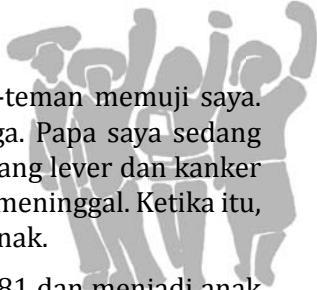


*Sekolah tenda di Tuapukan untuk anak-anak pengungsi.  
Foto: Meri Djami*

titas manusia pada umumnya. Seperti pasien amnesia yang baru sembuh, kami benar-benar terkejut dengan konsep memandang pengungsi yang kami anut selama ini. Myra Diarsi dari Komnas Perempuan dan Nany Buntarian memfasilitasi kegiatan ini dengan tujuan untuk penguatan relawan. Mereka berdua membantu kami dengan pencerahan konsep-konsep kemanusiaan dan relasi antar manusia, termasuk relasi kuasa yang bergerak dalam ruang kelas, gender, ras dan lain-lain. Saya dapat memastikan, bahwa tidak satu pun relawan CIS yang masih merasa tetap sama setelah kembali dari kegiatan ini. Saya sendiri merasa inilah langkah pertama saya untuk memulai perubahan.

## **Menjadi Anak Kecil**

Masa kecil saya sangat indah. Saya memiliki banyak teman. Tiap hari Minggu, sepulang Sekolah Minggu, teman-teman berkumpul di rumah saya dan kami akan bermain sepuas-puasnya. Kami membangun rumah dari pasir di samping rumah kami. Saya menanam rumput di halaman rumah



pasir kami. Hal itu membuat teman-teman memuji saya. Dan itu membuat saya sangat bangga. Papa saya sedang dirawat di rumah sakit karena terserang lever dan kanker kulit waktu itu. Setahun kemudian ia meninggal. Ketika itu, saya masih duduk di taman kanak-kanak.

Saya lahir di Kupang pada 31 Mei 1981 dan menjadi anak keempat dari lima bersaudara. Sepeninggal papa, mama bekerja sendiri untuk membiayai kehidupan kami. Papa meninggalkan sebuah rumah dan uang pensiun bulanan yang waktu itu sebesar tiga puluh ribu rupiah. Uang itu tidak cukup untuk membesarkan kami berlima, sehingga mama harus bekerja lebih keras. Ia bangun pagi-pagi sekali, membuat kue untuk dijual keliling. Kami berlima membantu menjual kue-kue itu setiap hari, pagi dan sore. Saya ingat pada satu waktu mama berbicara kepada kami, bahwa ia merasa tidak mampu menyekolahkan kami berlima jika kami hanya bergantung kepadanya. Kami diminta untuk menjadikan belajar pelajaran sekolah sebagai satu-satunya cara untuk memutuskan ketergantungan kami kepadanya. Dia mengatakan bahwa dengan belajar yang keras kami akan mendapat nilai bagus dan layak memperoleh beasiswa sehingga ia tidak terbebani sendiri untuk membiayai sekolah kami. Apa yang dikatakannya benar. Kami pun melakukan itu dan mendapat beasiswa. Saya mendapat beasiswa hingga tamat sekolah menengah umum. Kakak-kakak saya juga pernah mendapatkan beasiswa, kecuali adik bungsu kami.

Waktu kecil saya sangat takut berhadapan dengan orang yang sedang marah. Apalagi dia adalah mama, guru atau kakak laki-laki saya. Karena takut kepada kemarahan mereka, saya berusaha untuk tidak membuat kesalahan di depan mereka. Saya menghindari untuk terlambat tiba di sekolah. Pernah pada satu pagi tidak ada orang yang membantu saya memasang dan mengikat tali sepatu sehingga saya mencoba memasang sendiri. Saya

melakukannya berulang-ulang hingga berhasil. Tetapi itu membuat saya sangat terlambat tiba di sekolah. Guru lalu memarahi saya dan pantat saya terkena satu pukulan. Rasanya sakit sekali hingga perlu diolesi minyak sewaktu pulang dari sekolah, dan sejak itulah saya tidak pernah meminta bantuan untuk memasang dan mengikat tali sepatu. Guru saya tidak pernah mengetahui hal ini.

## **Menjadi Perempuan**

Mama berdiri di depan kamar mandi dan memanggil-manggil nama anaknya dengan nada panik. Seorang gadis kecil langsung berlari dan berdiri di hadapannya dengan wajah penuh air mata tanpa suara dan jantung berdetak kencang. Ia memeluk gadis itu dan menangis. Tubuhnya bergetar kuat, di tangannya ia memegang sebuah celana dalam berwarna biru yang ada bercak darah. Ia memeluk anak perempuannya yang baru akan berusia lima tahun. Dua puluh tiga tahun lalu saya tidak mengerti bagaimana saya mengeluarkan air mata tanpa suara ketika itu. Tapi saya dapat merasakan kesedihan seorang mama bagi anak perempuannya.

Saya diperkosa pada usia lima tahun oleh seorang kerabat jauh. Dia adalah om (paman) saya. Beberapa minggu kemudian setelah peristiwa itu, saya dan mama sering pergi ke kantor polisi dan rumah sakit umum. Pada satu waktu dalam perjalanan ke rumah sakit, saya mengatakan kepada mama bahwa saya sangat lelah. Ia hanya memeluk dan mencium kepala saya. Kali ini dia tidak menangis lagi. Saya ingat pemeriksaan rumah sakit yang harus dijalani waktu itu adalah pemeriksaan yang membuat saya sangat ketakutan. Seorang perempuan dokter menggunakan sarung tangan karet berwarna putih dan memasukkan jarinya ke dalam vagina saya. Saya berteriak kencang dan menangis dengan keras. Ia mencoba menenangkan saya dengan mengatakan, "Ini tidak sakit..." Tetapi saya menutup mata dan terus menangis. Saat itulah mama masuk



*Anak-anak pengungsi belajar di sekolah tenda Tuapukan.  
Foto: Meri Djami*

ke ruangan dan memeluk saya. Dalam pelukan mama, dokter itu melanjutkan pekerjaannya. Saya ingat sekali mama memeluk saya sambil berdoa. Dan saya tidak pernah membuka mata, sampai saya terbangun ketika sudah berada di atas angkot. Rupanya saya sempat tertidur dalam pelukannya sampai ia menggendong saya pulang dari rumah sakit itu. Sejak saat itu saya sering merasa tidak nyaman jika melewati kantor polisi atau diajak ke rumah sakit umum.

Pada tahun 2000 saya mendaftarkan diri pada satu universitas di Kupang. Ketika itu saya berusia 19 tahun. Saya tidak pernah membayangkan ini akan menjadi pengalaman paling pahit di sepanjang hidup saya. Salah satu persyaratan untuk mendaftar pada universitas itu adalah memasukkan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) yang dikeluarkan oleh kepolisian dan saya harus mengurus itu sendiri. Saya pergi ke kantor polisi untuk mengurus surat tersebut. Beberapa ruangan di sana mengingatkan saya empat belas tahun yang silam. Pengurusan SKKB memakan wak-

tu hampir satu jam, maklum waktu itu banyak calon mahasiswa yang mengantre. Ketika hendak meninggalkan kantor itu, saya melewati pintu sebuah ruangan dan seorang teman polisi menyapa saya. Saya berhenti sejenak untuk basa-basi. Namun saya terkejut ketika melihat foto diri saya yang dipindai komputer dalam ruangan itu. Saya menjulurkan kepala lewat pintu untuk memastikan foto itu. Sebuah pas foto seorang gadis kecil dengan rambut sebahu memakai baju putih dengan rompi merah bergaris hitam. Itu beta! Saya cepat-cepat menyudahi obrolan kami dan meninggalkan kantor itu dengan tubuh sedikit gemetar. Saya langsung pulang ke rumah dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih tiga kilometer. Rasanya seperti melayang, namun itu merupakan salah satu cara saya untuk menenangkan diri.

Saya adalah salah satu murid pandai di sekolah, mandiri, berani dan penuh percaya diri. Saya tidak pernah malu atau takut salah dalam mengeluarkan pendapat. Sejak berusia sembilan tahun saya pernah diminta memimpin doa dalam persekutuan doa yang banyak dihadiri orang dewasa. Mama sangat bangga pada waktu itu. Beberapa bulan kemudian pemimpin persekutuan itu meminta saya untuk memimpin khotbah dan saya melakukan dengan baik. Namun semua kelebihan itu terasa sia-sia ketika saya pulang dari kantor polisi siang itu. Sejak itu, bertambah lagi satu ketidaknyamanan saya yaitu jika berhadapan dengan komputer. Pengalaman kekerasan itu membuat saya tidak berdaya dan merasa sangat rendah diri, malu, sendirian dan tidak berarti. Saya hanyalah perempuan korban pemerkosaan.

### **Menjadi Pelaku Perubahan: Seorang Pemula**

Organisasi CIS menetapkan pertemuan mingguan di hari Sabtu. Pertemuan ini kami namakan refleksi relawan. Dalam suatu refleksi relawan pada 2002, saya mendapat tugas khusus untuk membuat kronologis kasus pemerkosaan



*Pengungsi Tuapukan mengangkut daun lontar untuk atap rumah pengungsi, tahun 2005. Foto: Meri Djami.*

yang terjadi di kamp Tuapukan. Saya menerima tugas itu dengan setengah hati, karena langsung merasa bahwa itu adalah tugas berat. Ketika itu saya berpikir, siapa yang mau menceritakan peristiwa itu kepada orang lain, sama seperti saya yang menyembunyikan pengalaman kekerasan seksual terhadap orang lain. Tugas ini pasti tidak akan berhasil.

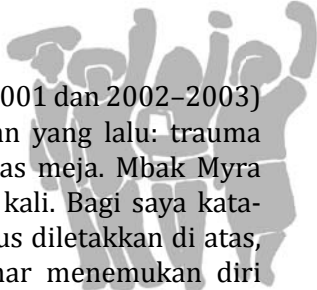
Berada di kamp Tuapukan membuat saya merasa betah. Setiap hari saya bisa memiliki teman baru, bermain dan bernyanyi dengan anak-anak dan mendengar berbagai kisah hidup yang menarik dan kadang-kadang mengaduk-aduk perasaan. Tidak jarang saya bermalam bersama keluarga pengungsi, begadang sampai tengah malam untuk mendengarkan cerita dan lagu-lagu mereka. Bahkan saya dan seorang teman relawan sering ke kampus dari kamp. Ini pengalaman yang tidak akan saya lupakan. Tapi, tugas khusus kasus pemerkosaan ini membuat saya menjadi sangat malas pergi ke kamp. Saya menunda dua hari dengan berbagai alasan untuk tidak mengerjakan tugas itu, seraya berharap relawan lain akan mengambil alih tugas ini. Namun tidak ada.



Esok harinya saya pergi ke kamp untuk mengonfirmasi beberapa informasi awal terkait kasus pemerkosaan itu. Seorang gadis kecil berusia sembilan tahun diperkosa oleh bapak kecilnya (paman kandung) ketika mereka berdua sedang mencari kayu bakar. Lokasi kejadian tidak terlalu jauh dari rumahnya. Pelakunya sudah ditahan di Polsek Babau.

Suatu saat saya bertemu dengan seorang perempuan yang bersedia menceritakan kronologis kasus itu. Perempuan ini adalah istri pelaku yang juga merupakan mama kecil dari korban. Ia sedang hamil delapan bulan saat itu dan merasa sangat terpukul dengan kejahatan suaminya. Waktu itu ibu korban melarang setiap orang untuk bertemu korban dan anaknya tidak diperbolehkan keluar kamar. Mama kecil korban memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Setelah mengucapkan terima kasih, saya pamit dan kembali ke posko CIS untuk menuliskan laporan ini. Sore hari dilakukan pembahasan laporan kasus dan saya memilih untuk tidak hadir.

Malam harinya saya tidak bisa tidur karena membayangkan peristiwa yang juga pernah menimpa saya tujuh belas tahun yang silam. Saya menangis sambil berdoa sepanjang malam itu. Dan saya terkejut dengan sebuah pikiran yang melintas di benak saya. Kamu bukan satu-satunya anak perempuan yang mengalami pemerkosaan. Seorang gadis kecil di sudut kamp juga mengalami dan mungkin ada ribuan lagi anak-anak yang mengalami. Kamu tidak sendirian di dunia ini. Tadi siang kamu pergi ke kamp dan hanya memikirkan tentang dirimu. Kamu sebenarnya orang yang tidak peduli dengan peristiwa itu. Kamu hanya membuat kronologis, tidak lebih! Dan itu tidak ada artinya untuk siapa pun. Saya pun menangis sejadi-jadinya, menyadari bahwa endapan depresi dan trauma dalam diri telah membuat saya menjadi orang yang sangat egois dan tanpa keberpihakan terhadap gadis kecil itu. Saya teringat kata-kata Mbak Myra (salah satu Komisioner



Komnas Perempuan Periode 1998 - 2001 dan 2002-2003) dalam pertemuan penguatan relawan yang lalu: trauma harus diangkat dan diletakkan di atas meja. Mbak Myra menegaskan kata-kata itu beberapa kali. Bagi saya kata-kata itu seperti menjadi: trauma harus diletakkan di atas, Medja....! Malam itu saya benar-benar menemukan diri saya kembali dan sebuah perasaan kepedulian terhadap seorang gadis kecil yang belum pernah saya lihat. Saya benar-benar merindukan gadis itu.

Esok hari saya pergi ke kamp lebih pagi daripada biasa. Saya melewati rumah gadis kecil itu, sebut saja namanya Shintia. Tampak ibunda Shintia sedang menumbuk jagung dan mama kecilnya sedang menyapu rumah. "Selamat pagi mama, beta boleh duduk di sini?," saya menyapa ibunda Shintia. Ia mengiyakan dan saya duduk sambil sesekali membantunya mengupas jagung. Kami berdua mulai menjadi akrab. Ia lalu menawari saya makan jagung dan meminta supaya tidak lekas pergi dari rumahnya. Kami memasak jagung di dapurnya dan saat itu saya melihat seorang gadis kecil yang tertidur pulas. Beberapa menit kemudian gadis ini bangun dari tidurnya. Sang ibu menoleh ke arahnya dan juga menatap saya seolah-olah ingin menyampaikan sesuatu yang ditahannya. Saya merasakan suatu perasaan lain yang membuat jantung saya berdebar.

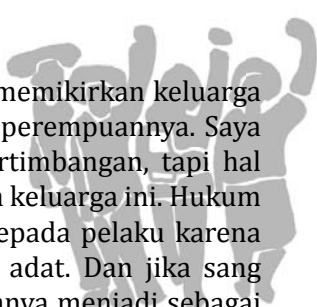
Shintia turun dari balai-balai dan langsung bergabung dengan kami di depan tungku masak. Saya berusaha keras menenangkan diri dengan menghela napas pelan. "Selamat pagi *aling* [adik]," saya menyapa Shintia. Kemudian sang ibu mulai bercerita tentang kejadian yang menimpa putrinya. Tidak lama berselang ayah Shintia muncul dan kami berkumpul di depan tungku bagaikan satu keluarga. Ibu Shintia menyeka air matanya dan sang ayah hanya tertunduk. Shintia adalah anak pertama dari empat bersaudara dan satu-satunya putri yang mereka miliki. Ia masih duduk di kelas tiga SD sekolah tenda yang dekat sekali dengan rumahnya.



*Pawai HAM mengenai tanggung jawab pemerintah dan PBB terhadap masalah para eks pengungsi Timor-Timur, Desember 2005. Foto: Meri Djami*

Saya mulai berbicara bahwa Shintia bukanlah satu-satunya anak yang mengalami pemerkosaan dan mereka bukanlah satu-satunya orangtua yang menghadapi peristiwa itu. Saya memperkenalkan diri lebih dalam dan bercerita tentang kejadian yang juga pernah saya dan mama alami. Shintia lalu mulai bercerita dan saya berlutut di depannya agar dapat menatap matanya. Saya mengatakan kepada Shintia bahwa ia tidak sendiri, kita masih bisa tetap sekolah dan meraih cita-cita. Shintia pun tersenyum dan kami saling berpelukan erat. Orangtua Shintia tampak sangat terharu. Dan akhirnya kami mulai membicarakan tentang hukuman bagi pelaku pemerkosaan.

Ayah Shintia merasa sangat sedih karena harus menjeblaskan adiknya ke dalam penjara. Ia ingin mengeluarkan adiknya untuk diproses saja secara adat. Saya dan ibunda Shintia tidak setuju. Tetapi ayah Shintia tetap dengan keputusannya. Ayah Shintia berkata, "Itu saya punya adik kandung, dia punya istri dalam keadaan hamil, siapa yang kasih makan mereka, kalo dia dipenjara dan dia punya



anak tiga orang!” Ayah Shintia lebih memikirkan keluarga daripada keadilan hukum bagi anak perempuannya. Saya berusaha memberikan beberapa pertimbangan, tapi hal itu tidak mengubah keputusan kepala keluarga ini. Hukum adat tidak bisa memberi efek jera kepada pelaku karena hanya akan diproses dengan denda adat. Dan jika sang pelaku belum bisa melunasi maka hanya menjadi sebagai utang yang tidak ada kejelasan batas waktu pelunasan atau sanksi selanjutnya. Lagi pula hukum adat versi mereka sangat membebani keluarga korban sebagai penuntut. Keluarga korban wajib menyiapkan segala sesuatu untuk mengundang tokoh adat mengurus perkara di rumahnya. Makanan, minuman, sirih pinang dan sebagainya harus mereka siapkan, sementara pelaku yang dituntut hanya menunggu putusan materi dan besaran denda.

Saya hanya berharap semoga kepolisian tidak mungkin mengembalikan kasus ini ditangani secara adat oleh keluarga, karena pemerkosaan adalah kasus pidana. Tapi harapan itu tidak terwujud. Paman Shintia didenda satu ekor babi jantan, lima lembar *tais* (kain adat Timor), 50 kg beras dan uang sebesar lima juta rupiah. Hingga kini barang-barang itu belum dilunasi dan kasus ditutup.

Sementara Shintia mendapatkan perawatan medis di rumah sakit umum. Sang ayah yang mengantarnya setiap kali pemeriksaan, sedangkan sang ibu tidak bisa menemani karena tidak terbiasa dengan jalanan di kota. Sejak saat itu saya dan Shintia bersahabat. Kami berdua menjadi sangat peduli dengan perempuan yang mengalami kekerasan seksual.

Ada dua peristiwa pemerkosaan yang terjadi lagi di kamp setelah kasus Shintia. Seorang ibu 48 tahun mengalami percobaan pemerkosaan oleh seorang pemuda tak dikenal ketika pulang dari kebun dan seorang gadis dengan keterbatasan mental berusia 15 tahun diperkosa oleh seorang kakek, tetangganya. Kali ini saya bukan hanya menguatkan korban dan keluarganya. Saya mulai membi-

carakan dalam pertemuan komunitas. Tidak segan-segan saya berbicara dengan tokoh adat, koordinator komunitas, tokoh pemuda kamp, tokoh gereja dan para ayah tentang perlindungan perempuan dan anak perempuan. Saya juga membahas tentang hukum adat yang kenyataannya sangat meringankan pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Sebagian kaum perempuan memberi respons positif dengan upaya ini. Mereka saling mengajak satu sama lain untuk pergi ke kebun dan mencari kayu bakar. Beberapa orang perempuan membagikan penderitaannya tentang kekerasan dari suami mereka kepada sesama perempuan. Mereka mulai saling percaya dan menguatkan satu sama lain.

Tidak hanya itu mereka juga mencari solusi bersama dengan mempelajari pola kekerasan sang suami; sesering apa itu terjadi, apa pemicunya, bagaimana keadaan sang suami dan sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dipandang sebagai aib yang harus dirahasiakan seperti yang selama ini diyakini. Kami telah mencongkelnya, mengangkat dan meletakkannya di atas meja. Dan rasanya kami menemukan kebebasan. Pengalaman ini sangat menguatkan saya secara pribadi dan juga telah menular untuk menguatkan beberapa perempuan yang menderita. Saya tidak merasa malu untuk menyatakan bahwa saya adalah salah satu korban pemerkosaan. Saya telah tumbuh menjadi perempuan yang mencintai tubuh saya dan bangga dengan Sang Pencipta. Manusia bisa mengambil apa pun yang kelihatan bahkan yang melekat pada tubuh, tapi tidak akan bisa mengambil apa yang ada dalam benak. Dan pada waktunya saya meyakini kita bisa membalikkan dunia kembali ke rancangan awal.





*Konflik di kamp pengungsian dengan disaksikan aparat keamanan.  
Foto: Meri Djami.*

## **Perjumpaan dengan Pelaku: Refleksi Tentang Damai**

Saya tidak bisa menguraikan secara detil seperti apa sebuah trauma akibat pemerkosaan. Tapi saya merasa bahwa kejahatan pemerkosaan sebagai sebuah penghamparan kekuasaan yang membuat kemanusiaan korban dilucuti dan ambruk, ibarat sebuah pohon yang langsung jatuh ke tanah terkena parang sang penebang. Suatu keadaan yang seharusnya tidak layak dialami oleh siapa pun dan dilakukan oleh siapa pun.

Setelah malam yang penuh kegelisahan itu, saya tidak hanya menyadari tentang perlucutan kemanusiaan yang harus saya dirikan kembali, tapi juga menyadari kebencian yang dalam terhadap pelaku. Suatu perasaan yang harus saya selesaikan, mungkin untuk menyempurnakan kemanusiaan itu sendiri. Saya berpikir untuk menemui pelaku dan mengatakan betapa saya sangat membencinya. Dan

saya menemuinya beberapa hari kemudian di salah satu rumah saudara. Saya memberanikan diri menatap matanya dan mengatakan bahwa saya memiliki dendam. Dia hanya tertunduk dan mulai menangis, memohon untuk diampuni. Dia menyatakan penyesalan mendalam tidak saja dengan kata-kata dan air mata, tapi juga dengan tubuh gemetar di hadapan seorang perempuan muda, hingga perempuan itu hanya dapat melihat seorang manusia biasa yang rapuh. Kami berdamai waktu itu. Saya mengampuni pelaku tanpa tekanan dan lebih pada menjalankan hal itu sebagai hak saya. Di sini saya perlu menegaskan bahwa pengampunan adalah hak korban untuk memberi atau tidak.

Saya menyelami proses itu bukan merupakan proses yang mudah, sekadar bermaaf-maafan, tapi merupakan perjuangan. Perjuangan untuk keadilan yang hakiki. Keadilan bagi masa depan korban dan keadilan bagi masa depan pelaku. Saya menyadari benar bahwa kebencian terhadap pelaku akan membuat saya terperangkap dalam siklus kekerasan karena akan selalu menuntut balasan. Tentu saya juga menginginkan pelaku tidak lagi menuntut korban berikut.

Bagi saya, perjuangan keadilan bukanlah perjuangan menuntut pembalasan saja melainkan sebagai tindakan hidup untuk memperoleh hak secara utuh, bukan demi balas dendam, tetapi sebagai ikhtiar untuk mengembalikan relasi kuasa pada posisinya sebagai pelindung dan penjaga perdamaian. Saya belajar bahwa pengalaman ini merupakan pengalaman korelatif antara kebenaran, keadilan dan pengampunan sebagai perjuangan damai itu sendiri. Jika tidak ada pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan maka tidak ada pengampunan, dan perdamaian tetap pada posisi kosong tanpa makna.

Pengungkapan kebenaran merupakan prasyarat terjadinya rekonsiliasi dan memungkinkan terciptanya perdamaian. Kini jutaan perempuan dan laki-laki di negeri ini hidup





*Menyanyi merupakan hiburan yang “murah” bagi para pengungsi. Foto: Meri Djami*

dalam suasana pasca konflik. Kita dapat menyaksikan pelaku dan korban sama-sama terilit dalam sebuah riwayat konflik yang tersembunyi akarnya. Para perempuan banyak menjadi korban dan peran ambigu negara ini sebagai pemicu sekaligus pelindung masih diliputi keheningan. Bagaimana mengakui kejahatan, jika kejahatan dianggap jasa baik? Bagaimana kejahatan diampuni kalau tidak ada pengakuan terhadap kejahatan itu sendiri?

Relasi kuasa yang menyebabkan ketidakadilan merupakan pelanggaran penindasan dengan wajah manis dan penundaan konflik selanjutnya. Tampaknya hal inilah yang terjadi dalam sejumlah konflik komunal di negara kita: konflik berhenti bukan karena keadilan ditegakkan dan perdamaian terwujud di antara pihak yang bertikai, tetapi hanya karena kepentingan untuk memelihara konflik telah berlalu. Selama masa Orde Baru, sejarah kebenaran terus dibungkam dengan berbagai cara represif, hingga kini pun belum terungkap secara nasional, setidaknya upaya membentuk Komisi Kebenaran untuk Indonesia

masih gagal. Saya pikir, saya adalah salah satu perempuan yang sedang tumbuh dan telah menyadari pentingnya perubahan. Saya dan generasi perempuan sebelumnya masih hidup dalam Indonesia yang penuh dominasi patriakalisme dan menolak kebhinekaan. Dan kami mulai mewujudkan mimpi kami untuk menjadi berdaya dalam kekuatan berpikir secara bebas dan membuat keputusan kami sendiri, kekuatan yang perlahan-lahan memberi kami rasa percaya diri dan bangga dengan kodrat kami; kekuatan yang akan bersama kami melawan ketidakadilan bagi perubahan sosial yang bermakna.



# Pergulatan untuk Membebaskan

Baihajar Tualeka – Ambon

Aku adalah satu dari mereka yang mengalami kekerasan dan diskriminasi, terperangkap dalam kekalutan konflik. Awalnya, apa yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa terdiam dan bingung dengan situasi yang terlalu mencekam: jadi saksi mata pembunuhan, pembakaran dan penjarahan, telinga ini didera seruan dari kelompok radikal, diindoktrinasi dan ditekan, langkah ini dibatasi untuk tidak bisa berinteraksi dengan komunitas 'seberang'. Bukan sekali-dua kali kami terjebak di tengah kerusuhan massal, hampir dibunuh oleh kelompok perempuan radikal, kelompok jihad lokal, maupun militer. Benar-benar buruk, amat sangat salah, benar-benar sakit rasanya! Kutemui beberapa perempuan tidak hanya berduka, mereka terlihat sangat emosional, bahkan terlibat konflik secara langsung, karena kampung dan rumah mereka terbakar, harta musnah, suami, anak atau sanak keluarga hilang.

Kata orang tua-tua, dulu di Ambon semua orang "rasa di hati *tatusuk* di daging" (*ale rasa beta rasa* atau kita akan

## Konflik di Tanah Simbol Kerukunan Agama



Konflik Maluku berawal dari pertikaian dua pemua di Pasar Mardika Ambon pada Januari 1999. Pertikaian ini segera menyebar menjadi konflik antar agama setelah adanya pembakaran mesjid dan gereja.

Bagi Indonesia, konflik Maluku sung-

guh mengejutkan. Di sana hidup tradisi **gendong**, yaitu ikatan persaudaraan antar dua desa atau lebih karena keturunan dari leluhur yang sama, dan **pela**, yaitu ikatan persaudaraan di luar garis keturunan. Tradisi-tradisi ini menjadikan keluarga-keluarga dengan agama yang berbeda menjadi satu keluarga besar yang saling hormat. Tradisi telah berlangsung ribuan tahun sehingga Maluku terkenal sebagai simbol kerukunan umat beragama bagi Indonesia.

Oleh karena itu, ada yang menduga bahwa konflik Ambon adalah hasil rekayasa terkait perebutan kekuasaan pasca Orde Baru, seperti juga konflik bermuatan SARA yang telah lebih dahulu meletus di Sambas, Kalimantan Barat dan Sampit, Kalimantan Tengah.

Korban meninggal dan luka-luka berjatuh dari kedua komunitas—Kristen dan Muslim—yang bertikai. Warga dari kedua komunitas juga terpaksa mengungsi karena desanya diserang dan rumahnya hancur atau habis dibakar.

sama-sama merasakan sakit). Dulu, ada ikatan adat pela dan gandong di mana negeri muslim dan kristiani selalu bergotong-royong, sama-sama menyusun batu-batu rumah ibadah dan bergabung di ritual-ritual adat lainnya.

Negeri-negeri kami terbentang di daerah pesisir pantai, yang bagi kami orang kampung menamakannya sebuah “jazirah” atau tanah raja-raja. Dulu, namanya **Almuluk**,



*Seorang anggota TNI mengawal pengungsi Ambon menuju tempat yang aman, 20 Januari 1999. Sumber: ANTARA*

kemudian diubah jadi **Molucas**, sekarang kita kenal dengan nama **Maluku**. Di negeri ini, pada Januari 1999 pertikaian dua geng pemuda dengan begitu cepat menyebar menjadi serial pembakaran mesjid dan gereja, saling serang antar kelompok agama, seolah kami tak pernah punya ingatan dan rasa akan ikatan pela gandong. Ya, Ambon Manise-ku dulu juga kota yang indah dan manis, tapi saat itu semata mempertontonkan lingkaran tak berkesudahan pembalasan dendam, saling membunuh, menjadi puing-puing hidup yang tertindas dan terpuruk.

### **Malu “Ku” Rasanya Menceritakan Ini...**

Aku benar-benar tak pernah menyangka akan dihadapkan dengan realitas baru ini. Hidup dalam kamp pengungsian yang tidak memiliki privasi, tidak ada sarana umum, lingkungan yang kumuh, padat dan dipaksa tidur di lantai. Di mana-mana terlihat paras-paras depresi dan trauma. Banyak laki-laki yang selalu memaksa istri-istri mereka untuk melakukan hubungan seks, seakan tidak

mau tahu kondisi. Kadangkala lampu di kamp dimatikan di waktu tertentu, pertanda hubungan suami istri sedang berlangsung. Tapi anak-anak selalu menangis karena takut gelap. Suatu waktu, ketika anak-anak belum tidur, lampu sudah dimatikan. Esoknya mereka bercerita tentang apa yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua mereka dalam gelap itu.

Bagaimana harus kugambarkan hari-hari kehidupanku di kamp? Bahwa kadang aku dan perempuan lainnya tidak memakai pakaian dalam? Bahwa situasinya akan lebih buruk saat menstruasi? Bahwa ada saat dimana aku dan beberapa teman perempuan menyobek handuk untuk dijadikan pembalut? Demikianlah sampai suatu ketika aku mulai sering berdoa agar tidak usah datang bulan saja. Belum lagi masalah antrian panjang di kamar mandi, yang membuatku kadang-kadang tidak mandi. Sangat risih kalau mau berganti baju di dalam kamp tak bersekat dimana semua orang bisa saling melihat. Ada pula saat ketika aku dengan keluarga lainnya kehabisan makanan sehingga saling berebut makanan, walaupun hanya sarimi dan ikan puri (teri) busuk yang harus dicuci dulu sebelum dimakan. Kadang-kadang kupinjam baju temanku yang sudah dicuci bersih di kala aku tak lagi punya persediaan baju bersih.

Tak manusiawi rasanya hidup dalam kamp, persoalan datang silih berganti seolah tak henti. Ada saat dimana aku berfikir dan merenung, pertanyaan-pertanyaan menyerbu kesadaranku, 'Mampukah aku hidup dalam situasi ini? Mampukah aku beradaptasi? Sampai kapan? Bagaimana masa depan anak-anak ini? Bagaimana aku bisa belajar? Lalu, bagaimana jadinya masa depanku?' Hidup dalam keadaan yang kacau-balau, itulah realita yang tidak terbayangkan, dan nyatanya sungguh tak tertahankan. Kekalutan sama seperti yang kurasakan akhirnya menyeret banyak orang lain untuk terlibat dalam konflik, menjadi pelaku aksi kekerasan.



*Kondisi tempat relokasi pengungsian yang dibuat dari gaba-gaba dengan atap dari daun sagu. Foto: Baihajar Tualeka.*

Saat itu pembenaran agama dipakai untuk menghalalkan kekerasan. Saat menyaksikan rumah ibadah terbakar, semua orang merasa sangat emosional. Semudah membakar rumah ibadah, semudah itu pula memobilisasi massa untuk membalas dendam, tak jarang berakhir dengan pembunuhan sadis. Orang-orang direkrut untuk 'berjihad', sukarela maupun dipaksa. Konflik membuat semua aparat hukum tidak berfungsi; orang kristen berpihak ke agamanya, orang Islam juga sebaliknya. Saat itu hukum tidak ada. Jadi bagaimana bisa membicarakan kebenaran dan keadilan?

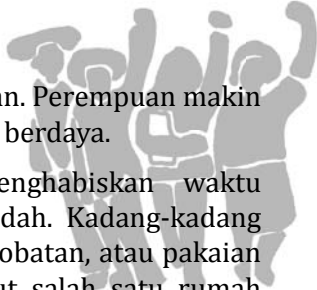
Tak ketinggalan, banyak perempuan bangkit berbondong-bondong ikut melakukan jihad tanpa takut, tanpa memperkirakan bahayanya. Beberapa perempuan memimpin kelompok jihad itu. Kadang-kadang aku sendiri melihat beberapa mati tertembak senjata. Ada perempuan yang merakit bom, perempuan yang membawa bahan bakar untuk membakar pemukiman, perempuan yang ikut membawa makanan bagi laki-laki.

Aku sendiri waktu itu berpikir kematian yang datang hari ini, di saat jihad, adalah lebih bermakna karena bisa masuk surga. Betul, aku pun terhasut seruan kaum radikal. Tidak ada pilihan lain kecuali melakukan kekerasan atau ikut terlibat konflik. Tanpa sadar, kadang-kadang aku juga menjadi tameng perlindungan bagi laki-laki, seperti berhadapan dengan militer, melakukan aksi demo untuk mendukung kelompok radikal. Aku merasa seakan pikiranku buta, benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, tidak terlihat adanya pilihan lain. Aku merasa...energiku habis-habisan terhisap ke dalam pusaran kekalutan. Aku tahu itu sungguh berbahaya, bahwa nyawaku bisa melayang sewaktu-waktu. Tapi apa dayaku? Dalam keadaan tak berkekuatan, aku terus dibius seruan untuk berjihad. Semua orang dimabukkan janji surga jika mati syahid.

Sepanjang hari, setiap saat terdengar ayat-ayat suci dikumandangkan. Lalu, datanglah seruan dari kaum radikal bagi perempuan-perempuan untuk berjilbab dan batasan-batasan lainnya. Apabila tidak berjilbab perempuan selalu dimarahi di jalanan oleh laki-laki, karena katanya perempuan yang tidak menutup auratnya membuat laki-laki yang berjihad kalah dalam peperangan. Aku dan beberapa teman pernah dibentak dan dimaki gara-gara tidak berjilbab. Aku ingat kondisi saat itu. Ada rasa jenuh, tidak bersemangat karena rasa takut selalu menghantuiku.

Tidak ada tokoh agama yang bisa dijadikan panutan untuk pencerahan, yang mau menyerukan kata "DAMAI". Tokoh-tokoh radikal baru pun terus bermunculan, yang lebih ekstrim, yang sangat oportunistik, yang selalu bersuara atas nama komunitas tertentu. Aku takut, hukum nyatanya tidak berpihak pada keadilan. Yang terburuk selalu mungkin terjadi. Kapan pun aku punya keinginan melakukan sesuatu, aku selalu membisikkan pada lainnya. Mata-mata kelompok radikal ada di mana-mana, kecurigaan sekecil apa pun bisa menyebabkan orang dibunuh atau dicambuk. Sementara





itu hukum cambuk mulai diberlakukan. Perempuan makin dibatasi ruang geraknya, makin tidak berdaya.

Hari-hari tertentu aku suka menghabiskan waktu *nongkrong* di salah satu rumah ibadah. Kadang-kadang aku datang meminta makanan, obat-obatan, atau pakaian bekas. Biasanya aku duduk di sudut salah satu rumah ibadah tersebut. Suatu ketika aku menyaksikan sekelompok anak-anak membawa bom molotov. Hari itu aku merasa takut, risih, bahaya, karena hari sebelumnya aku melihat bom meledak, menghancurkan tubuh beberapa orang. Sepulangnya, aku tidak bisa tidur. Aku trauma. Jadi, waktu melihat anak-anak ini, aku mengkhawatirkan mereka. Namun, aku tidak berani melarang karena akan dikira kafir, menghambat orang untuk berjihad. Aku bingung. Apa yang harus kulakukan? Akhirnya aku memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka dengan rasa was-was agar tidak diketahui oleh orang lain, "Tahukah kalian akan situasi ini?" Anak-anak itu dengan polos menjawab, "Ya, kami mau Jihad. Kami ingin mati syahid!" Ooooh....., sambil menarik napas panjang dan tanpa sadar aku mencegah mereka, "Jangan, itu berbahaya." Tapi, mereka tak peduli. Tak lama kemudian, mereka dibawa pergi oleh seorang laki-laki dewasa dengan menumpang satu mobil *jeep*. Selang beberapa saat, aku melihat satu mobil ambulans datang. Yang kutahu, setiap bunyi ambulans terdengar, itu artinya telah jatuh korban. Kucoba mengikuti arah masuknya ambulans ke dalam salah satu rumah sakit swasta. Siapa korban kali ini? Temankah? Atau keluarga kah? Terkejutnya aku, ternyata kelima anak tadi tertembak di bagian dada, mereka meninggal. Saat ibu-ibu dari anak-anak tersebut datang, mereka menangis sambil berkata bahwa anak-anak itu akan masuk surga karena mati syahid. Di saat itu keprihatinan akan masa depan anak-anak menjadi bibit pikiranku untuk menyelamatkan anak-anak dari bahaya konflik.

Banyak LSM internasional mulai silih berganti datang dengan macam-macam bendera yang berkibar di mobil, masuk keluar kamp. Mereka mencari data, membagi-bagikan bantuan. Ada yang berkonsentrasi untuk masalah kesehatan, ada pula yang membagikan jatah makan. Kegiatan NGO internasional yang hanya bersifat *emergency* justru menciptakan ketergantungan masyarakat. Aku memandang bahwa kerja LSM internasional bagaikan kerja industri, bukan *humanitarian*, perolehan material dan status yang diincar. Mereka membuat komunitas jadi tidak berdaya, menciptakan ketergantungan, bahkan meruntuhkan potensi dan dedikasi. Mereka menciptakan kecemburuan dalam komunitas yang memunculkan konflik internal dalam kamp. Antara pengungsi saling bertengkar karena pembagian bantuan yang tidak merata; koordinator kamp berspekulasi dan memanipulasi data, sementara perempuan terus menjadi korban dan didiskriminasi, terutama janda.

Satu hal tentang konflik bersenjata, bahwa tak butuh waktu lama untuk kami mulai bisa membedakan senjata atau bom rakitan sipil (masyarakat) dan bom atau senjata organik militer hanya dari suaranya. Tiap hari ada kobaran api di mana-mana, bunyi senjata api, bunyi *sniper* dan suara bom, melihat pembunuhan. Setiap hari korban terus bertambah. Yah, seburuk itulah. Kadang-kadang di malam hari kantuk tak jua menghampiriku. Apabila ada bunyi rentetan bom atau senjata api, aku biasanya membayangkan seperti apa gerangan keadaan pada jaman penjajahan dulu. Adakah keadaan saat itu lebih sadis dari kehidupan yang aku rasakan saat ini?

Ada saat di mana aku berteriak dalam hati, 'Dunia macam apa ini? Mengapa kita menjadi individu yang terkekang begini?' Pemberontakan dalam hati mulai muncul, namun saat itu diri ini tidak mampu melakukan apa-apa. Rasa takut masih terlalu besar. Tenagaku serasa terkuras habis



*Kamp pengungsi di lokasi THR (Taman Hiburan Rakyat) Ambon. Foto: Baihajar Tualeka.*

hanya untuk menangis. Aku merasa lemah tak berdaya. Kalau memberontak bisa dibunuh, dituduh kafir. Anak ayam pun lebih berharga dari nyawa manusia karena begitu mudahnya nyawa manusia dihabisi. Maka, kewaspadaan mutlak ada agar nyawa ini tidak melayang. Kelompok jihad lokal makin kuat mendominasi. Mereka memiliki massa dan mampu bertindak brutal karena menganggap diri kuat. Mereka bisa bunuh siapa saja yang kedapatan melakukan transaksi atau berinteraksi dengan komunitas lain.

Di dalam keluarga, aku masih diperlakukan layaknya anak kecil yang selalu dibatasi ruang geraknya. Keluargaku mengajak aku untuk pergi dari kota Ambon, meninggalkan kekalutan ke kehidupan baru yang lebih aman dan nyaman. Hari itu adalah hari dimana aku dihadapkan pada pilihan; hari dimana aku dimarahi oleh keluargaku. Bagaimanapun, akhirnya aku tetap putuskan untuk terus tinggal di kamp bersama dengan yang lain untuk memulai sesuatu yang baru.

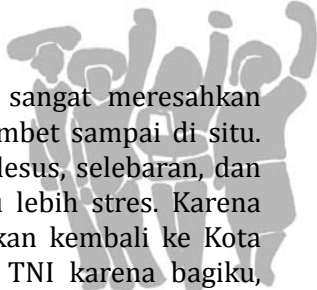
Semakin lama waktu berlalu, semua orang dalam kamp

semakin bingung. Ekonomi makin hari makin sulit saja; hampir sebagian besar orang dalam kamp sudah kehilangan pekerjaan. Anak-anak putus sekolah, menderita diare, kurang gizi dan terserang TBC. Sementara laki-laki sibuk membuat bahan peledak dan merakit senjata, tidak pedulikan keluarga. Saat itulah ibu-ibu bangkit berjualan keliling (*papalele*) demi memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Walhasil, tetap ada rasa bingung karena area interaksi mereka terbatas, tidak tahu mau jualan di mana.

Yang jelas, kehidupan tidak banyak berubah. Kadang-kadang aku berdoa sepanjang hari agar situasi normal kembali. Ada pula saat aku bertanya disertai rasa bersalah, "Tuhan cobaan apakah ini yang diberikan buatku? Mengapa aku harus jadi korban akan situasi ini, sementara pejabat-pejabat dan aparaturnya terus naik pangkat?" Ada saat dimana aku dan masyarakat meminta "DAMAI" dari Tuhan; agar Tuhan memberikan situasi aman, nyaman, bahagia, seperti situasi dulu lagi. Kemudian aku berfikir bahwa doa semata takkan merubah situasi. Mimpi barangkali. Aku mulai mengakui bahwa diriku ini dan orang-orang lain bukan orang-orang kuat, bukan orang-orang yang berpengaruh, bukan pula tokoh. Waktu itu aku berandai dan merindukan saat-saat dahulu dimana hidup berjalan dengan aman dan damai. Kalau boleh, aku mau putar balik waktu.

Aku harus selalu siaga setiap saat. Tas ransel selalu kupastikan ada di sampingku. Isinya sekedarnya: dua buah kaos, sepasang celana jeans, dan satu buah bantal tidur, karena hanya itu yang bisa aku selamatkan saat rumahku terbakar, karena nyawa lebih penting dari lainnya.

Apabila seseorang mau mengungsi ke luar kota atau pulang kampung, dia harus mempunyai banyak uang untuk membayar keamanan. Lalu datanglah saat genting dimana akhirnya aku dan sekeluarga memutuskan untuk pergi. Aku melihat kondisi di kota Ambon makin hari makin buruk dan memutuskan untuk pulang ke kampung halaman.



Ternyata, situasi di kampung juga sangat meresahkan karena isu konflik juga sudah merembet sampai di situ. Makin bingung aku rasanya. Desas-desus, selebaran, dan isu pembunuhan hanya membuatku lebih stres. Karena itulah, tak lama kemudian kuputuskan kembali ke Kota Ambon dengan menumpang mobil TNI karena bagiku, sekali lagi, tidak ada pilihan lain.

## **Membangun dari Reruntuhan**

Selama Konflik, semua aktivitas di Ambon otomatis lumpuh. Fasilitas publik seperti kantor, sekolah dan bank tidak berfungsi. Tidak banyak yang bisa dilakukan, namun orang harus senantiasa memeras otak memikirkan cara bertahan hidup. Waktu itu aku mempunyai motto ‘akal, pikiran dan tenaga yang kita miliki harus dimanfaatkan’. Aku harus mencoba menciptakan berbagai aktivitas agar tidak tergelincir ke dalam kejenuhan dan keputusasaan.

Ketika kembali di Kota Ambon, aku bertemu beberapa teman. Awalnya aku mulai berbagi pikiran untuk memulai gerakan kecil-kecilan dan *volunteer* (secara sukarela). Lalu muncullah ide untuk berjualan. Aku mulai berjualan bubur ketan hitam dan asongan di atas kapal. Aku memilih jadi pedagang asongan agar bisa memberikan inspirasi bagi orang lain. Ini spontan saja, semata untuk memotivasi. Aku melihat, di beberapa komunitas perempuan tidak mempunyai aktivitas untuk aktualisasi diri. Aku sadar saat itu semua orang masih takut, emosional, mudah marah dan cepat tersinggung. Semua masih berduka; suasana mudah berubah dan menjadi panas.

Jangan dikira berjualan di atas kapal itu bukan apa-apa. Itu pekerjaan berbahaya! Selalu ada kemungkinan jadi sasaran peluru nyasar dari arah laut, mungkin oleh *sniper*. Beberapa temanku pernah tertembak, ada yang luka parah bahkan mati. Ada lagi cerita lainnya. Pernah satu kali, sedang asyik jualan dalam kapal Pelni, aku tertinggal dalam

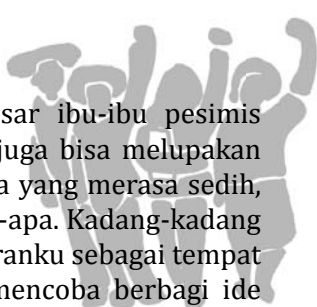


*Para pemuda berusaha melewati hari-hari yang melelahkan di tempat pengungsian dengan berolah raga. Foto: Baihajar Tualeka.*

kapal. Aku kaget, panik dan bingung waktu mendengar kapal sudah berlayar satu jam. Lalu aku dengan pedagang lainnya melakukan demo di kapal sehingga kapten bersedia menurunkan kami. Sejam kemudian kapal berbalik haluan dan kami akhirnya bisa turun. Kalau dihitung, jumlah kami pedagang asongan sangat banyak, sekitar seratus orang, perempuan dan anak.

Kondisi mencekam, isu pun datang silih berganti. Ada isu yang memanas yaitu bahwa “dunia akan tenggelam” dan semua orang akan mati pada tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Sebagian orang merasa takut, mereka bahkan tidak mau ke luar rumah. Di hari yang sama, datang kapal Pelni ke Ambon dari Timor-Timor yang membawa pengungsi kerusuhan dari sana. Pada hari itu, jam 6 pagi, aku dengan teman asongan tetap berangkat ke pelabuhan. Tidak sedikit pun aku terpengaruh isu kiamat tersebut.

Aku mencoba berbaur dengan ibu-ibu, sambil mencari



teman baru. Mulanya, sebagian besar ibu-ibu pesimis memandang situasi. Mereka belum juga bisa melupakan harta benda mereka yang hilang. Ada yang merasa sedih, merasa tidak mampu melakukan apa-apa. Kadang-kadang mereka hanya membutuhkan kehadiranku sebagai tempat curhat. Di saat curhat itulah, aku mencoba berbagi ide tentang berjualan atau mengasong di atas kapal. Aku coba membakar semangat mereka, agar bangkit dan memulai kehidupan. Ternyata ada hasilnya, mereka mulai berfikir untuk mencoba-coba. Tiba-tiba mereka mulai berbondong-bondong berjualan di atas kapal dengan saling mengajak. Senang rasanya melihat mereka senang bisa mendapatkan uang dari jualan yang laku. Itulah awalnya aku menjadi teman dengan komunitas. Ketika mereka mendapatkan uang dari asongan, perlahan-lahan aku menarik diri dari mengasong. Tidak ada niatku bersaing dengan mereka. Kemudian aku beralih mulai merencanakan membangun warung sebagai tempat nongkrong anak-anak muda yang berinisiatif untuk perdamaian.

Apa yang kulakukan sebenarnya sekedar mengalihkan perhatian orang-orang dari kondisi buruk. Lalu aku mulai bicara soal kepedulian dan mengajak orang-orang untuk beraktivitas walau situasi sulit. Ingin kutunjukkan ke semua orang bahwa konflik tidak boleh mematahkan semangat juang. Saat itulah aku semakin bangkit dengan modal semangat, memetakan potensi dan mulai membagi peran. Uang yang kudapat dari hasil asongan dan warung aku pakai untuk modal awal usaha bergulir sampai anggota kelompok usaha bersama ini mencapai jumlah sekitar 400 orang.

Pada saat itu, aksi saling menyerang antar komunitas sudah berakhir, namun belum bisa dikatakan damai karena hukum tidak berlaku, keadilan belum ditegakkan, kekerasan, juga pemerkosaan, ada di mana-mana. Langkahku masih dibatasi, tidak bisa bebas. Masyarakat pun

masih sensitif, begitu gampang dikipasi dengan sembarang isu provokatif, bahkan yang tak masuk akal sekalipun. Ada saat dimana kami kadang-kadang suka bingung. Saat itu istilah rekonsiliasi mulai didengungkan. Tapi, rekonsiliasi itu sebenarnya milik siapa? Mengapa masih ada area komunitas Islam dan Kristen? Apakah damai itu berarti meletakkan pos militer di daerah perbatasan? Ataukah dengan adanya main hakim sendiri oleh komunitas? Bukankah seharusnya Negara bertanggung jawab untuk selalu mendorong pola-pola rekonsiliasi antar komunitas? Kami bingung. Tidak ada jawaban yang cocok di akal kami.

Dalam kebingungan itu, bersama beberapa teman, kami mulai memberanikan diri menghidupkan pasar tradisonal, melakukan transaksi sayuran dengan komunitas lain. Ada beberapa kelompok yang mulai menjadi *papalele* (pedagang ikan dan sayur lokal). Apabila situasi berubah gawat, transaksi dilakukan di area militer yang dianggap sangat aman. Dari sinilah dari proses perdamaian alamiah berawal; sebuah proses yang didorong lewat kegiatan ekonomi perempuan di basis terendah. Kami terus memberanikan diri melakukan aktivitas komunikasi, *trust building* dengan komunitas lain, mulai berbicara tentang pendidikan anak dan memberdayakan diri mereka. Apa yang dilakukan oleh kelompok perempuan adalah murni keikhlasan, bukan rekayasa. Namun, upaya ini tidak cukup dihargai oleh pemerintah dalam mendorong perdamaian.

Setiap Jumat, aku dan perempuan-perempuan lainnya bertemu untuk saling mendukung dan menguatkan. Kami duduk di bawah pohon beralaskan rumput. Yang kami bicarakan utamanya adalah tentang tindakan dan strategi yang akan dilakukan untuk perubahan situasi. Kadang-kadang kami menangis, mengingat situasi yang membuat kami merasa ketakutan dan lemah. Ada saat di mana air mata keluar tiada hentinya. Air mata itu kami maknai bukan sebagai air mata kesedihan melainkan air mata penggugah;





*"Bersosialisasi" ala pengungsi. Foto: Baihajar Tualeka.*

air mata *spirit* yang memberikan keberanian berjuang untuk mengubah kepanikan, kekalutan, ketakutan, dan menjadi individu yang inspiratif dan kreatif. Saat itulah masing-masing dari kami merasakan kekuatan untuk mulai bangkit dengan warna yang kami tempuh berbeda-beda.

Lalu, aku mulai memberanikan diri mengajak dan melibatkan komunitas Kristen. Setiap hari Minggu jam 15.00 WIT, kami duduk dan bercerita di area perbatasan yang aman. Dalam *curhat* bersama itu, kami, perempuan dari dua kelompok yang bertikai, saling berbagi cerita. Ternyata, kami sama-sama menderita, merasa tidak aman, takut, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian ada beberapa perempuan yang berkata, "Ayo kita bikin kelompok SANUSA (Saniri (perkumpulan) Satu Rasa) untuk menumbuhkan nilai-nilai "KASIH" dan membagi duka." Semua yang hadir pun setuju. SANUSA punya slogan "DUKAMU-DUKAKU, SUSAHMU-SUSAHKU"; saat engkau menangis mengeluarkan air mata, aku pun menangis bersamamu. Slogan ini kami buat untuk menyemangati diri agar mulai bangkit dan membagi perasaan. Semangat

ini memberikan kehidupan baru. Bersama-sama kami berjuang dan belajar tentang makna menjadi diri yang peduli. Kami ingin merdeka dalam berbagi suka dan duka.

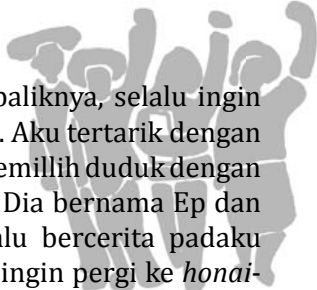
Hari itu aku merasa diteguhkan. Para perempuan yang hadir dalam diskusi adalah orang-orang yang tangguh, *survive* dan optimis. Mereka mampu memaknai konflik dari sisinya yang positif. Mereka meneguhkan dayaku untuk melihat ke depan sebagai masa yang lebih berguna daripada memikirkan yang berlalu. Mereka menguatkan semangatku untuk terus menggalang dukungan dalam membangun kesadaran antar sesama, kekompakan untuk mempersiapkan energi yang tersisa ini demi masa yang akan datang yang penuh dengan tantangan baru.

### **Kilas Balik Potret Pribadi**

Aku lahir di sebuah desa kecil daerah pesisir bernama Desa Pelauw Kecamatan Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah, tepatnya pada tanggal 4 Februari 1974. Aku anak ke-5 dari 9 saudara. Masa kecilku dihabiskan di Papua. Sekolahku selalu berpindah-pindah di provinsi paling Timur Indonesia itu.

Waktu kecil, yang jelas kuingat aku selalu mendapat pukul dari Mama. Katanya, aku anak yang paling bandel, aneh sendiri dan keras hati. Pernah Mama jengkel karena dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam saya pergi main kelereng bersama adikku laki-laki. Hari itu, aku pulang membawa 200 butir kelereng. Mama mengambil kelereng tersebut kemudian diletakkannya di atas piring. Disuruhnya aku makan kelereng-kelereng itu karena kesalnya Mama terhadap kenakalanku.

Lulus sekolah dasar, aku masuk SMP Negeri I di Wamena. Meski belum mengenal kata diskriminasi, aku bisa melihat ketidakadilan diberlakukan bagi orang asli Wamena. Di SMP, anak-anak pendatang bergaul hanya dengan anak-anak pendatang, sementara orang asli Wamena bergaul



dengan orang asli Wamena. Aku, sebaliknya, selalu ingin berteman dengan orang asli Wamena. Aku tertarik dengan kehidupan orang asli Wamena. Aku memilih duduk dengan seorang teman yang orang Wamena. Dia bernama Ep dan berasal dari daerah Wailes. Ep selalu bercerita padaku tentang kehidupannya. Aku sungguh ingin pergi ke *honai*-nya, rumah yang terbuat dari rumput alang-alang.

Satu waktu saat pulang sekolah, aku diajak main ke rumahnya. Jarak sekolah dengan rumah Ep kurang lebih lima kilometer dari Kota Wamena. Kami berjalan kaki karena tidak ada angkutan umum. Begitu masuk *honai*, temanku berganti baju seragam dan muncul lagi dengan *Sali* – pakaian tradisional perempuan asli Wamena yang hanya menutup bagian kemaluan saja sementara bagian buah dadanya terbuka. Aku kaget dan bertanya, “Mana sobatku?” Ep tertawa dan berkata, “Ini saya, Ep. Beginilah keseharian saya di rumah.” Setelah itu, Ep mengajak aku pergi memanjat buah murbei dan buah merah. Dia sangat pintar memanjat pohon. Aku ikut memanjat, tapi hampir tidak bisa turun dari pohon murbei.

Sepulang dari rumah Ep, aku langsung menuju rumah, dengan baju seragam putihku yang sudah penuh noda. Aku sampai di rumah jam 6 sore ditemani bapak kepala suku dan rombongan dengan dibekali oleh-oleh dua ekor babi, kelinci, ayam dan *ipere* (ubi jalar/*petatas*) tiga karung. Beginilah tradisi orang Wamena kalau kedatangan tamu. Lagi-lagi, aku dapat marah dari Mama karena pulang telat. Mama juga sempat sangat kuatir denganku. Tapi sejak saat itu aku dan Ep makin akrab saja sampai kami lulus SMP. Kadang Ep menginap di rumahku.

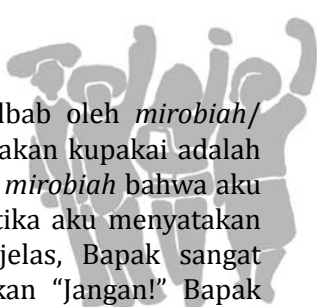
Tahun 1992, aku memasuki Perguruan tinggi di Universitas Pattimura, Poka-Ambon. Aku memilih jurusan Budidaya Pertanian Program Studi ilmu Tanah. Aku ikut organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-KOHATI) di kampus, selain aktif di LDK-Kampus. Di semester VII, aku masuk



Tampak belakang "rumah" pengungsian yang penuh tambal sulam.  
Foto: Baihajar Tualeka.

sebuah organisasi Islam ekstrim yang mengajari tentang Islam yang tidak bisa berinteraksi dengan pihak lain. Aku sempat mengikutinya selama tujuh bulan.

Ada saat, ketika aku menjadi anggota organisasi itu, aku mengkotbahi orang-orang di rumah. Aku selalu mengatakan bahwa perilaku semua orang di rumah adalah kafir dan haram. Kadang-kadang aku berlagak alim dan selalu *sok* menasihati orang, menyendiri dan menghabiskan waktu berjam-jam sendirian dalam kamar untuk beribadah. Hidupku hanya dengan komunitas *mirobiah* saja. Sepanjang hari, aku jauh dari semua orang termasuk teman-teman baik/dekat, bahkan keluarga. Pada awalnya orang tua merasa khawatir dengan tingkah laku saya. Lama kelamaan mereka jadi muak. Bapak, kakak, adik, bahkan teman-teman dekatku menganggap aku aneh, tidak jelas, ekstrim dan sedang krisis identitas.



Pada bulan ke-5 aku disuruh berjilbab oleh *mirobiah*/pembina/mama angkat. Jilbab yang akan kupakai adalah jilbab berjubah besar. Kubilang pada *mirobiah* bahwa aku harus minta ijin orang tua dulu. Ketika aku menyatakan niat untuk berjilbab besar, yang jelas, Bapak sangat marah dan dengan tegas mengatakan “Jangan!” Bapak mengatakan kalau aku terus belajar hal yang sangat ekstrem seperti itu, sama saja artinya aku menghambat dan membatasi ruang gerak serta potensi diri sendiri. Aku bingung bagaimana menjelaskan ke *mirobiah* bahwa orang tuaku tidak mendukung dan tidak memberikan ijin atas permintaanku.

Dalam kelompok itu, *mirobiah* biasa menjodohkan anggotanya untuk kemudian dikawinkan. Ketika datang giliranku untuk dijodohkan, aku terhenyak. Tiba-tiba aku mulai merasa aneh dan mempertanyakan mengapa aku harus dijodohkan. Aku tidak mungkin menikah. Aku masih kuliah dan tergantung pada orang tua. Apalagi, aku tidak kenal laki-laki itu; aku tidak mencintainya. Saat itulah aku memutuskan untuk keluar saja tanpa pamit, lalu pergi menemui teman dekat, bercerita tentang soal perjodohan ini. Temanku hanya tertawa dan menyarankan aku untuk tidak belajar di organisasi itu lagi. Ya, aku akhirnya memutuskan untuk pergi dari perkumpulan itu. Sejak keluar dari aliran tersebut, Bapak mulai memberikan pencerahan tentang makna Islam, tentang Islam yang menerima keberagaman. Aku dianggapnya sebagai orang yang lagi mencari jati diri. Sejak itulah, sekali lagi, aku paham bahwa Tuhan itu satu untuk semua umat manusia.

Satu hari, Bapak menyampaikan bahwa aku harus menyelesaikan kuliah karena di belakangku masih ada empat orang adik. Aku disuruhnya berhenti dulu dari kegiatan organisasi apapun di kampus. Kalau tidak, maka beliau akan menyetop uang bulanan, bahkan SPP-ku. Hari itu aku mulai memikirkan cara untuk mandiri agar

tidak terlalu tergantung kepada orang tua. Aku pun mulai berdagang bawang merah bersama dengan teman-teman, jualan sayur ke perumahan. Aku mulai memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam sayur dan pepaya. Hasil panen biasanya kubawa ke Citra swalayan di kota Ambon.

Tahun 1997, aku menyelesaikan kuliah. Mungkin tidak di sini saja, tapi yang jelas kebanyakan orang di wilayah Indonesia Timur lebih tertarik untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil. Tapi, aku tidak. Aku lebih suka wiraswasta atau kerja langsung kepada masyarakat. Aku langsung melamar waktu ada pengumuman dari perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang mau tinggal di Pulau Seriholo (Seram Pedalaman) mendampingi kelompok tani. Setelah diterima, aku tinggal di sana bersama kelompok tani. Di desa ini mandi dan cuci dilakukan di kali (sungai). Tidak ada listrik, air bersih jauhnya lima kilometer dari pemukiman, dan air bersih itu warnanya kuning. Akses ke kota sangat sulit.

Tahun 1998, bersama beberapa teman akrab yang juga berkeinginan yang sama, kami mendirikan perusahaan di bidang pertanian. Perusahaan tersebut bertujuan memberikan penguatan dan penyuluhan bagi petani-petani di Pulau Seram. Saat itu, Indonesia mulai dilanda krisis moneter. Pada saat bersamaan, harga coklat meningkat. Aku ingin membuka jaringan pemasaran sehingga dapat melepaskan petani dari kaum rentenir yang selalu memeras petani yang membeli murah hasil panen. Aku berdiskusi dengan petani-petani untuk membantu mendistribusi hasil panen dan memfasilitasi petani dengan pihak perbankan. Tahun itu awalnya semua berjalan lancar, namun di bulan ke enam, yaitu di awal Januari tahun 1999, konflik merembet sampai ke seluruh pelosok Maluku, tidak terkecuali desa binaan yang selama ini aku dampingi, ikut terbakar dan hancur.



*Kelompok Pakalele (pedagang ikan tradisional perempuan).  
Foto: Kelompok Papalele.*

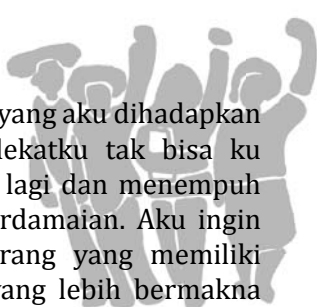
Pada masa konflik, aku sempat pacaran dengan seorang laki-laki yang bergabung dalam laskar Jihad. Awalnya dia rajin datang dan membawa bacaan baru buatku dan beberapa orang lainnya di kamp. Karena aku suka membaca, dia selalu meminjamkan bukunya. Suatu hari, aku dan dia duduk berdiskusi, membedah buku yang dibaca. Dari meminjamkan buku, berdiskusi buku, kami lalu mengarah ke berpacaran. Memasuki bulan ke-2 pacaran, dia mengutarakan niatnya untuk menikah denganku. Aku bingung, tidak tahu mau menjawab apa. Kemudian, dia memutuskan untuk bertemu dengan orang tuaku. Waktu dia datang menemui Bapak, bahkan sebelum dia mengutarakan niatnya, Bapak dalam bahasa daerah/ lokal Pelauw menyuruhku segera putus dan tidak boleh berkomunikasi lagi dengannya. Bapak bilang bahwa ia tidak suka melihat dandanan laki-laki itu, yang identik dengan cara berpakaian kelompok ekstrim, berjenggot dan bercelana gantung. Bapak menyarankan agar aku tidak menikah atau pacaran dengan laki-laki yang ekstrim dan beraliran beda.

Aku juga pernah berpacaran dengan laki-laki yang asalnya sama denganku (sekampung). Tahun 2006, dia datang meminangku ke keluargaku pada saat aku sedang berkegiatan di Jogja. Aku tidak pernah menduga dia berani meminang tanpa sepengetahuan dan persetujuanku. “Mengapa pinangan ini tidak saya ketahui?” tanyaku padanya. Katanya, tradisi di kampung adalah laki-laki yang menentukan serta mendominasi karena laki-laki adalah pewaris keturunan. Mendengar kata-katanya, sontak aku kesal dan marah. Aku sangat kesal dengan keputusan pinangan yang sepihak, namun aku tak bisa berbuat apa-apa karena orang tua sudah menerima pinangannya. Mereka pikir pinangan itu adalah keputusan kami berdua. Akhirnya, aku minta hak untuk menentukan waktu pernikahan. Dia setuju, begitu pula pimpinan adat (kepala *soa*) dari pihak dia dan pihakku. Di bulan Agustus tahun 2007, saat persiapan pernikahan sudah sampai tahapan undangan yang sudah siap dan tinggal disebar, di titik kritis itu, aku membatalkan pernikahan. Gara-garanya, dia memintaku untuk berhenti dari kerja-kerja ‘seperti ini’. Maunya dia, aku fokuskan perhatianku untuk dia semata begitu aku sah sebagai istri. Aku sadar bahwa pembatalan pernikahan akan menyakiti banyak orang; keluarga kedua belah pihak pasti kecewa. Namun, ini pilihan hidup yang menurutku terbaik untuk diriku. Sebab, sejujurnya aku tak mampu membayangkan hidupku di luar jalan yang kupilih ini.

## Melanjutkan Pergulatan

Kisahku bercorak luka, bahagia dan bingung. Namun darinya aku belajar menggeluti makna integritas diri, menguatkan serta mengembangkannya untuk terus bertahan. Ketika sudah banyak orang menyerah mempertahankan jalan yang kupilih, aku memantapkan diri, melakukan perubahan, membuka sekat-sekat ketidakadilan yang kurasakan. Ya, aku mau lanjut. Bahkan ketika aku dihantam lagi dan dipaksa





jatuh bertekuk lutut oleh ujian hidup yang aku dihadapkan kenyataan bahwa orang-orang terdekatku tak bisa ku 'selamatkan', aku tetap mau bangkit lagi dan menempuh jalan ini. Aku mau menjadi agen perdamaian. Aku ingin terus memotivasi dan mengajak orang yang memiliki potensi untuk melakukan sesuatu yang lebih bermakna untuk dirinya, dan menjadikan komunitas menjadi orang-orang yang kuat, berdaya, dan lebih manusiawi.

Aku banyak belajar dari orang-orang lain yang telah lebih dulu hadir dalam gerakan ini. Mereka menjadi sumber inspirasi, membuka jalan bagiku dan bagi generasi berikutnya. Generasi pendahulu ini terus berjuang tak peduli umur kian bertambah. Semangat yang menyinari adalah tulus, untuk terus membuka ruang kebenaran. Generasi tua adalah orang-orang yang tidak mengenal lelah, orang-orang yang optimis, orang-orang yang terus bersemangat, orang-orang yang penuh dedikasi dan pemikiran kritis. Mereka adalah generasi yang memiliki kepedulian dan empati, yang terlihat dari raut wajah mereka dalam membela kaum yang tertindas. Mereka menjadi referensi sejarah bagi generasi berikutnya, bagiku.

Peristiwa-peristiwa dan orang-orang terus memberi inspirasi dan menyemangati langkahku. Syukurlah, karena aku paham aku butuh asupan kekuatan untuk pekerjaan yang panjang dan kadang terasa melelahkan ini. Aku terus meyakini bahwa perlahan-lahan akan ada generasi baru yang lahir karena terinspirasi oleh gerakan yang kupelihara. Mereka akan terus belajar tentang sebuah perubahan dalam memberikan ruang yang adil bagi komunitas. Ruang yang adil itulah cita-citaku, cita-cita orang-orang lain yang tertindas. Untuk merealisasikan itu, aku perlu mengajak semua orang untuk menggalang terus gerakan, membangun kesadaran dan kepedulian antar sesama, serta memberikan inspirasi bagi lainnya.

Hidup ini adalah arena pertempuran. Jangan bermimpi

perubahan itu akan datang kalau tidak memulai dari diri sendiri. Jadi, aku harus optimis, bergandeng tangan bersama saudara-saudaraku, menghentakkan kaki, dan bersuara guna mencari keadilan dan kebenaran. Aku tahu sinar itu akan datang perlahan-lahan, sejejak demi sejejak menerangi dan memancar bagi orang-orang. Kita tidak akan terus hidup di dalam kegelapan. Kita akan terus bangkit, bangun kembali dalam solidaritas dengan semua kekuatan yang kita miliki.

Gerakan yang dibangun, kadang maju kadang mundur; fakta sebuah realitas dengan dinamika kehidupan yang alami. Justru dari perjuangan dan pergulatan ini, aku belajar melihat konflik sebagai peluang untuk membangun gerakan berbasis komunitas yang berkelanjutan. Terus mengajak orang-orang lainnya untuk terlibat gerakan, meluangkan waktu, energi dan pikiran serta mengkaderisasi gerakan untuk memperpanjang nafas pergerakan. Aku tahu, perubahan itu adalah harapan semua orang. Karenanya, semua komponen dalam komunitas perlu diajak untuk terlibat dalam mendorong proses *peace building*, serta memperjuangkan hak-hak korban. Gerakan perubahan harus terus dirangsang, dilakukan secara bersama dengan melihat potensi diri, komitmen, kreativitas, inovasi, dan kearifan lokal, agar kelak dapat bertahan dan tidak mengalami kelelahan. Gerakan ini dimulai dari kesadaran kritis yang mendorong tiap orang untuk terus belajar; memperjuangkan hak dan keadilan, dan menciptakan ruang kebebasan dalam berekspresi tanpa ada ancaman, tekanan dan batasan.

## Menatap Pergulatan ke Depan

Sepuluh tahun berselang sudah sejak aku memulai pergulatan untuk membangun kekuatan dalam komunitas yang hancur akibat konflik, terutama dengan menyemangati anak-anak dan perempuan. Sebagian anak-anak yang dulu belajar di sekolah alternatif yang aku bangun bersama



*Tampak depan "rumah" pengungsian tempat pengungsi menghabiskan hari-harinya. Foto: Baihajar Tualeka.*

kawan-kawan lain, kini telah beranjak dewasa. Mereka tumbuh sebagai individu yang kritis, kreatif dan cinta keberagaman. Menatap mereka, aku seolah menatap masa depan yang benderang. Dalam diriku ada rasa bangga, pada mereka. Saat itu juga, tumbuh keyakinan bahwa mereka akan membawa dirinya pada pergulatan yang bermakna, tidak hanya bagi diri sendiri tapi juga bagi lingkungannya.

Sementara, pergulatanku belum berakhir. Dalam diri terus-menerus muncul pertanyaan, tindakan apa yang masih perlu dilakukan untuk mengubah situasi agar menjadi seperti yang kita impikan, sebuah dunia yang bebas dari kekerasan dan tekanan? Strategi seperti apa yang bisa kita temukan untuk mendorong pencarian kebenaran dan keadilan bagi kaum tertindas dan marginal? Jika jawaban untuk semua perubahan ini bukan hanya di diri sendiri, bagaimana kita memaknainya secara positif ketika berbenturan dengan sudut pandang yang berbeda?

Dalam pergulatan ini, saya ingin menyampaikan seruan

agar semua kawan-kawan terus berjuang atas apapun yang ingin diraih. Kita adalah bersama dalam dunia yang beragam, namun mempunyai nilai dan hakikat yang sama untuk terus mencari keadilan dan kebenaran. Harapanku, pergulatan ini menguatkan solidaritas di antara kita dalam melakukan perjuangan dan perubahan.

Semua yang tertuang di sini adalah kata hatiku yang kupersembahkan bagi semua kawan-kawan dalam gerakan ini. Ayo, terus berjuang demi mencari dan memancarkan keadilan bagi kaum yang tertindas. Akan ada hari yang indah untuk kita semua dari perjuangan ini. Semoga kita terus semangat!



# Demi Mimpi

Andy Yentriyani – Jakarta



*“Hari ini sudah kuputuskan, Aku tidak mau hidup sebagai orang yang tunduk dan selalu ketakutan, hanya karena bermata sipit dan berkulit kuning, hanya karena menjadi seorang perempuan. Setiap orang seharusnya dapat hidup sebagai seseorang yang punya hak yang sama dengan yang lainnya, sebagai manusia, sebagai warga negara sah negeri ini.”*

Sepenggal paragraf itu kutuliskan dengan gemetar dan tetes air mata—kebiasaan burukku ketika terlalu emosi. Hari itu, seorang laki-laki yang tidak kukenal mencoba memegang payudaraku saat aku sedang berdiri menunggu

## Peristiwa Mei 1998 yang Kelam



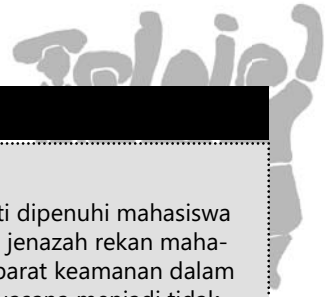
*False Target — Astarti Rasjid*

Sejak pertengahan 1997, pamor Orde Baru mulai meredup. Perekonomian Indonesia yang menjadi simbol kesuksesan Orde Baru mulai merasakan dampak dari krisis ekonomi global. Indonesia tidak bisa membayar pinjaman luar negeri yang selama

ini diandalkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek pembangunan Orde Baru. Kebijakan pembangunan malah membuat Indonesia sangat tergantung pada impor, baik bahan pangan maupun bahan baku industri. Pemerintah lalu memutuskan untuk membiarkan nilai tukar rupiah ke dalam sistem pasar uang dunia. Akibatnya, harga bahan pokok melambung tinggi, bahkan sampai lebih sepuluh kali lipat. Situasi ini memicu protes di masyarakat dan demonstrasi menentang Orde Baru segera meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Demonstrasi terutama dilakukan mahasiswa, perempuan, buruh, dan tani. Salah satunya adalah aksi Suara Ibu Peduli yang mendesak pemerintah menyediakan susu dan bahan makanan pokok dengan harga murah.

Sejak awal 1998, demonstrasi terjadi hampir setiap hari di berbagai kota besar Indonesia. Peserta demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto yang telah memimpin rezim Orde Baru selama lebih dari 32 tahun. Di Jakarta, mahasiswa mulai menduduki gedung DPR, dan pasukan keamanan disiagakan penuh. Beberapa kali pasukan antihuru-hara dan aparat keamanan menangkap sejumlah orang yang diduga menjadi pemimpin demonstrasi; beberapa di antaranya tak pernah kembali. Aparat juga menggunakan pentungan, gas air mata, dan menembakkan peluru karet ke udara dan tanah untuk membubarkan aksi.

Pada 12 Mei 1998, demi menghalau mahasiswa untuk keluar berdemonstrasi, aparat keamanan menembak ke dalam kampus Trisakti, Jakarta. Kali ini aparat menggunakan peluru tajam. Empat mahasiswa tewas akibat penembakan itu.



### **Tragedi Mei 1998**

Esok harinya, 13 Mei 1998, kampus Trisakti dipenuhi mahasiswa dan masyarakat yang hendak melepaskan jenazah rekan mahasiswa yang tewas tertembak. Kehadiran aparat keamanan dalam kegiatan itu memicu kemarahan massa. Suasana menjadi tidak terkendali ketika sejumlah orang mulai menyerang aparat dan merusak fasilitas keamanan yang ada di sekitar kampus. Di tengah situasi ini, muncul kelompok massa laki-laki yang bergerak menuju pusat perdagangan di dekat kampus sambil berteriak-teriak memancing massa untuk membakar bangunan dan menjarah toko. Api dan asap mulai terlihat memenuhi udara Jakarta.

Pada waktu hampir bersamaan, kelompok massa yang lain bergerak di berbagai sentra ekonomi di Jakarta. Mereka menjarah, menghancurkan, dan membakar bangunan serta kendaraan yang mereka temui. Sasaran mereka adalah bangunan milik dan daerah yang mayoritas dihuni warga etnis Tionghoa. Agar tidak menjadi sasaran massa, ada banyak pintu rumah dan toko yang ditutup rapat-rapat dengan tulisan "milik pribumi", "punya Haji", atau "orang Muslim".

Kerusuhan menyebar cepat ke seluruh Jakarta dan berlangsung hingga dua hari berikutnya tanpa tindakan dari aparat keamanan. Hal ini sungguh membingungkan. Pada hari-hari sebelum kerusuhan, pasukan disiagakan penuh di dalam kota Jakarta. Sebaliknya, pada saat kerusuhan, hampir tidak tampak aparat keamanan di lokasi kejadian. Kalaupun ada, mereka seolah membiarkan aksi kerusuhan itu berlangsung. Bahkan, beberapa pos polisi dibiarkan dirusak dan dibakar massa. Kerusuhan, dengan pola yang sama, menjalar ke kota-kota besar lainnya di Indonesia seperti Surabaya, Solo, Palembang, dan Lampung.

Informasi yang dikumpulkan oleh Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK) menunjukkan tidak saja bangunan dan kendaraan yang rusak dan terbakar di dalam kerusuhan itu. Ada ratusan orang yang terjebak dan tewas dalam gedung yang dibakar; sebagian banyak sengaja dijebak karena pintu gedung dikunci agar mereka tidak bisa lolos. Di tengah kerusuhan itu pula, terjadi perkosaan massal, yaitu sejumlah banyak perkosaan di banyak lokasi dan dalam bentuk gang rape (perkosaan dilakukan oleh sekelompok orang secara bergantian), dan penyerangan seksual terhadap perempuan.

kendaraan umum. Aku begitu marah, dan kuteriaki dia sebagai penjahat. Ia berhenti, sambil mendelik berkata, “Jangan sok berani. Asal tahu saja, aku bisa perkosa kamu seperti *amoy-amoy* lainnya dalam kerusuhan kemarin.”

Ya, kejadian itu berlangsung sekitar satu bulan setelah kerusuhan melanda Jakarta dan beberapa kota besar lain di tengah bulan Mei 1998. Dalam peristiwa itu terjadi pemerkosaan berkelompok (*gang rape*) dan serangan seksual lain terhadap perempuan, khususnya perempuan etnis Tionghoa atau yang berparas seperti etnis Tionghoa. Berita tentang adanya kekerasan seksual ini tersebar luas di masyarakat dan membuat warga Tionghoa, yang menjadi sasaran dalam kerusuhan tersebut, menjadi semakin ketakutan. Karena berita ini, sejumlah temanku memperingatkanku agar tidak berjalan sendirian.

Pada hari kerusuhan di Jakarta, yaitu 13-14 Mei 1998, aku juga diminta untuk tetap berada di dalam kampus saja—kampus Universitas Indonesia di Depok. Padahal, selama ini aku selalu bersama mereka dalam aksi demonstrasi di jalan dan gedung DPR-RI menuntut turun Soeharto yang memimpin rezim Orde Baru selama tiga puluh dua tahun. Tidak pernah sekali pun ada temanku yang menyoal identitasku. Tidak ada, kecuali sampai hari kerusuhan itu. Karena itulah, peringatan mereka seperti tamparan bagi kesadaranku tentang identitasku—sebagai perempuan dan sebagai seorang Tionghoa.

Sebetulnya sejak kecil aku paham pedih-perihnya menjadi seorang Tionghoa di Indonesia. Lewat kebijakan dan praktik birokrasi, diskriminasi berbasis etnis dilembagakan oleh rezim Orde Baru. Tidak kurang memedihkan adalah sikap dan perilaku masyarakat yang tidak saja membedakan dan meminggirkan, tetapi juga merendahkan. Misalnya saja, keberhasilan di bidang ekonomi kerap dicurigai sebagai hasil dari pekerjaan yang tidak jujur yang berpadu dengan sifat pelit. Kalau bertengkar, biasanya kami akan diteriaki





*Demo Koalisi Perempuan Indonesia mengancam kasus perkosaan dalam kerusuhan Mei 1998. Foto: Sandra.*

“Cina PKI”—sebuah stigma yang tidak hanya tentang paham komunisme yang dilarang oleh pemerintah, tetapi juga tentang sebuah tuduhan bahwa nasionalisme etnis Tionghoa terhadap Indonesia selalu patut untuk dipertanyakan.

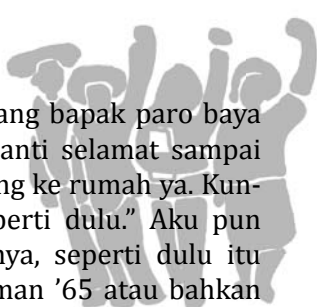
Saking pedihnya sikap dan perilaku ini, ada masa ketika aku menolak apa pun yang diasosiasikan sebagai Cina. Akibatnya, sebagai anak ketiga dari empat bersaudara yang semuanya adalah perempuan, cara menggunakan sumpit dan kemampuan berbahasa Cinaku adalah yang paling buruk. Hal yang terakhir itu sungguh kusesali saat ini sebab aku menya-nyikan kesempatan belajar untuk fasih berbahasa Mandarin.

Dari pengalaman sejak kecil pula aku belajar bahwa sikap dan perilaku sejumlah orang akan berubah 360 derajat setiap kali aku memperkenalkan identitasku yang lebih kompleks dari sekadar etnis Tionghoa. Pernyataan ini—yang menunjukkan bahwa aku juga seorang muslim—sering “menyelamatkanku” dari setiap kondisi yang te-

rasa menyudutkan terkait dengan prasangka berbasis etnis. Namun, strategi ini selalu pula meninggalkan pedih yang dalam. Saat aku mendapat perlakuan yang lebih baik karena dianggap “ia ternyata bukan Cina saja”, saat itu pula pengalamanku akan diskriminasi berbasis etnis terkukuhkan.

Pengalaman yang berbeda kuperoleh ketika ikut aktif dalam kelompok studi di awal tahun perkuliahanku. Kelompok studi ini beranggotakan mahasiswa lintas ilmu, aku sendiri belajar di jurusan hubungan internasional. Kami mendiskusikan sejumlah persoalan nyata dalam masyarakat dan bersikap kritis terhadap rezim Orde Baru yang telah dipimpin oleh Soeharto selama lebih dari 32 tahun. Bagiku, mengembangkan sikap kritis ini bukanlah gampang. Sebelumnya, aku adalah salah satu kader utama di tingkat provinsi untuk mengampanyekan ideologi negara dan sebagai satu kesatuannya, untuk mengelu-elukan rezim Orde Baru. Titik balik sikapku hadir ketika mendengarkan pengalaman perempuan di Timor Timur (sekarang Timor Leste) yang penuh kekerasan akibat kehadiran militer Indonesia. Aku mulai mencari tahu tentang akibat militerisme bagi masyarakat. Informasi-informasi yang kuperoleh membuatku yakin untuk ikut dalam gerakan mahasiswa menuntut turun Soeharto. Dalam seluruh pencarian ini dan dalam gerakan mahasiswa, tidak sekali pun identitasku dipertanyakan, apalagi dipermasalahkan. Tidak pernah, kecuali sampai hari kerusuhan itu.

Pada hari pertama kerusuhan, 13 Mei 1998, aku harus “menyelamatkan” adik perempuan kandung dan adik sepupu yang baru saja datang ke Jakarta sehari sebelumnya untuk persiapan ujian masuk universitas. Dalam gerbong kereta api yang penuh sesak, kami melewati pertokoan yang terbakar, massa yang panik berlarian ataupun yang keluar dengan jarahan, gerbang-gerbang terkunci bertulisan “milik pribumi” atau “milik pak haji”, dan ketiadaan



seorang aparat keamanan pun. Seorang bapak paro baya di sebelahku berkata, “*Nak*, kalau nanti selamat sampai stasiun, kalian bertiga langsung pulang ke rumah ya. Kunci yang rapat. Bapak takut... ini seperti dulu.” Aku pun tak punya keberanian untuk bertanya, seperti dulu itu apa maksudnya—apakah seperti zaman ’65 atau bahkan tahun-tahun sebelumnya ketika etnis Tionghoa selalu menjadi kambing hitam sasaran kemarahan massa kepada penguasanya? Entahlah. Yang kutangkap, rasa takut yang mencekam, bukan hanya padaku tapi bahkan semua orang di sekelilingku.

Peringatan itu, juga peringatan dari kawan-kawan yang lain, kuterima dengan rasa takut dan juga marah. Namun, rasa itu tak sempat terungkap karena semua terasa berjalan terlalu cepat. Sampai hari ketika laki-laki yang melakukan pelecehan seksual itu mengancamku dengan begitu enteng. Maka tanpa berpikir dua kali, kudatangi ia. Kucengkeram erat-erat kerah bajunya dengan kedua tangan dan kutarik mendekati wajahku. Sambil menatapnya lekat-lekat, masih teringat seperti kejadiannya kemarin, aku berkata, “Coba kalau berani. Aku janji, kamu akan menyesal karena aku akan membalasmu, tanpa ampun.” Mungkin karena terkejut dengan sikapku yang sangat serius, ia pun memberontak, melepaskan diri dari cengkeramanku dan berlari menjauh sambil terus berteriak, “*Amoy* gila, mampus lu nantinya!”

Aku diam berdiri melihatnya lari menjauh. Ketika datang angkutan yang kutunggu, aku meneruskan perjalanan menuju rumah. Hal pertama yang kulakukan adalah mengambil pena dan kertas. Kutuliskan surat kepada kedua orangtuaku. Surat permintaan maaf karena memutuskan untuk menerjunkan diri dalam aktivitas politik agar aku, kakak dan adikku, serta semua warga negara lainnya bisa hidup dengan rasa aman dan tidak lagi harus merasakan pedih akibat diskriminasi atas dasar apa pun. Aku harus minta maaf, karena orangtuaku tak akan setuju dengan



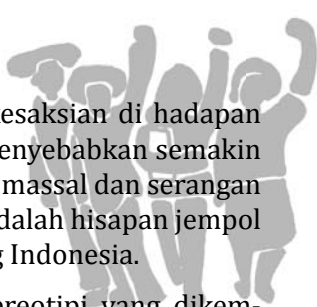
*Menurut temuan TGPF, korban perkosaan adalah penduduk Indonesia dengan berbagai latar belakang, yang di antaranya kebanyakan adalah etnis Cina. Foto: Sandra.*

keputusan ini. Apalagi, mereka selalu menasehatiku untuk menjauhi aktivitas politik. Mereka khawatir aku akan merisikokan hidupku; hal yang lazim terjadi ketika kita berhadapan dengan kekuasaan yang otoriter.

Segera setelah menerima suratku, ibuku langsung menelepon. Ia menjadi sangat khawatir kalau aku, tidak saja karena risiko nyawa tetapi terlebih lagi, akan menjadi gila karena kecewa tak bertemu kawan dalam perjuangan idealis ini. Belakangan ia tahu, bahwa ia tak perlu terlalu khawatir. Sebab jalan yang kutempuh ini tak sesunyi yang ia bayangkan.



Dua tahun setelah tragedi Mei '98, aku mulai bergabung dengan Komnas Perempuan, lembaga independen negara yang lahir dari tragedi tersebut. Saat itu, aku diminta untuk membantu penyelenggaraan lokakarya nasional tentang perlindungan bagi saksi dan korban. Isu itu mencuat setelah peristiwa Mei 1998 karena tidak ada seorang korban pun



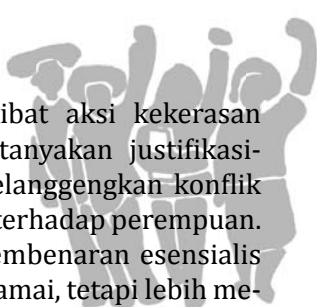
yang bersedia tampil memberikan kesaksian di hadapan publik dan pengadilan. Kondisi ini menyebabkan semakin kental tudingan bahwa pemerkosaan massal dan serangan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 adalah hisapan jempol belaka dan adalah upaya merongrong Indonesia.

Tudingan itu direkatkan dengan stereotipi yang dikembangkan di zaman Orde Baru bahwa orang Cina, karena kedekatan kultural mereka dengan negeri Cina, tidak pernah benar-benar bisa menjadi orang Indonesia. Tudingan ini tidak hanya datang dari masyarakat tetapi juga aparat negara. Sementara tudingan berlanjut, terjadi pembunuhan seorang perempuan muda, Ita Martadinata, anak seorang relawan yang membantu korban kerusuhan Mei 1998. Pembunuhan terjadi menjelang kepergian mereka ke Amerika. Menurut kabar yang berkembang, mereka hendak memberikan kesaksian tentang peristiwa kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998. Informasi resmi dari pihak kepolisian membantah bahwa pembunuhan itu terkait dengan rencana kepergian tersebut melainkan sebagai kasus kriminal biasa. Selanjutnya bahkan berkembang berita bahwa perilaku seksual Ita adalah penyulut peristiwa pembunuhan tersebut. Bagi warga etnis Tionghoa, berita seputar pembunuhan itu semakin mematahkan semangat bahwa akan ada jalan bagi mereka untuk menuntut keadilan. Dalam situasi politik serupa ini, mana lagi definisi hukum yang berlaku tentang pemerkosaan berpotensi mematahkan kesaksian korban, seandainya pun aku seorang korban belum tentu aku mau maju.

Selain terkait kasus Mei '98, dalam pertemuan ini dibahas pula kebutuhan perlindungan saksi dan korban yang dihadapi oleh korban-korban pelanggaran hak asasi manusia yang memperlihatkan ada indikasi keterlibatan aparat negara sebagai pelaku kekerasan, seperti di Aceh, Papua dan Timor Timur (kemudian menjadi Timor Leste).

Juga, dalam konteks konflik di berbagai wilayah Indonesia yang terjadi antar komunitas berbeda latar belakang etnis atau agama seperti di Ambon, Poso, Sambas, dan Sampit. Aku menjadi tahu bahwa ada banyak inisiatif di masyarakat yang muncul pasca kerusuhan Mei 1998 untuk mendukung perempuan korban kekerasan. Dari para pendamping yang berasal dari berbagai latar belakang dan beragama usia, aku merasakan kehangatan dan solidaritas yang kuat untuk menempuh langkah demi langkah merebut ruang bagi pengungkapan kasus pelanggaran hak asasi manusia berbasis gender dan menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi perempuan korban. Pengalaman ini yang menjadikanku yakin untuk bergabung dengan Komnas Perempuan, yang ternyata kujalani sampai hari ini.

Dalam setiap kesempatan untuk bertemu dan belajar dengan semakin banyak perempuan pendamping korban kekerasan dan pendamping komunitas pasca konflik, aku menelusuri kompleksitas dinamika peran dan posisi perempuan dalam konflik. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi titik perhatianku. Pertama, perempuan tidak saja menjadi korban baik secara langsung maupun tidak langsung, ataupun menjadi aktor-aktor perdamaian, tetapi juga ada yang terlibat dalam aksi kekerasan semasa konflik. Keterlibatan dalam aksi kekerasan tidak saja disebabkan oleh mobilisasi dari kelompok yang bertikai dengan menggunakan justifikasi balas dendam atas sanak saudara yang terbunuh dalam konflik, kepentingan agama dan kelompok. Ada juga perempuan yang menggunakan keterlibatan tersebut sebagai cara memanjat jenjang hierarki sosial dalam masyarakat, tetapi tidak di dalam kelompok bersenjata itu sendiri karena mereka lebih sering ditempatkan di garis belakang dengan posisi komando yang rendah. Beberapa rekan pendamping perempuan korban yang menjadi aktor perdamaian ternyata pernah menjadi bagian dari kelompok bersenjata. Mereka berubah haluan karena tergugah saat menyaksikan



kesengsaraan yang ditimbulkan akibat aksi kekerasan dan perlahan-lahan mulai mempertanyakan justifikasi-justifikasi yang digunakan untuk melanggengkan konflik dan juga kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Perubahan ini tidak mengarah ke membenaran esensialis bahwa perempuan adalah makhluk damai, tetapi lebih menunjukkan proses terbangunnya kesadaran kritis terhadap persoalan sosial.

Kedua, upaya damai yang dibuat perempuan biasanya *low profile*, namun pada saat bersamaan berkelanjutan. Yang terpenting dari upaya ini adalah kesadaran mendobrak mitos dikotomi antara upaya damai dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan; tidak mungkin ada damai bila kekerasan terhadap perempuan ditoleransi dan dibiarkan. Hal ini tak lepas dari pengalaman nyata perempuan pasca konflik yang memperlihatkan mereka tetap harus berhadapan dengan berbagai diskriminasi dan kekerasan dalam posisinya sebagai anak perempuan, istri dan anggota perempuan dalam komunitasnya setelah “perjanjian perdamaian” ditandatangani.

Ketiga, baik perempuan pendamping korban maupun komunitas sulit menyebutkan persoalan yang mereka hadapi sebagai perempuan pembela hak asasi manusia tanpa merasa malu atau bersalah dengan korban-korban yang didampinginya. Padahal, banyak di antara mereka yang mengalami *burn-out* akibat kejenuhan yang luar biasa dengan beban pekerjaan yang seperti tiada akhir, dan pada saat bersamaan harus berhadapan dengan berbagai persoalan dalam kehidupan pribadinya. Sesungguhnya, mereka adalah perempuan-perempuan tangguh yang kesabaran, keuletan, kreativitas dalam mencari terobosan, dan kemandiriannya tak henti diuji dalam aktivisme ini. Hanya komitmenlah yang menjadikan mereka bertahan, terus berkembang dan saling dukung. Komitmen mereka ini pula yang menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk

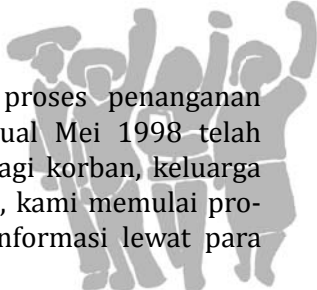
juga bekerja bagi perempuan korban dan komunitas di daerahnya dan di berbagai daerah lain. Aku pun satu dari sejumlah banyak di antara orang yang terinspirasi oleh mereka, dulu hingga kini. Merekalah yang menjadikan aku ada, sumber kekuatan saat aku merasa lelah, kawan dalam perjuangan yang aku tahu masih akan panjang.



Menjelang peringatan sepuluh tahun kerusuhan Mei 1998, aku diminta untuk menjadi asisten Ibu Saparinah Sadli selaku Pelapor Khusus Komnas Perempuan tentang kekerasan seksual Mei 1998. Mandat dari Pelapor Khusus adalah mendokumentasikan kondisi terkini dari korban dan pendamping korban kekerasan seksual Mei 1998 dan memberikan rekomendasi untuk mendukung upaya pemulihan korban. Di tingkat organisasi, keputusan untuk pendokumentasian ini menjadi penting karena selama lima tahun terakhir tidak ada kegiatan khusus yang terkait langsung dengan peristiwa Mei 1998. Meskipun demikian, pemahaman tentang kompleksitas permasalahan Mei 1998 bersamaan dengan kasus-kasus kekerasan seksual dalam konteks konflik lainnya selalu menjadi titik berangkat dan kompas bagi Komnas Perempuan membangun strategi intervensi sistemik untuk pemenuhan hak perempuan korban. Lewat dokumentasi ini, Komnas Perempuan berharap memperoleh informasi mutakhir untuk menguatkan strateginya dan di sisi lain, menjadi ruang bagi korban dan pendamping untuk terus memperjuangkan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.

Aku menerima tugas itu dengan suka cita, meski paham bahwa akan berhadapan dengan setidaknya dua tantangan besar. Pertama, persoalan keamanan diri akibat kemungkinan masih adanya pihak-pihak yang tidak saja enggan mengakui tetapi tidak mau kasus Mei '98 ini di-kuak kembali. Kedua, kemungkinan penolakan dari





korban mengingat peristiwa dan proses penanganan selama ini tentang kekerasan seksual Mei 1998 telah menimbulkan trauma yang dalam bagi korban, keluarga dan komunitasnya. Dalam situasi ini, kami memulai proses dokumentasi dengan mencari informasi lewat para pendamping.

Ternyata untuk memperoleh informasi dari pendamping pun tidak mudah. Bahkan mungkin tidak akan terhipun jika bukan karena sosok Ibu Saparinah Sadli, salah seorang tokoh gerakan perempuan Indonesia. Ibu Saparinah adalah juga salah satu anggota Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kerusuhan 13-15 Mei 1998 yang dibentuk pemerintah Republik Indonesia segera setelah peristiwa kerusuhan tersebut. Dalam kapasitasnya itu, ia pernah berjumpa dengan sejumlah pendamping dalam proses verifikasi kasus kekerasan seksual Mei 1998. Keberpihakannya terhadap pemulihan perempuan korban dan komitmennya kepada upaya penegakan hak asasi manusia menjadi dasar kepercayaan para pendamping sehingga bersedia diwawancarai..

Wawancara dengan pendamping adalah saat-saat terberat dalam tugas ini. Sebagian besar pendamping adalah bukan konselor profesional, meskipun ada yang berlatar belakang pekerja sosial. Mereka adalah ibu rumah tangga, dosen, guru, rohaniwan, aktivis hak asasi manusia, dokter, relawan dan pekerja sosial yang dipertemukan dengan korban kekerasan seksual karena mereka dipercayai oleh korban atau keluarga korban. Selama ini mereka bungkam, karena diminta oleh korban atau keluarganya, meski mereka sangat ingin untuk menghentikan setiap teriakan yang menyangkal keberadaan korban. Penyangkalan ini menoreh luka di hati mereka karena mereka menyaksikan langsung korban dan keluarganya menanggung kepedihan akibat tindak kekerasan seksual itu, kekecewaan yang dalam terhadap sebuah bangsa yang mereka cintai,

bahkan hingga ada yang patah harapan kepada negeri ini. Kepedihan pendamping bertambah ketika mereka dituduh ingin mencari popularitas semata, egosentris karena memperjuangkan orang-orang yang seetnis tanpa memikirkan kelompok lain yang juga menjadi korban kerusahan Mei 1998, atau ingin menjelek-jelekkan Indonesia. Sejumlah pendamping menginternalisasi kepedihan korban dan trauma dalam pendampingan, sampai-sampai memengaruhi relasi pribadinya. Ada pula yang memutuskan untuk sama sekali tidak lagi berhubungan dengan isu-isu pelanggaran hak asasi manusia serupa yang mungkin menyebabkan pengalaman kekecewaan serupa berulang kembali.

Wawancara dengan pendamping sulit bukan hanya karena aku harus menyaksikan para pendamping “kembali terluka” karena harus menuturkan sesuatu yang mereka simpan rapat-rapat selama ini. Lebih dari itu, setiap wawancara membuatku terguncang karena menghadirkan kembali tragedi Mei ‘98 ke dalam hidupku. Sambil mendengar detil kejadian kekerasan yang dialami korban, aku seolah terlempar ke lorong waktu saat aku merasa ketakutan yang sangat pada hari kerusahan itu. Setiap lolongan pertanyaan korban tentang mengapa ia menjadi korban menyiram asam pada kepedihan yang berakar pada pengalamanku tumbuh sebagai perempuan Tionghoa di Indonesia. Setiap permohonan keluarga korban agar pendamping merahasiakan keberadaan korban mengingatkanku pada kecemasan ibuku di hari-hari itu. Setiap permintaan korban, keluarga dan juga beberapa pendamping untuk jangan dihubungi dan jangan lagi diingatkan kepada peristiwa itu menggemakan rasa hampa yang tak terperi. Seorang pendamping berkata bahwa bersamaan dengan hadirnya permintaan itu ada rasa yang hilang di dalam hatinya, sebab ia “semacam lupa... mau lupa... tetapi seperti di bawah sadar, ingatan ini tidak bisa ditutup.”



Lukisan karya Semsar Siahaan

Beruntung aku bisa membahas pengalaman selama wawancara ini dengan Ibu Saparinah maupun Nana, Ketua Komnas Perempuan yang juga sering menjadi tempatku *curhat* setiap kali aku merasa terpojokkan oleh isu terkait identitasku. Lewat pembahasan tentang pengalaman ini, aku menjadi paham bahwa selama delapan tahun terakhir, sebetulnya aku pun masih dalam tahapan mengolah kepedihan dan rasa trauma yang hadir akibat pengalaman diskriminasi dan peristiwa Mei '98. Karena belum ada pengakuan terbuka oleh negara dan upaya sistemik untuk mengakhiri diskriminasi berbasis etnis, maka proses pengolahan tersebut menjadi terseok-seok. Setiap waktu, bisa saja pengalaman diskriminasi tersebut justru dikuatkan

Berjejak pada pengalaman itulah, aku pun memahami ihwal arti pulih sebagai bukan suatu kondisi statis melainkan suatu proses jatuh bangun yang terjadi bila terdapat

topangan ruang untuk memahami prosesnya. Proses ini tidak bisa diawali dengan pemaksaan untuk melupakan sebuah peristiwa yang menyakitkan, melainkan menatap, mengakui kepedihan yang ditimbulkan, dan mencari tahu alasan peristiwa itu terjadi. Dari titik ini, kita bisa bangkit dan tumbuh, bukan hanya menemukan cara untuk menyembuhkan kepedihan, tetapi juga berkontribusi untuk ikut memastikan bahwa peristiwa serupa tidak akan berulang pada orang lain. Sementara itu, topangan ruang perlu disediakan oleh pihak-pihak lain yang juga berangkat dari pengakuan kepada adanya peristiwa yang menyakitkan itu, memahami proses jatuh bangun yang akan dilalui korban, dan menjadi cara untuk ikut memastikan peristiwa serupa tidak berulang. Tanpa topangan ruang, tidak mungkin ada korban yang dapat menatap kepedihannya untuk memulai proses pemulihan.

Dalam konteks tragedi Mei 1998, proses pemulihan bagi korban dan juga pendamping terhambat karena titik berangkat untuk memulai proses pemulihan korban tidak pernah hadir. Sebaliknya, korban dipaksa bungkam dan masyarakat dibuat sangsi dan kemudian lupa terhadap peristiwa yang mencabik rasa kemanusiaan kita. Akibatnya, kondisi ini hanya menghadirkan damai yang semu selama sepuluh tahun pasca tragedi Mei 1998. Di dalam diri masing-masing korban rasa hampa terus tumbuh karena patah asa akan pernah memperoleh kebenaran dan keadilan. Pada komunitas korban, berakar ketakutan bahwa peristiwa serupa dapat berulang, bukan hanya hadir pada komunitas Tionghoa, dan perempuan pada umumnya. Pada kelompok lain dalam masyarakat terpupuk kekhawatiran bahwa peristiwa serupa dapat menimpa kelompok masyarakat lain.

Dalam kondisi damai yang semu itulah, dengan prinsip tidak melakukan reviktimisasi terhadap korban karena tujuan utamanya adalah justru memantapkan proses pemulihan korban, laporan dokumentasinya itu disampaikan kepa-

da publik dan negara pada 15 Mei 2008. "Saatnya Meneguhkan Rasa Aman," demikian judul yang dipilih oleh Ibu Saparinah dengan pesan agar pemerintah dan masyarakat tidak lagi menuntut kesaksian korban dan segera menghentikan kontroversi ada-tidaknya kekerasan seksual Mei 1998, sebab faktanya korban itu ada. Bila kontroversi dilanjutkan, bukan hanya korban yang terpuruk tetapi juga bagi bangsa Indonesia karena tidak mampu menatap masa lalunya dengan jujur.

Kami memperoleh tanggapan bervariasi terhadap laporan itu. Ada dua pernyataan yang secara khusus perlu disampaikan di sini. Pertama, seorang perempuan Tionghoa yang hadir dalam kegiatan peluncuran laporan berkata bahwa apa yang dilakukan Komnas Perempuan telah menunjukkan bahwa mereka, sebagai perempuan Tionghoa, tidak lagi sendirian dalam menghadapi dampak kerusakan Mei 1998.

Sebelumnya, sebagai perempuan Tionghoa, ia merasa seperti harus bergulat sendiri dengan masalah dan ingatan tentang kekerasan terhadap perempuan dalam kerusakan Mei 1998. Kedua, seorang pendamping secara terpisah mengatakan bahwa penegasan yang disampaikan oleh laporan itu menyebabkan ia mendapat kekuatan baru untuk bangkit dari segenap kepedihan yang timbul dari



*Lukisan dengan media pintu dalam Karya Untuk Kawan, karya Taufan, 2004*

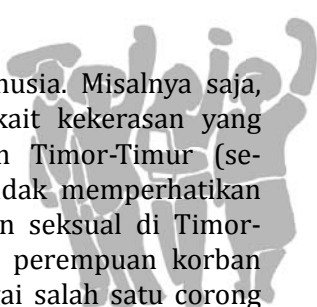
proses pendampingan kasus Mei 1998. Kedua pernyataan tersebut menegaskan kembali arti penting pengakuan yang *genuine* terhadap pengalaman kekerasan bagi proses pemulihan setiap orang yang terkena dampak peristiwa kekerasan.

Selain kedua pernyataan tersebut, Komnas Perempuan mendapat dukungan untuk bersama-sama meneruskan upaya memantapkan pemulihan korban, melawan lupa di tingkat masyarakat terhadap peristiwa itu dan membangun jaminan kejadian serupa tidak berulang di masa depan. Apalagi karena ada pihak-pihak yang masih sangsi, yang belum beranjak dari pemikiran positivistik yang menuntut kehadiran korban di muka publik, dan bahkan bermaksud mempertahankan impunitas pelaku dengan sengaja menguburkan peristiwa itu dari catatan sejarah bangsa Indonesia. Seorang pekerja media yang juga mendukung upaya melawan lupa ini menggambarkan bahwa pekerjaan ini harus dilakukan dengan hati-hati seperti mempersiapkan sebuah perkawinan, katanya:

“Kita memastikan agar api terus menyala untuk menghangatkan makanannya. Api tidak terlalu besar supaya makanan tidak rusak karena terlalu panas, tidak pula padam sehingga makanan dingin dan menjadi basi. Semua kita siapkan, sampai suatu saat nanti pengantin yang kita nanti—dalam hal ini korban—siap dan bersedia masuk ke ruangan dan menyantap hidangan.”



Kondisi serupa penyelesaian kasus kekerasan seksual Mei 1998 yang seperti “damai yang semu”, kebutuhan untuk membangun topangan ruang bagi upaya pemulihan korban, serta kemendesakan upaya melawan lupa sesungguhnya juga berlaku untuk berbagai konteks lain pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan seksual seolah menguap dari wacana penyelesaian kon-



flik dan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya saja, pengadilan hak asasi manusia terkait kekerasan yang dilakukan dalam masa referendum Timor-Timur (sekarang Timor Leste) sama sekali tidak memperhatikan kasus pemerkosaan dan perbudakan seksual di Timor-Timur. Di Aceh, meski pengalaman perempuan korban pemerkosaan yang digunakan sebagai salah satu corong penarik simpati masyarakat nasional dan internasional, pada pasca perjanjian damai Helsinki justru disangkal. Perempuan korban pemerkosaan dianggap bukan prioritas penerima bantuan pasca konflik, bahkan dituntut untuk bisa membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh pernah diperkosa. Di Poso, isu tentang pemerkosaan di tengah penyerangan desa tidak ditanggapi dengan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum padahal isu inilah yang terus-menerus dijadikan isu provokasi penyulut bentrok antar komunitas. Di Ambon, Aceh, dan Poso, kasus eksploitasi seksual oleh aparat keamanan yang memacari perempuan muda yang kemudian hamil dan ditelantarkan belum mendapat perhatian serius dari institusi keamanan.

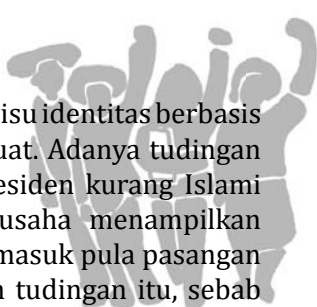
Pendekatan penyelesaian konflik yang ada pun seolah merawat api dalam sekam, damai di permukaan tetapi ada bara yang menyala. Tidak ada penyelesaian konflik yang memulihkan kembali (restorasi) tatanan masyarakat yang koyak akibat konflik. Sebaliknya, prasangka berbasis etnis atau agama yang muncul pada masa konflik dibiarkan hidup. Lihat saja, bagaimana di Ambon dan Poso tata ruang terus dibiarkan terbagi dalam komunitas Islam dan Kristen. Pertemuan kedua komunitas yang digagas oleh pemerintah tidak pernah keluar dari kerangka simbolik sesaat sementara upaya mandiri masyarakat terus-menerus mendapat tentangan. Di Kalimantan Barat, komunitas etnis Madura yang berkonflik dengan penduduk asli (Dayak dan Melayu) tetap tidak boleh berpindah ke wilayah lain selain di ibu kota provinsi dan daerah relokasi. Di Papua, sentimen orang asli versus pendatang terus dipupuk.

Di Aceh, salah satu jawaban untuk penyelesaian konflik adalah pelaksanaan syariah Islam, seolah konflik Aceh adalah tentang pertikaian agama dan bukan persoalan tata kelola sumber daya alam yang justru mendatangkan penindasan di wilayah tersebut.

Bara yang sama dihidupkan oleh praktik tata negara yang berlangsung dalam era otonomi daerah. Sebagai mekanisme demokratisasi Indonesia pasca rezim otoriter Orde Baru, otonomi daerah juga menjadi ruang untuk mengentalkan politisasi identitas. Dalam pemilihan langsung kepala daerah, isu hanya putra asli daerah yang boleh memimpin menjadi panglima. Berbagai daerah tanpa sungkan mengeluarkan kebijakan daerah yang justru melembagakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan terhadap perempuan. Kebijakan ini biasanya didasarkan pada pemahaman tunggal agama mayoritas, yaitu Islam, untuk membangun citra tentang identitas penduduk di wilayah tersebut. Kebijakan ini antara lain mengatur soal kewajiban pakaian Muslim, yaitu jilbab bagi perempuan, baca tulis Alquran sebagai syarat untuk kenaikan pangkat atau bertemu dengan pejabat publik, huruf Arab untuk gedung-gedung publik, pengaturan jam malam dan penggunaan ruang publik, dan juga tentang prostitusi serta alkohol. Kebijakan serupa ini mejadi alat menyeragamkan kelompok mayoritas yang sebetulnya heterogen, dan meminggirkan kelompok minoritas. Belum lagi pembiaran serangan terhadap kelompok tertentu atas nama kemurnian agama dan penghormatan pada agama mayoritas. Di tingkat nasional, pelembagaan diskriminasi serupa dilakukan melalui Undang-Undang Pornografi yang telah menimbulkan tentangan luas; sampai-sampai ada wilayah yang mayoritas penduduknya bukan Islam menuntut untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Bukan mereda, dalam dinamika politik terkini terkait pemilihan umum anggota dewan legislatif (April 2009) dan





pemilihan presiden (Juli 2009), justru isu identitas berbasis agama dan etnis menjadi semakin kuat. Adanya tuduhan bahwa calon presiden dan wakil presiden kurang Islami disikapi dengan terbitan yang berusaha menampilkan wajah Islami calon yang diusung, termasuk pula pasangan hidup masing-masing. Sungguh aneh tuduhan itu, sebab Indonesia bukan negara Islam dan karena itu presiden bukanlah simbol agama. Lebih aneh lagi tanggapannya, karena menunjukkan bahwa elit-elit politik pun oportunistis, bermain dalam politisasi identitas ini tanpa berpikir panjang dampaknya bagi bangunan negara-bangsa Indonesia.

Dalam situasi seperti itu, aku dan sejumlah kawan yang bekerja dengan komunitas menjadi was-was. Krisis kepemimpinan nasional yang ditunjukkan oleh sikap elit politik di atas seperti musim kemarau yang mengeringkan sekam, yaitu masyarakat di tingkat akar rumput. Sekam yang kering gampang terbakar, apalagi dalam impitan ekonomi yang semakin menajam. Karena bara yang dirawat adalah berbasis prasangka etnis dan agama, maka setiap saat potensi konflik ini dapat meledak dan merambat luas.

Dalam situasi ini, membangun topangan ruang untuk pemulihan korban dan melawan lupa saja menjadi tidak cukup. Kami butuh strategi yang lebih ampuh untuk membangun kesadaran politik masyarakat agar tidak termakan politisasi identitas dan agar tidak mengutamakan kekerasan dalam penyelesaian masalah. Tanpa kesadaran ini, maka yang selalu hadir hanya akan berupa damai yang semu dan rapuh. Strategi yang ampuh sampai saat ini masih kami cari. Adapun strategi yang saat ini telah kami susun dan tengah kami cobakan adalah berdasarkan hasil pembelajaran dan silang pengalaman lintas komunitas dan lintas generasi. Setiap dari kami membawa kekuatan, dan setiap kami memperoleh kekuatan dari yang lain. Hanya cara ini yang kami tahu paling manjur untuk proses membangun strategi dan untuk terus membuat mimpi

kami menjadi kenyataan, bahwa suatu saat akan dapat hadir damai yang sejati, yaitu suatu kondisi ketika setiap orang, apa pun latar belakangnya, bisa hidup merdeka, bebas dari rasa takut baik dari ancaman maupun tindak kekerasan dan diskriminasi, serta dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagai manusia yang sederajat dengan manusia lain, tanpa terkecuali.

Dalam kondisi itu, pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan adalah keniscayaan yang diupayakan semua pihak, baik negara maupun masyarakat. Dalam kondisi itu, setiap orang tanpa pamrih akan ikut andil dalam memantapkan rasa kemanusiaan dan damai yang didasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

*Aku yakin ada banyak kawan yang sama-sama merasa mimpi ini cukup untuk menjadi semesta hidup kami. Mimpi ini kami pegang sebagai visi, kami jalani sebagai misi. Mimpi bersama ini kami rawat dan kami tularkan kepada mereka yang bersedia berjuang bersama dan mereka yang akan meneruskan. Sebab kami yakin, suatu hari, mimpi ini akan menjadi.*

Pontianak, 30 Mei 2009



# Mendekap Kebebasan

Feri\* – Aceh

## Aku di Ambang Konflik Aceh

Aku menghirup udara dunia tepat pada 14 Februari 1979, di tengah keluarga desa yang sederhana. Aku memiliki tiga orang adik perempuan dan dua adik laki-laki. Rumahku berbentuk unik karena fondasinya disangga oleh empat batang tiang tinggi terbuat dari pohon kayu hutan yang sudah berusia puluhan tahun. Jika ingin masuk rumah sehabis berpergian, aku harus menaiki anak tangga yang berbentuk bulat dan curam terbuat dari bilah-bilah bambu yang dihaluskan dengan bantuan benda tajam sejenis parang, kemudian dipernis dengan kertas pasir. Kami menyebutnya rumah Aceh (di Indonesia umumnya disebut rumah panggung karena konstruksinya yang ditopang oleh tiang sebagai fondasi).

---

\* Bukan nama sebenarnya.

## Aceh Pasca Konflik Berkepanjangan

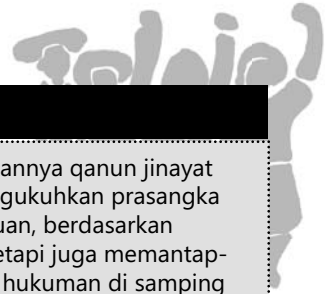
Berdasarkan temuan lapangan dan hasil analisa, Komnas Perempuan berkesimpulan bahwa baik aturan tentang busana maupun larangan khalwat merupakan aturan yang melembagakan diskriminasi terhadap perempuan dan cambuk merupakan bentuk hukuman yang merendahkan kemanusiaan. Dengan demikian, pelaksanaan Syariat Islam membuka peluang terjadinya pelanggaran HAM dan menjadi tantangan berat bagi pemerintah dan masyarakat Aceh pasca konflik yang justru berkeinginan memajukan penegakan HAM. Hal ini disampaikan secara terbuka oleh Pelapor Khusus Komnas Perempuan di hadapan otoritas Aceh dan nasional pada awal 2007. Penyampaian ini merupakan sebuah langkah politik yang berisiko mengingat pada saat itu hampir tidak ada ruang di Aceh untuk mengkritik pelaksanaan Syariat Islam. Mereka yang kritis akan disudutkan dengan tuduhan melawan Islam dan mengingkari keinginan masyarakat Aceh. Bahkan, ada perempuan yang karena melakukan kritik terhadap WH justru diadukan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Langkah Komnas Perempuan, yang memperoleh tanggapan positif dari pimpinan eksekutif dan masyarakat Aceh, menjadi awal terbuka ruang dialog baik di pemerintahan maupun di masyarakat untuk meninjau ulang kebijakan-kebijakan tersebut.



Foto: Ayu

Bagi kelompok perempuan, pelaksanaan Syariat Islam adalah tantangan yang pelik. Pada masa konflik, kelompok-kelompok perempuan dapat duduk bersama dalam forum Dupakat Inong Aceh pertama (tahun 2000) dan bersepakat untuk

membangun langkah-langkah bersama mencapai damai. Situasi berbeda tampak pada 2007 ketika Dupakat Inong Aceh berikutnya digelar. Kelompok-kelompok perempuan itu terbelah dalam menyikapi isu kekerasan terhadap perempuan terkait aturan busana dan larangan khalwat. Isu moralitas dan identitas perempuan Aceh menjadi alasan bagi sebagian perempuan untuk mendukung aturan tersebut. Kepemimpinan gerakan perempuan Aceh saat ini sedang



dipertaruhkan, terutama setelah dikeluarkannya qanun jinayat (hukum pidana). Aturan ini tidak saja mengukuhkan prasangka terhadap masyarakat, khususnya perempuan, berdasarkan pemahaman tunggal tentang moralitas, tetapi juga memantapkan penggunaan cambuk sebagai bentuk hukuman di samping memperkenalkan rajam sebagai bentuk penghukuman baru yang sah di Aceh.

Konflik Aceh berakhir dengan ditandatanganinya MoU Helsinki sebagai pakta damai antara pemerintah RI dan GAM pada 15 Agustus 2005. Patut dicatat bahwa perundingan damai ini tidak mengikutsertakan seorang pun perempuan pembela HAM yang selama ini menyerukan perdamaian. Proses penyelesaian pelanggaran HAM pada masa konflik Aceh masih belum menunjukkan titik terang; baik mekanisme Pengadilan HAM maupun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dijanjikan dalam MoU sampai kini belum terselenggara. Dana reintegrasi yang disediakan pemerintah pusat juga tersendat-sendat dalam pencairannya, dan distribusinya telah menimbulkan ketegangan baru di dalam masyarakat. Sebagian korban belum mendapatkan bantuan. Perempuan korban pemerkosaan dan penyiksaan seksual adalah yang paling sulit untuk mengakses dana tersebut. Korban pemerkosaan dianggap bukan prioritas penerima dana. Persoalan lain terkait dana bantuan adalah kemandirian korban. Selain karena jumlahnya yang terbatas, dana ini juga diberikan tanpa program bimbingan yang memungkinkan korban mengelola dananya dengan tepat. Sebagian besar korban belum dapat mengembangkan kemandirian ekonominya setelah dana bantuan yang mereka terima habis.

Setiap hari ayahku pergi ke pasar untuk berdagang tembakau (digunakan sebagai bahan dasar rokok linting yang pada saat itu dihisap oleh semua laki-laki dan sebagian perempuan berusia lanjut di desaku). Ayahku juga memiliki beberapa petak sawah yang digarap dengan bantuan ibu dan kami, anak-anaknya untuk memenuhi kebutuhan beras yang merupakan makanan pokok keluarga kami sepanjang tahun.

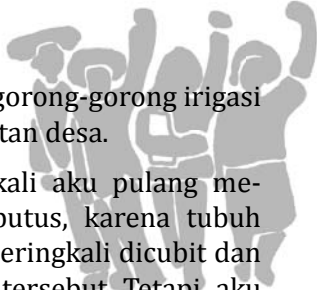


*Kebanyak perempuan Aceh, selain membantu pekerjaan suaminya, juga mengerjakan semua pekerjaan rumah, seperti mengurus anak. Foto: Ayu*

Ibuku seperti kebanyakan perempuan lain di desa, selain membantu pekerjaan ayah sebagai petani juga mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari menyiapkan makanan untuk seluruh anggota keluarga, mencuci pakaian, membersihkan rumah, menjaga adik-adikku yang masih kecil juga membuat kue-kue kering yang dititipkan di warung-warung dekat rumahku. Keuntungan dari usaha dagang kecil-kecilan ini digunakan untuk biaya jajanku di sekolah dan biaya adik-adikku mengaji.

Rumahku terletak di pinggiran bentangan sawah yang berbatasan langsung dengan hutan dan pegunungan. Saat aku masih murid kelas tiga sekolah dasar, setiap pulang sekolah aku dan teman-teman menghabiskan waktu dengan bermain layangan, memanjat pohon sawo yang sedang berbuah ranum kemudian memakannya sebagai rujak dengan ditemani *pliek u<sup>1</sup>* dan daun pepaya muda. Tak ketinggalan aktivitas kebanggaan kami, memancing ikan

<sup>1</sup>Bumbu tradisional Aceh yang diproses dari daging kelapa utuh disimpan dengan tempurungnya dalam suhu tertentu, kemudian dikukus, disarikan minyaknya dan dijemur di terik matahari.



sepat dan gabus di rawa-rawa dekat gorong-gorong irigasi yang langsung berbatasan dengan hutan desa.

Ibuku sangat tidak senang setiap kali aku pulang memancing atau mengejar layangan putus, karena tubuh kami biasanya dekil dan lusuh. Aku seringkali dicubit dan dimarahi ibu karena kedua kegiatan tersebut. Tetapi, aku tidak peduli karena kebahagiaanku adalah melihat ikan hasil memancing menari di dalam baskom plastik yang kuambil dari dapur ibuku atau memandangi layangan putus yang berhasil kami raih.

Semua kegiatan tersebut aku lakukan bersama teman-teman laki-laki dan perempuan. Ibuku seringkali mengatakan bahwa bermain layangan dan memancing adalah mainan anak laki-laki. Anak perempuan harusnya membantu ibu di dapur atau main *talo yeye*<sup>2</sup> saja. Aku tak pernah bertanya kenapa demikian, tapi teman-temanku baik laki-laki atau perempuan tetap berusaha menjadi pelari tercepat untuk mendapatkan layangan putus atau berlomba cepat mencari cacing terbanyak yang akan kami gunakan untuk umpan pancing tanpa membedakan laki-laki dan perempuan.

Anak perempuan seusiaku di desa hanya bersekolah sampai SD atau SMP saja. Dapat dihitung dengan jari, teman-teman perempuanku yang diizinkan orangtuanya melanjutkan sekolah ke bangku SMA. Aku salah satu anak perempuan yang beruntung karena dikaruniai kemampuan yang lebih baik dibanding teman-teman sekelasku di SD dan SMP. Nilai raporku selalu masuk peringkat dua dan tiga di kelas. Prestasiku di sekolah menjadi alasan utama keluarga, terutama ibu membolehkan aku melanjutkan sekolah dengan biaya dari hasil jerih payahnya.

Menjadi murid SMA adalah salah satu ukuran kedewasaan di desaku. Sebagai perempuan dewasa, aku harus mem-

<sup>2</sup>Permainan lompat tali yang terbuat jalinan karet gelang.

bantu ibu mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga membantunya mencari uang untuk kebutuhan keluarga.

Waktu itu aku mulai berpikir, kenapa ibu yang harus bekerja untuk membiayai sekolahku. Nafkah keluarga dan anak harusnya ditanggung laki-laki. Guru ngajiku sering bercerita bahwa ayah adalah pemimpin keluarga, tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan seluruh keluarga dari hasil pekerjaannya di luar rumah. Sedangkan ibu bertugas melayani suami, menyiapkan makanan untuk seluruh keluarga, menjaga anak dan mengurus pekerjaan rumah tangga lainnya.

Ternyata aku melihat ibu juga mencari uang untuk biaya sekolahku dan belanja kebutuhan sehari-hari. Ibu juga mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Bahkan, ketika ibu melahirkan adik perempuanku yang bungsu, ibu sudah bekerja di dapur setelah dua puluh hari melahirkan. Dalam tradisi masyarakat Aceh, perempuan yang baru melahirkan diharuskan beristirahat dari semua kegiatan rumah tangga (termasuk melakukan hubungan suami-istri) selama empat puluh empat hari untuk pemulihan kondisi tubuh. Pada masa ini suami diwajibkan memenuhi semua kebutuhan istrinya, baik pangan, kasih sayang maupun kenyamanan.

### **Dari Sini Konflik Batinku Bermula**

Pada 1997, aku tamat SMA dan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi agar dapat bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Aku tidak ingin seperti ibu yang pontang-panting mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga, juga mencari nafkah dengan hasil yang tidak seberapa.

Ayah tidak setuju dengan keinginanku. Menurut dia, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena kemudian tetap saja akan menikah dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Belajar mencuci, memasak dan membersihkan rumah tidak perlu di perguruan tinggi.





*REFERENDUM ACEH. Sekitar satu juta orang masyarakat Aceh menghadiri "Sidang Umum Masyarakat Pejuang Referendum: SU MPR" di halaman Masjid Baiturrahman Banda Aceh, Senin (8/11). Acara ini antara lain ditandai dengan penaikan bendera referendum. Foto: ANTARA.*

Usaha ibu yang tidak kenal menyerah membuatku dapat melangkahkan kaki ke Banda Aceh, tempat Universitas Syiah Kuala (Unsyiah)<sup>3</sup> berada. Ibu mengizinkan aku ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri dengan uang dari hasil menjual perhiasan terakhir yang dimilikinya tanpa sepengetahuan ayah.

Suasana kota Banda Aceh dan rutinitas kuliah di tahun pertama membuatku benar-benar tenggelam pada impian masa kecil. Ingin menjadi orang sukses, mempunyai penghasilan sendiri dan dapat membantu meringankan beban ibu. Tahun kedua aku mulai merasa biaya kuliah dan biaya hidup di Banda Aceh menjadi semakin berat karena ibu semakin jarang mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan bulananku sebagai anak kos.

<sup>3</sup>Universitas kebanggaan masyarakat Aceh.

Suatu siang menjelang akhir 1998 (tahun kedua kuliahku), ketika aku keluar dari pintu gerbang Fakultas Ekonomi, aku melihat serombongan mahasiswa sedang berdemonstrasi di sepanjang jalan menuju kampus Unsyiah. Mereka menuntut Soeharto<sup>4</sup> turun dari takhta kepresidenan. Sejak itu suasana kampus selalu diwarnai demonstrasi mahasiswa, bahkan aksi serupa meluas sampai keluar kampus dengan berbagai tuntutan:

- Cabut status daerah operasi militer Aceh<sup>5</sup>
- Hentikan dan usut pelanggaran hak asasi manusia selama pelaksanaan operasi militer
- Demiliterisasi kampus dan pemerintahan
- Bagi hasil migas yang lebih adil untuk Aceh<sup>6</sup>

Seluruh mahasiswa terlibat dalam aksi-aksi yang diadakan di kampus dan di luar kampus. Laki-laki dan perempuan ikut melebur dalam solidaritas untuk mendukung penyelamatan Aceh dari rongrongan militerisme yang menebar kekerasan di seluruh Aceh.

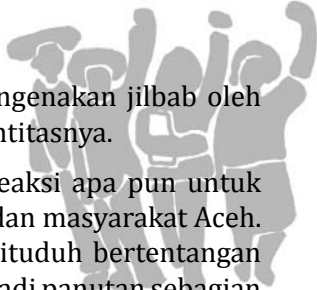
Menjelang 1999 muncul selebaran dan maklumat yang mewajibkan mahasiswi mengenakan jilbab (penutup kepala perempuan yang terbuat dari kain lebar menutupi sampai dada) dan pakaian Muslim sebagai pakaian sehari-hari perempuan Aceh. Selebaran tersebut ditempel di dinding-dinding kampus, di pintu pagar kampus dan jalan menuju kampus. Pada akhirnya meskipun berat, seluruh mahasiswi tetap harus mengenakan jilbab karena takut dengan *sweeping* dan intimidasi yang kerap terjadi di jalan

---

<sup>4</sup>Soeharto adalah presiden kedua Republik Indonesia yang menjabat hampir 30 tahun dan menjalankan sistem kepemimpinan otoriter.

<sup>5</sup>Pemerintah memberlakukan operasi militer di Aceh dengan sandi "Jaring Merah" untuk menumpas gerakan Aceh Merdeka yang pada waktu itu dianggap sebagai gerakan separatis yang mengacaukan stabilitas keamanan negara Indonesia. Operasi Jaring Merah diterapkan di Aceh selama sepuluh tahun sebelum dicabut dengan resmi pada 1998.

<sup>6</sup>Aceh merupakan daerah penghasil minyak dan gas bumi yang menyumbang devisa cukup banyak untuk negara.



terhadap perempuan yang tidak mengenakan jilbab oleh pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya.

Pihak kampus tidak menunjukkan reaksi apa pun untuk menyikapi isu jilbabisasi mahasiswi dan masyarakat Aceh. Di satu sisi mereka tidak bersedia dituduh bertentangan dengan syariah Islam yang telah menjadi panutan sebagian besar masyarakat. Di sisi lain juga karena ketidakberdayaan kampus menghadapi kondisi Aceh yang semakin tidak menentu. Masyarakat Aceh semakin sering melihat patroli Brimob<sup>7</sup> dan tentara di jalan-jalan umum.

Awal 1999, aku mendaftar sebagai relawan Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR-PMI Unsyiah). Aku terpanggil ikut serta membantu masyarakat yang menjadi korban operasi militer melalui lembaga kemanusiaan. Ini menjadi awal langkahku bergelut dengan organisasi kemasyarakatan.

Aku mengawalinya sebagai relawan di posko kemanusiaan yang dibentuk oleh mahasiswa Unsyiah dan IAIN Ar-raniry pada 1999. Poskonya terletak di Desa Pusong Baru, Lhokseumawe. Relawan di posko tersebut melakukan aksi kemanusiaan untuk korban kekerasan yang disekap dan disiksa karena dituduh memiliki hubungan dengan gerakan pengacau keamanan (GPK) oleh pasukan gabungan TNI dan Brimob di kantor KNPI Lhokseumawe.

Aku pun mulai belajar mengenai dampak konflik terhadap perempuan dan anak-anak. Aku melihat bahwa korban paling banyak, dari peristiwa penghadangan yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap masyarakat yang melakukan demonstrasi untuk menuntut pembebasan anggota keluarganya yang ditahan di gedung KNPI, adalah perempuan dan anak-anak.

---

<sup>7</sup>Pasukan khusus dari kepolisian, pada saat polisi masih menyatu dengan institusi militer di Indonesia, saat ini kepolisian sudah dipisahkan dari institusi militer menjadi institusi keamanan sipil yang berdiri sendiri.

Pada saat demonstrasi terjadi, perempuan dan anak-anak dikondisikan agar berada di barisan paling depan sehingga ketika pasukan TNI dan Brimob menghadang demonstran dengan tembakan, perempuan dan anak-anak harus berlarian untuk menghindari dari peluru. Banyak dari mereka yang terluka karena terjatuh, terinjak-injak bahkan terkena serpihan peluru.

Kekerasan terhadap masyarakat terjadi hampir di seluruh Aceh dengan berbagai bentuk selama kurun waktu 1999-2001. Aparat keamanan dapat saja melakukan tindakan kekerasan (intimidasi, penangkapan sewenang-wenang bahkan pembunuhan) jika seseorang dicurigai sebagai anggota GAM<sup>8</sup> atau memiliki hubungan dengan personil GAM. Memiliki hubungan dengan GAM bisa berarti anggota keluarganya, teman-temannya, pernah dimintai bantuan oleh personil GAM, maupun tidak mau/tidak dapat memberikan keterangan tentang keberadaan anggota GAM.

### **Memilih dalam Rasa Takut...**

Pengalaman membantu korban kekerasan dengan keahlian yang kudapat dari KSR-PMI membuat jiwaku terpanggil untuk melakukan kegiatan yang lebih bermakna bagi masyarakat. Aku bergabung dengan organisasi kemanusiaan yang beranggotakan mahasiswa untuk membantu kegiatan divisi perempuan dan anak melakukan aktivitas di kamp-kamp pengungsian dalam Kabupaten Pidie, Bireuen, Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Pengalaman paling membanggakan aku rasakan ketika harus tinggal selama dua bulan di kamp pengungsian dalam wilayah Kecamatan Samalanga, Bireuen. Kamp tersebut merupakan gedung sekolah dasar yang terletak di Desa Ie rhob. Di tempat ini aku belajar mengelola kamp IDPs (Internally Displaced Persons), mengusahakan ban-

<sup>8</sup>Istilah GAM (Gerakan Aceh Merdeka) populer sesudah DOM dicabut pada 1998.



*Di Aceh perempuan tidak ketinggalan menjadi anggota kelompok bersenjata. Foto: TEMPO.*

tuan kemanusiaan dan pengelolaannya, mendampingi anak-anak beraktivitas dan berdiskusi dengan penghuni kamp mengenai masalah-masalah yang terjadi setiap hari. Kegiatan yang paling aku senangi adalah membantu kegiatan dapur umum, menjaga posko, mendampingi anak-anak mandi di saluran irigasi pada sore hari dan membantu mereka berbaris rapih menunggu giliran pembagian makanan tambahan yang disiapkan oleh teman-teman dari divisi kesehatan.

Aku merasa benar-benar masuk ke kehidupan IDPs dengan segala persoalannya, mereka memilih meninggalkan rumah, hewan ternak, kebun dan ladang untuk mengungsi. Penyebab mereka mengungsi bukan hanya peristiwa kontak senjata yang terjadi antara GAM dan TNI di sekitar desa tempat tinggal mereka, tapi juga karena intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin mendapatkan keuntungan dari konflik Aceh.

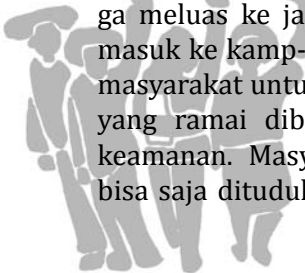
Dari cerita mereka, aku mengetahui bahwa mereka juga dipaksa untuk meninggalkan desa, agar dunia internasional

mengetahui bahwa aksi TNI menumpas Gerakan Aceh Merdeka menyebabkan jatuh korban dari pihak masyarakat yang tak berdosa.

Anak-anak dan perempuan di kamp pengungsian harus tidur berdesak-desakan dalam satu ruangan kamp yang hanya beralas tikar atau plastik tanpa selimut. Sebagian yang lain bahkan harus tidur di udara terbuka karena ruangan yang tersedia tidak cukup untuk menampung seluruh pengungsi. Dalam kondisi seperti itu penyakit sangat mudah menyebar karena semua peralatan digunakan bersama-sama, akses terhadap air bersih tidak memadai, kebutuhan spesifik perempuan sama sekali tidak mendapat perhatian dari pengelola posko. Ibu-ibu yang memiliki bayi, ibu hamil atau perempuan yang terpaksa melahirkan di kamp, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan memadai. Kebutuhan nutrisi mereka tidak terpenuhi karena keterbatasan bantuan dan tidak sensitifnya pengelola posko terhadap kebutuhan spesifik perempuan.

Aku seringkali mendengar keluhan perempuan dan anak-anak yang sudah bosan dengan kondisi kamp. Mereka ingin segera kembali ke rumahnya dan menikmati hidup normal dengan keluarga di desanya. Namun, konflik yang tak kunjung reda memaksa mereka untuk puas dengan kondisi kamp yang serba terbatas.

*Sweeping* yang dilakukan oleh TNI dan pasukan gabungan untuk mencari anggota GAM dilakukan bukan hanya di hutan-hutan yang dicurigai sebagai markas GAM, tapi juga meluas ke jalan raya, pemukiman penduduk bahkan masuk ke kamp-kamp pengungsian. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk tetap tinggal di kamp dalam komunitas yang ramai dibanding pulang ke desa tanpa jaminan keamanan. Masyarakat yang tidak bersedia mengungsi bisa saja dituduh memberikan dukungan logistik kepada





GAM atau tidak mendukung kerja-kerja penumpasan GAM yang dilakukan oleh TNI.

Aku mulai mengenal masalah-masalah khusus yang dihadapi perempuan dan anak-anak dalam situasi darurat, terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi, trauma dan keterbatasan anak mendapatkan hak untuk bermain, pendidikan juga tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang layak.

Hari demi hari berada di kamp IDPs (Internally Displaced Persons/Pengungsi Internal) membuat kebanggaan terhadap diriku terus tumbuh. Pada saat itu di kamp tempatku bekerja hanya ada dua perempuan relawan yang bersedia tinggal bersama pengungsi untuk jangka waktu lama. Dalam struktur organisasiku yang bekerja hampir di seluruh Aceh bahkan hanya ada empat orang perempuan.

Waktu itu aku menganggap wajar jika kerja-kerja pengorganisasian masyarakat korban dengan pendekatan *live in* dianggap wilayah kerja laki-laki. Perempuan tidak layak melakukannya karena stereotip memiliki fisik yang lemah dan pelayan rumah tangga. Jika pun dilibatkan dalam kegiatan organisasi hanya untuk menambah jumlah anggota organisasi atau karena tuntutan kondisi, karena perempuan IDPs tidak bersedia mengungkapkan masalahnya kepada laki-laki relawan.

Perkenalanku dengan organisasi untuk pemberdayaan perempuan sekitar 2001 membuka cakrawala berpikirkku. Diskriminasi terhadap perempuan ternyata dibiasakan, bahkan dihidupkan dalam tradisi-tradisi di hampir semua budaya masyarakat. Dalam kondisi masyarakat Aceh yang sekian lama hidup dalam fanatisme Islam, agama dijadikan alasan pembenaran untuk membatasi ruang gerak perempuan.

Tuntutan keadilan masyarakat Aceh atas pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) pada 1999-2001 ditanggapi

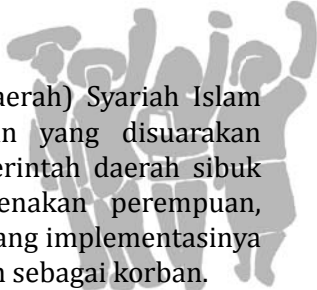


*RAZIA JILBAB. Seorang anggota Polwan Polres Aceh Besar tampak sedang memakaikan jilbab kepada salah seorang perempuan dalam suatu "razia" jilbab di daerah itu, Jumat (9/6). Polda Aceh telah menyediakan sebanyak 500 helai jilbab untuk diberikan kepada kaum wanita yang terjaring dalam "operasi" jilbab. Razia itu sebagai salah satu bentuk nyata "Operasi Cinta Meunasah" guna menyongsong pemberlakuan syariat Islam di Aceh. Foto: ANTARA.*

oleh pemerintah dengan memberlakukan kebijakan syariah Islam. Kebijakan syariah Islam diberlakukan pada 2002 dengan alasan menggali potensi keistimewaan Aceh dalam bentuk adat-istiadat, kebudayaan dan tradisi religius.

Kebijakan khusus ini membuatku sebagai perempuan Aceh merasa hidup seperti tawanan yang menumpang di negeri orang. Aku terpaksa mengenakan jilbab sebagai pelengkap pakaianku sehari-hari. Aku memakai jilbab karena takut terhadap *sweeping* yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (saat itu dikenal juga sebagai polisi syariah) dan oknum masyarakat yang merasa memiliki kuasa untuk menghukum perempuan yang tidak mengenakan pakaian Muslim.





Pemberlakuan *Qanun* (Peraturan Daerah) Syariah Islam menenggelamkan tuntutan keadilan yang disuarakan korban DOM. Masyarakat dan pemerintah daerah sibuk mempersoalkan busana yang dikenakan perempuan, sibuk membuat qanun-qanun baru yang implementasinya cenderung menempatkan perempuan sebagai korban.

Aku menjadi saksi atas tekanan-tekanan yang dialami oleh teman-teman perempuan sebagai dampak dari pemberlakuan syariah Islam Aceh. Suatu sore tetanggaku pulang dengan muka merah karena malu setelah celana jins yang dikenakannya dipotong paksa dalam *sweeping* busana Muslim di jalanan umum. Teman-teman kosku mengeluh tidak dapat masuk dan beribadah di mesjid raya jika mengenakan celana panjang. Aku yang senang nongkrong di warung kopi menjadi tidak nyaman dengan tatapan melecehkan dari orang-orang, karena warung kopi adalah ruang publik untuk laki-laki.

Aku semakin sering mengikuti kajian yang diadakan oleh lembaga perempuan, tapi belum berani terang-terangan menyampaikan pendapat dan keberpihakanku terhadap kondisi ketertindasan perempuan. Aku takut dianggap anti-Islam, takut keluargaku malu karena anak perempuannya berbeda dari perempuan kebanyakan, takut karena aktivis perempuan dianggap menyebarkan ajaran Yahudi, takut karena feminis selalu diidentikkan dengan gaya hidup di Barat yang dianggap melegalkan gaya hidup bebas dan berbagai ketakutan lain yang membuatku selalu minder mengakui pilihanku untuk mendukung perjuangan mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki.

Aku melihat diskriminasi terhadap perempuan terjadi bukan hanya di rumah tangga, tapi juga di warung kopi, di mesjid, di tempat kerja, baik dalam keadaan damai maupun konflik.

## Menguatkan Kepercayaan Diri...

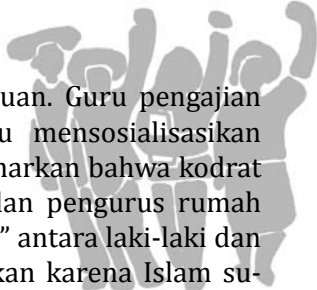
Ketakutan akan realitas penolakan masyarakat terhadap gerakan pembebasan perempuan tidak menyurutkan langkahku untuk tetap berjuang mewujudkan dunia yang lebih adil. Aku bergabung dengan salah satu lembaga yang bekerja untuk pengorganisasian perempuan korban konflik pada 2002.

Aku mulai berani menyuarakan pilihanku dalam setiap diskusi yang diikuti. Di luar lembaga tempatku bekerja situasinya sangat berbeda. Masyarakat dan aktivis OMS<sup>9</sup> yang tidak bekerja untuk isu perempuan tetap saja berpandangan bahwa aktivis perempuan dan lembaga yang bekerja untuk isu perempuan salah kaprah karena mengabaikan kebutuhan masyarakat Aceh yang sedang berada dalam situasi konflik bersenjata setelah pemerintah memberlakukan darurat militer pada 1 Mei 2003.

Setiap kali menghadiri pertemuan yang dibuat oleh OMS yang tidak bekerja untuk isu perempuan, aku seringkali harus mendengar berbagai pelecehan yang membuat merah telinga. Mereka menuding perempuan aktivis dan lembaga pemberdayaan perempuan eksklusif, tidak menyentuh realitas kebutuhan masyarakat korban konflik dan tidak memiliki komitmen pembelaan terhadap masyarakat korban hanya karena tidak menyuarakan antimiliterisme sebagai isu utama lembaga. Perempuan aktivis juga dianggap membenci laki-laki, melanggar kodrat dan menolak pernikahan.

Lingkunganku ingin meyakinkan, bahwa perjuangan kesetaraan perempuan dan laki-laki tidak penting di Aceh. Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Aceh sudah menggariskan bahwa kodrat perempuan mengurus ranah domestik dan laki-laki sebagai pencari nafkah keluarga sewajarnya beraktivitas di ranah publik. Ayat-ayat Al-Qur'an seringkali diinterpretasikan sepihak untuk membenaran

<sup>9</sup>Singkatan dari Organisasi Masyarakat Sipil.



dilakukan diskriminasi atas perempuan. Guru pengajian desa dan ulama konservatif selalu mensosialisasikan hadis-hadis misoginis untuk membenarkan bahwa kodrat perempuan adalah pelayan suami dan pengurus rumah tangga. Relasi "melayani dan dilayani" antara laki-laki dan perempuan tidak penting dipersoalkan karena Islam sudah menggariskan bahwa laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan.

Pertemuanku dengan Ciciek Farha<sup>10</sup> pada 2002 memberikan gambaran berbeda tentang bagaimana sebenarnya Islam menghormati perempuan. Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya sangat memuliakan istri dan anak perempuannya. Istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Khadijah adalah seorang pedagang sukses dan kaya raya. Anak nabi yang bernama Fatimah adalah perempuan ulama pada zamannya. Dari Mba Ciciek juga aku mengetahui tentang buku-buku karya feminis ulama dari Timur Tengah, seperti Fatimah Mernissi, Aminah Wadood dan Rifaat Hasan yang menjadi rujukan perempuan aktivis di negara-negara Islam.

Satu demi satu ketakutan yang mencengkram jiwa berkurang. Aku semakin yakin bahwa pilihanku tidak aneh. Banyak orang lain di berbagai belahan dunia sudah memilih jalan serupa dan aku tidak perlu berhenti hanya karena lingkungan belum memberi dukungan.

## **Aku dan Darurat Militer**

Aktivitas militer semakin terbuka untuk menumpas GAM (termasuk masyarakat yang memberi dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Aceh) di bawah payung hukum darurat militer dan darurat sipil.<sup>11</sup> Teman-teman aktivis

<sup>10</sup>Perempuan aktivis yang pada waktu itu memperkenalkan dirinya bekerja di lembaga Rifka Annisa, dalam perjalanan berikut aku mengetahui bahwa beliau juga ikut mendirikan lembaga perhimpunan pesantren Indonesia dan Puan Amal Hayati.

<sup>11</sup>Dua puluh bulan lamanya masyarakat Aceh hidup dalam bayang-

merasa keberadaannya di Aceh terancam karena penguasa darurat militer menerbitkan daftar nama orang-orang yang dituduh memberi dukungan terhadap perjuangan GAM untuk memisahkan Aceh dari NKRI<sup>12</sup> (sebagian besar aktivis OMS yang menyuarakan antimiliterisme, tolak darurat militer dan adili pelaku pelanggaran hak asasi manusia masuk daftar tersebut) .

Aku memilih tetap berada di Aceh melakukan apa yang dapat dilakukan, meskipun teman-teman aktivis sudah mulai memilih keluar dari Aceh karena situasi semakin tertutup dan tegang. Evakuasi aktivis kemudian menjadi perhatian masif OMS di luar Aceh (terutama Jakarta). Di tengah deraan rasa takut aku mengambil peran dalam proses evakuasi aktivis. Pilihan evakuasi aku fokuskan kepada teman laki-laki yang sering melecehkan aktivis dan lembaga perempuan. Aku ingin membuktikan bahwa dalam kondisi darurat dan tertekan, perempuan tetap dapat bekerja dan memiliki keberpihakan yang jelas untuk mendukung dan menyelamatkan gerakan masyarakat sipil Aceh.

Pilihanku justru mendapat tentangan dari teman-teman perempuan yang lebih senior. Pilihanku dianggap membahayakan lembaga tempat aku bekerja. Menurut pandangan mereka laki-laki aktivis memang memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan. Aku dianggap tidak memiliki jaringan di luar Aceh untuk pelaksanaan evakuasi dan disarankan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tersebut karena sudah banyak orang lain yang melakukannya.

Pada akhirnya aku tetap bangga karena pilihanku untuk terlibat dalam kegiatan evakuasi memberikan pengaruh

---

bayang ketakutan akibat darurat militer yang dideklarasikan sejak 1 Mei 2003 - 18 Mei 2004, kemudian menjadi darurat sipil pada 19 Mei 2004 dan berakhir dengan perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan GAM dengan ditandatanganinya perjanjian Helsinki pada 15 Agustus 2005.

<sup>12</sup>Negara Kesatuan Republik Indonesia.



*HUKUM CAMBUK. Seorang wanita Takengon, Aceh Tengah sedang menjalani hukuman cambuk di depan Pendopo Bupati Aceh Tengah, Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Jumat (19/8). Sebanyak empat wanita menjalani hukuman cambuk, akibat tertangkap main judi dikediaman mereka pada 12 juni 2003 lalu dan mereka dijerat dengan pasal 5 jo pasal 23 ayat 1, qanun propinsi NAD, no 13 2003. Foto: ANTARA.*

positif. Kepercayaan diri dan keyakinanmu meningkat untuk terus mempertahankan kesadaran bahwa potensi yang dimiliki perempuan dan laki-laki secara sosial tidak berbeda. Aku perempuan dan salah seorang yang mampu bertahan dalam kondisi perang Aceh yang penuh kekerasan, intimidasi, pembatasan akses informasi, ekonomi masyarakat terpuruk dan kebebasan ekspresi dibungkam. Aku juga berperan dalam penyelamatan aktivis gerakan sipil Aceh. Aku berhasil melakukan evakuasi aktivis dari awal pemberlakuan darurat militer sampai dengan pemberlakuan darurat sipil, dan tak pernah meninggalkan Aceh kecuali untuk masalah evakuasi. Dampaknya aku dipilih menjadi salah satu anggota dewan pengurus jaringan OMS Aceh yang beranggotakan lembaga-lembaga dengan berbagai fokus isu.

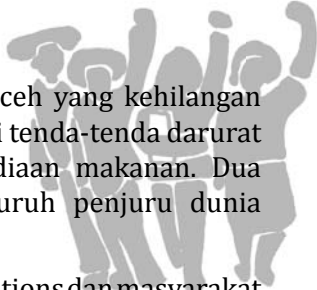
## Acehku Diterjang Tsunami!

Pada 25 Desember 2004, sehari sebelum tsunami meluluhlantakkan pesisir Aceh, aku sedang berada di Medan, Sumatera Utara, untuk mengikuti *workshop* dokumentasi pelanggaran hak asasi manusia selama pemberlakuan darurat militer Aceh. Aku memutuskan pergi dari Medan melalui jalur darat karena berkeinginan singgah di kampung halamanku.

Sekitar pukul 9.30 pagi pada 26 Desember 2004, masyarakat desaku berlarian ke luar rumah karena getaran gempa bumi sangat kuat mengguncang dinding-dinding rumah mereka. Mereka yang berlarian keluar rumah terlihat panik dan anak-anak menangis. Aku mengingatingat kapan terakhir pernah merasakan gempa sekuat ini. Aku mendengar ada yang berteriak "kiamat sudah datang". Aku justru teringat berita televisi yang pernah kutonton tentang gempa berpotensi tsunami yang terjadi di Jepang. Gempa yang digambarkan di stasiun televisi tersebut tidak sekuat guncangan gempa yang terjadi pada hari itu.

Sore hari, aku mendengar kerusakan yang terjadi di pesisir Aceh Utara disebabkan gelombang besar yang terjadi setelah gempa. Tidak terpikir yang terjadi adalah kerusakan mahadahsyat dalam sejarah manusia modern. Pukul 8 pagi tanggal 27 Desember aku berangkat dari kampung halamanku menuju Banda Aceh dengan menumpang minibus L-300. Ketika melewati lokasi pantai di daerah Samalanga dan Pante Raja, aku melihat sejumlah orang sedang mengumpulkan bantuan untuk pengungsi korban sapuan ombak besar setelah gempa 26 Desember. Sepanjang jalan aku melihat orang-orang menaiki mobil bak terbuka pergi meninggalkan Banda Aceh.

Di Banda Aceh, kondisi porak-poranda akibat tsunami terlihat sampai radius lima kilometer dari pantai. Gempa berkekuatan 8,9 skala Richter diikuti gelombang tsunami menyapu semua tanda kehidupan yang dilaluinya. Sebanyak



466.807<sup>13</sup> orang lebih masyarakat Aceh yang kehilangan tempat tinggal terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat tanpa listrik, air bersih dan persediaan makanan. Dua pekan kemudian bantuan dari seluruh penjuru dunia datang ke Aceh.

NGO internasional, lembaga United Nations dan masyarakat internasional berusaha menyediakan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk bantuan khusus untuk perempuan dan anak-anak seperti paket bantuan kesehatan reproduksi, paket ibu melahirkan dan menyusui, makanan untuk ibu hamil dan perempuan manula. Sebagian besar lembaga yang datang ke Aceh pasca tsunami memiliki bantuan khusus untuk perempuan, tapi sedikit sekali yang melakukan advokasi agar perempuan terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah BRR NAD-Nias<sup>14</sup> dibentuk. Perempuan tetap saja menjadi penghuni kamp, membantu menyiapkan makanan untuk pengungsi di dapur umum dan melayani keluarga yang tersisa. Fungsi yang dijalankan perempuan pasca tsunami tetap fungsi domestik.

## **Damai Menghampiri Aceh**

Tanggal 15 Agustus 2005 menjadi tanggal yang bersejarah bagi masyarakat Aceh. Pada tanggal tersebut MoU Helsinki ditandatangani oleh wakil pemerintah Indonesia dan wakil GAM di Helsinki, ibu kota Finlandia. MoU Helsinki menjadi lembaran baru dalam sejarah damai dan rekonsiliasi Aceh. Bencana tsunami menjadi titik tolak perundingan damai dilakukan kembali setelah COHA<sup>15</sup> ambruk selama hampir dua puluh bulan.

<sup>13</sup>Data Departemen Sosial Republik Indonesia per 18 Februari 2005.

<sup>14</sup>Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias, badan bentukan pemerintah untuk membangun kembali Aceh dan Nias (daerah kepulauan di bagian barat Pulau Sumatera) pasca tsunami.

<sup>15</sup>Cessation of Hostilities Agreement, perjanjian penghentian permusuhan antara pemerintah Indonesia dan GAM yang difasilitasi oleh Henry Dunant Center.

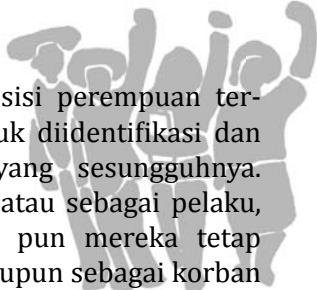
Di lapangan, damai yang terlihat adalah tidak ada lagi kontak senjata, intimidasi terhadap masyarakat menurun tapi tidak benar-benar hilang, senjata GAM dikumpulkan kemudian dimusnahkan di lapangan terbuka oleh AMM (Aceh Monitoring Mission yang beranggotakan negara-negara Uni Eropa), TNI ditarik dari daerah basis konflik dan aktivitas kemasyarakatan bergerak pelan-pelan ke arah normal karena kondisi keamanan membaik.

Proses damai yang didahului dengan perundingan oleh perwakilan pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki tidak melibatkan masyarakat korban sebagai bagian dari konflik Aceh. Proses perundingan sampai dengan ditandatanganinya MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 berlangsung selama lima kali pertemuan dengan keterlibatan sangat minim dari pelaku di tingkat lapangan. GAM diwakili oleh empat orang perunding yang bertempat tinggal di luar negeri dan hanya satu orang perunding yang bertempat tinggal di Aceh.

Aspirasi perempuan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku konflik (GAM memiliki sayap bersenjata khusus perempuan yang diberi nama "pasukan Inoeng Balee")<sup>16</sup> tidak termuat dalam poin-poin kesepakatan MoU. Tidak ada perwakilan perempuan yang terlibat dalam proses perundingan tersebut, baik secara kuantitas maupun kualitas (keberpihakan dari para perunding terhadap perempuan baik sebagai korban langsung maupun korban tidak langsung). Tidak satu pasal pun dalam klausul perjanjian damai yang menegaskan bahwa "perempuan dan anak harus dilindungi, tidak dijadikan sebagai objek kekerasan."

<sup>16</sup>Perempuan-perempuan tersebut direkrut dari masyarakat korban, mereka bergabung dengan pasukan Inoeng Balee baik karena dendam terhadap TNI (pernah melihat kekejaman TNI terhadap keluarga dan dirinya), keinginan sendiri untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh, maupun karena memiliki hubungan keluarga dengan anggota GAM.





Dalam perputaran konflik Aceh, posisi perempuan terbawa tetapi tersamar dan sulit untuk diidentifikasi dan diperlakukan menurut identitas yang sesungguhnya. Apakah perempuan sebagai korban atau sebagai pelaku, karena sebenarnya sebagai pelaku pun mereka tetap menjadi pihak yang dikorbankan, ataupun sebagai korban mereka dipinggirkan dan diabaikan karena mereka adalah keluarga pelaku.

Konflik Aceh, menempatkan perempuan pada posisi-posisi penting berikut:

### **1. Menjadi Alat Penakluk (Penundukan) Lawan**

*“Saya dijemput pada suatu malam, dan dibawa ke pos. Di sana saya dipaksa mengatakan di mana suami saya. Ketika saya menyatakan tidak tahu, mereka menyiksa saya dengan menelanjangi, dan memasukkan popor senjata ke vagina saya, dan mengurung saya beberapa hari. Setiap hari saya dibawa dengan kendaraan untuk mencari suami saya. Mungkin karena mendengar apa yang saya alami, akhirnya suami saya menyerah, dan dia dibunuh. Karena suami saya menyerah, dia tidak dianggap lagi sebagai eks kombatan, dan saya tidak mendapatkan perhatian setelah perdamaian. Suami saya dianggap sebagai pengkhianat, karena dia menyerah.”*  
(Pernyataan seorang korban)

### **2. Sebagai Alat Teror**

*“Saya dan Bdiikat digawang bola karena dituduh memberi makan GAM, dan masyarakat diminta menyaksikan kami, dengan mengatakan, siapa yang berani melakukan hal sama akan mengalami nasib seperti kami. Kemudian kami dibawa ke pos untuk menjadi tukang masak, kami sering mengalami “kekerasan” di sana.”* (Penuturan seorang korban)

### **3. Sebagai Tameng**

*“Kami yang perempuan dan anak-anak diminta tidur*

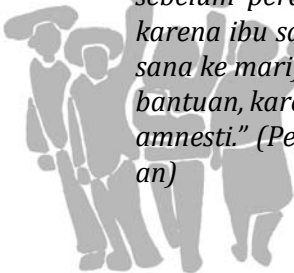


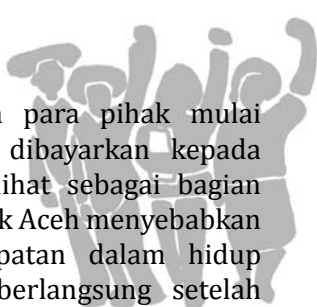
*Aceh mencanangkan Piagam Hak-Hak Perempuan yang menjamin dihormatinya hak-hak perempuan di Tanah Rencong itu. Foto: Ayu.*

*di tenda di seputar mesjid, laki-laki tidur di dalam mesjid. Jika ada sweeping atau penyerangan ke camp, kami diminta berbaris di pintu masuk agar TNI tidak menyerang, tapi kenyataannya kami tetap ditembak.” (Pernyataan seorang perempuan pengungsi)*

#### **4. Sebagai Pelaku**

*“Saya bergabung dengan GAM dan mengikuti latihan di gunung, karena saya ingin membalas dendam. Ayah dan abang saya dibunuh. Saya ikut berperang waktu itu, dan sempat disiksa, diadili dan dipenjara. Saya menghabiskan masa hukuman saya pada pertengahan tahun 2005, sebelum perdamaian Helsinki ditandatangani. Itu pun karena ibu saya membayar uang (dengan meminjam ke sana ke mari) agar saya bebas. Saya tidak mendapatkan bantuan, karena saya bukan tahanan yang mendapatkan amnesti.” (Pernyataan seorang perempuan eks kombatan)*





Ketika menjelang perdamaian dan para pihak mulai menghitung kerugian yang harus dibayarkan kepada korban, perempuan tetap tidak dilihat sebagai bagian penting untuk diperhitungkan. Konflik Aceh menyebabkan perempuan mengorbankan kesempatan dalam hidup mereka. Proses reintegrasi yang berlangsung setelah “damai” pun tetap meminggirkan perempuan karena perempuan dianggap bukan pelaku ataupun konseptor konflik. Perempuan hanya pihak yang dimanfaatkan untuk memudahkan pelaksanaan kepentingan para pihak yang berkonflik.

Mekanisme dan proses pendataan korban yang dibuat oleh BRA menyebabkan perempuan korban (terutama korban kekerasan seksual) sulit mendapatkan haknya. Ada sejumlah pembuktian yang harus dipenuhi agar mereka dimasukkan ke sistem pendataan korban konflik dan layak mendapat bantuan reintegrasi (misalnya dapat menunjukkan cacat fisik dan lampiran surat keterangan dari kepala desa). Proses pendataan di lapangan bahkan dilakukan oleh staf laki-laki dengan memanfaatkan jaringan organisasi pelaku konflik sehingga suara-suara dan kebutuhan perempuan korban seringkali tidak menjadi perhatian para pihak.

Pengalaman perempuan korban yang terekam dari setiap cerita yang mereka tuturkan dalam pertemuan di desa-desa dampingan setelah Aceh damai memberikan penegasan:

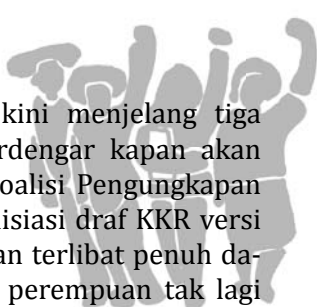
1. Perempuan sebagai istri/keluarga dari orang yang dianggap musuh oleh pihak lawan, juga diposisikan sebagai orang yang harus bertanggung jawab dan karena itu disetarakan sebagai pelaku (pihak musuh).
2. Peminggiran terhadap perempuan terjadi di seluruh Aceh, dalam kondisi konflik apa pun (Daerah Operasi Militer, Operasi Wibawa, Darurat Militer, Darurat sipil) bahkan dalam proses perdamaian ke proses reintegrasi dan keadilan transisi.

3. Perempuan kombatan sekalipun tetap harus menjalankan peran sebagai ibu, perawat, penjaga muruah, penerus keturunan dan penyedia logistik.
4. Manipulasi terhadap stereotip konstruksi sosial perempuan telah menjadi budaya para pihak yang berkonflik (bahkan mereka mengabaikan konvensi dan berbagai resolusi serta aturan hukum yang berlaku).

Saat ini konflik bersenjata telah berakhir, tapi bukan berarti persoalan korban dan hak-haknya dapat dikesampingkan. Perdamaian seharusnya menjadi anugerah untuk semua masyarakat, karena itu proses menata kehidupan pasca perdamaian seharusnya memperhatikan aspirasi perempuan juga.

Aku berharap perdamaian di Aceh bukan hanya penghentian kekerasan bersenjata, bukan juga karena takut dengan dampak bencana tsunami, bukan proses untuk memastikan bahwa kepentingan para pihak yang berkonflik telah terakomodasi dalam setiap klausul perjanjian damai dan terlaksana sesuai keinginan para pihak. Perdamaian seharusnya menjadi “ruang bebas untuk masyarakat (perempuan dan laki-laki), tempat mereka dapat menyuarkan hak dan kepentingannya tanpa harus memiliki ketakutan akan adanya intimidasi, diskriminasi dan korupsi dalam setiap proses kehidupan bermasyarakat.” Dengan begitu aku tidak perlu takut berbicara tentang beban yang harus dipikul perempuan karena budaya patriarki yang dianut oleh penghuni bumi.

Proses damai Aceh sejauh ini belum memenuhi keadilan untuk masyarakat korban. Pemulihan trauma, kompensasi kerugian harta benda dan pemulihan nama baik korban, sejatinya menjadi agenda yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintahan Aceh yang untuk pertama kalinya dipilih oleh rakyat secara langsung. MoU Helsinki mengamanatkan pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR-Aceh) setahun setelah perjanjian damai



terlaksana. Usia perjanjian damai kini menjelang tiga tahun, lembaga KKR belum lagi terdengar kapan akan direalisasikan. Padahal sejak awal Koalisi Pengungkapan Kebenaran (KPK) Aceh telah menginisiasi draf KKR versi masyarakat sipil. Lembaga perempuan terlibat penuh dalam penyusunan draf tersebut agar perempuan tak lagi menjadi korban dan penonton saja, tapi juga sebagai pihak yang ikut memperjuangkan dan menentukan proses perdamaian Aceh.

Aceh yang adil dan damai hanya dapat diwujudkan jika seluruh lapisan masyarakat bersikap toleran, menghargai keberagaman pilihan, menghilangkan penindasan atas minoritas, saling mendukung antar generasi dan saling menguatkan kebersamaan untuk hidup bersama yang lebih baik dan bermartabat.

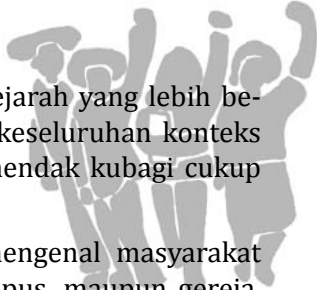
# Memaknai Perjalanan

Th. J. Erlijna – Jakarta



*I'm Leaving — Iriantine Karnaya*

Dari mana harus kuawali refleksi perjalanan hidupku sebagai perempuan aktivis? Ada terlalu banyak kisah yang ingin kubagi, terutama karena aku ingin menempatkan pengalamanku sebagai bagian dari perjalanan bangsaku sekaligus perjalanan kaum perempuannya. Kalau saja saat ini aku paham sejarah pergerakan bangsa-bangsa di Asia, kurasa aku juga ingin pengalamanku menjadi bagian dari perjalanan mereka juga. Tetapi, justru karena



pengalamanku adalah bagian dari sejarah yang lebih besar, maka tanpa perlu menjelaskan keseluruhan konteks pun kurasa fragmen-fragmen yang hendak kubagi cukup mudah dipahami.

Pada 1995, ketika mulai belajar mengenal masyarakat baik di luar lingkungan rumah, kampus, maupun gereja, aku langsung berhadapan dengan kemiskinan. Keluargaku tidak kaya. Orangtuaku harus jungkir balik untuk memasukkan empat anaknya ke sekolah-sekolah yang menurut mereka bisa menjamin masa depan kami. Kadangkala aku menunggak bayaran sekolah. Suatu kali, saat duduk di bangku SMA, seorang teman menemukan bercak-bercak putih di kukuku. Ia yakin aku kekurangan gizi, penyakit orang miskin. Temanku menduga itu karena makanan yang disediakan asramaku tidak cukup memenuhi standar kesehatan. Ia berbaik hati membawakanku apel dan roti selama beberapa hari berikut. Entah, apakah teorinya benar atau tidak, tapi itu membuatku yakin bahwa aku orang miskin. Yang tidak kuketahui adalah bahwa hingga saat itu aku belum berjumpa dengan wujud kemiskinan yang sesungguhnya. Persoalan-persoalan yang kemudian kuketahui menjadi bagian dari pergulatan keseharian masyarakat miskin, seperti “putus sekolah” atau “penggusuran”, tidak bermakna apa pun bagi telingaku. Mengurus KTP bagiku adalah soal administratif biasa, bukan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan akan eksistensiku sebagai warga sah sebuah wilayah. Sementara aparat pemerintah, mulai dari RT, RW, hingga kelurahan adalah petugas-petugas yang mengurus administrasi warga, bukan pejabat yang sewaktu-waktu dapat mengubah arah kehidupan keluargaku. Aku juga tidak pernah mempunyai kenalan yang harus berurusan dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), perpanjangan tangan pemerintah daerah untuk membersihkan ruang-ruang publik dari segala tipe warga dan obyek yang tidak mereka inginkan kehadirannya.

Aku bersekolah di sebuah SMA swasta Katolik khusus perempuan di Jakarta Pusat. Murid-murid di SMA-ku hampir seluruhnya anak-anak dari kelas sosial-ekonomi menengah dan atas. Suster kepala sekolah mungkin merasa latar belakang sosial-ekonomi murid-muridnya bisa menjauhkan kami dari doktrin gereja Katolik: *option for the poor* (keberpihakan terhadap kaum miskin). Ia merancang sejumlah program bukan hanya untuk meningkatkan kepekaan sosial kami, tapi juga untuk membuat kami yakin bahwa ada sesuatu yang bisa kami lakukan untuk membantu masyarakat miskin. Setiap murid kelas dua wajib mengikuti program *live in*. Selama tiga hari dua malam, berdua-dua kami dititipkan kepada sejumlah keluarga di beberapa desa di Jawa Tengah. Sebelum berangkat, suster berkali-kali menekankan pentingnya berpenampilan sederhana, terlibat dalam aktivitas keseharian keluarga-keluarga yang kami ikuti, dan bersikap mandiri. Bersikap mandiri artinya anak-anak yang ditempatkan di desa yang sama dilarang bergerombol dengan teman-teman satu sekolah agar tidak menjadi eksklusif dan kehilangan kesempatan belajar dari masyarakat. Aku tidak ingat persis apa yang kupelajari dari program *live in* itu. Kurasa kehidupan keluarga yang kuikuti, minus bekerja di sawah, tidak jauh berbeda dengan kehidupan di desa nenek-kakekku. Tapi mungkin program itu memang sangat bermanfaat untuk teman-teman lain yang tidak pernah merasakan kehidupan desa.

Program kedua yang dirancang suster adalah menyelenggarakan pendidikan alternatif bagi anak-anak di sebuah pemukiman kumuh di Cilincing. Untuk mengikuti program ini, kami harus melalui proses seleksi tiga tahap: seleksi akademis, tes kepribadian, dan wawancara. Karena proses seleksi bertahap itu, maka mereka yang terpilih selalu merasa mempunyai kebanggaan tersendiri. Aku sendiri tidak lulus tes kepribadian. Aku tidak tahu alasannya. Tapi aku selalu merasa aku terganjal oleh tes menggambar orang (DAM/Draw a Man Test). Gambar anak perempuan





*Foto: Lingkar Tuter Perempuan - Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)*

yang kubuat terlalu besar, sehingga aku menggambar bagian kepala sampai rok di satu sisi kertas, sementara bagian kaki di sisi sebaliknya. Namun seingatku, teman-teman yang terpilih memang adalah pribadi-pribadi yang berpikiran dewasa dan kreatif. Kalau kupikir sekarang ini sayang juga kenapa program itu tidak diwajibkan untuk semua siswa. Proses seleksi menyebabkan muncul persepsi bahwa kegiatan kemasyarakatan hanya cocok digeluti oleh pribadi-pribadi tertentu yang terpilih. Sesuatu yang sebenarnya berlawanan dengan semangat “semua orang harus melayani yang lain” yang terus-menerus ditekankan oleh suster kepala sekolah. Di luar semua itu, suster kepala sekolah sebenarnya berusaha mengajarkan kepada kami tentang tanggung jawab kepada masyarakat.

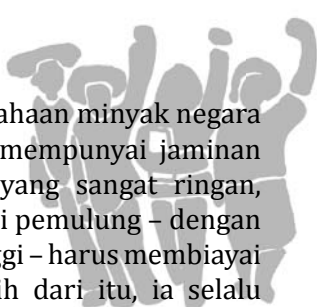
### **Kampung Jembatan**

Aku baru berkesempatan berhadapan dengan wujud kemiskinan di perkampungan urban pada tahun pertama kuliah. Aku dan teman-teman sekampus mengorganisasi suatu kegiatan bakti sosial. Kami bekerja sama dengan Jentera Muda Jakarta (JMJ), sebuah organisasi pemuda

yang menyelenggarakan pendidikan alternatif bagi anak-anak di Kampung Jembatan, serta mengorganisasi kaum remajanya. Saat itu aku mengetahui bahwa ada standar lain kemiskinan dalam rupa anak-anak kecil berpenampilan kotor, yang tinggal di perkampungan padat yang sama kotor, di pinggir sungai yang penuh sampah dan berbau tak sedap. Di antara anak-anak itu ada seorang yang pintar menggambar. Yogi, begitu namanya, selalu menggambar suasana kampungnya: rumah-rumah, orang-orang, gerobak dan sepeda untuk mengumpulkan besi bekas, serta jalan layang yang terlihat jika kita berdiri di tengah kampung. Dari dua puluh empat pilihan warna yang tersedia dalam kotak krayon, hanya tiga yang sering ia gunakan: coklat muda, coklat tua, dan hitam. Dan memang tiga warna itulah yang mendominasi Kampung Jembatan. Setelah itu aku memutuskan untuk bergabung dengan JMJ. Saat itu sudah memasuki tahun 1995.

Kurasa keputusanku bukan didorong oleh rasa iba kepada anak-anak itu. Aku tidak setuju dengan gambaran tentang anak-anak dan masyarakat miskin yang sering ditampilkan media massa, terutama televisi. Mereka bukan makhluk aneh yang hidup dalam kepedihan dan keputusasaan. Anak-anak itu sama seperti rata-rata anak-anak lain yang periang, kadangkala rewel dan nakal, selalu mempunyai energi untuk main, tapi gelisah kalau harus belajar lebih dari seperempat jam. Justru karena itu aku merasa mampu menemani mereka belajar. Yang menjadi persoalan mereka – dan justru ini yang hampir tidak pernah diangkat media massa – adalah apa akar kemiskinan mereka.

Dari keterlibatan dengan anak-anak Kampung Jembatan dan keluarga-keluarga mereka, aku memahami bahwa kemiskinan terutama bukan sekadar soal besar-kecilnya penghasilan rumah tangga. Seorang pemulung logam bekas yang sudah berusia dewasa di Kampung Jembatan mempunyai penghasilan rata-rata yang hampir sebesar gaji



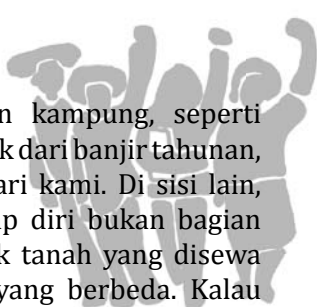
bulanan pegawai menengah di perusahaan minyak negara seperti ayahku. Tetapi, jika ayahku mempunyai jaminan kesehatan keluarga, kredit rumah yang sangat ringan, asuransi, dan jaminan-jaminan lain, si pemulung – dengan risiko kecelakaan kerja yang lebih tinggi – harus membiayai sendiri seluruh kebutuhan itu. Lebih dari itu, ia selalu berada di luar perlindungan hukum. Masyarakat Kampung Jembatan adalah masyarakat yang tersingkir dari tempat lahir mereka di Indramayu dan berbagai wilayah lain di Pulau Jawa dan Madura karena perekonomian desa hancur akibat kebijakan pemerintah, terutama sejak 1970an. Mereka tiba di Jakarta sebagai orang-orang yang secara moral sudah kalah dan semakin kalah lagi karena label pendatang liar, penyakit sosial masyarakat, pengganggu keamanan, ketertiban, dan keindahan kota. Dan Pemerintah DKI Jakarta, bekerja sama dengan kepolisian dan militer, aktif menegakkan label-label itu.

Warga Kampung Jembatan bisa berbicara panjang lebar tentang hak-hak mereka kepadaku dan teman-teman. Namun, mereka diam seribu bahasa di hadapan aparat negara, mulai dari tingkat RW sampai pemerintah kota. Para aparat ini berwenang menerbitkan KTP yang merupakan bukti pengakuan atas keberadaan mereka dan jaminan rasa aman dalam bekerja. Aparat negara juga menjadi pihak yang berwenang menentukan berapa lama mereka boleh tinggal di pinggir sungai itu dan berapa lama mereka membutuhkan waktu untuk berpindah ke wilayah lain, bagaimana caranya mengatur pembagian uang hasil utang dari Bank Dunia yang disalurkan lewat program Jaring Pengaman Sosial atau program padat karya, sampai soal penentuan hari kerja bakti. Semua dilakukan hampir selalu tanpa melibatkan warga. Sementara itu, warga merasa bahwa kesulitan mencari pekerjaan, daya tawar rendah di hadapan pemilik pabrik daur ulang logam bekas, serta penyakit TBC yang menyerang banyak warga sebagai persoalan mereka sendiri, bukan urusan pemerintah.



*Puluhan korban stigmatisasi/pencapan Partai Komunis Indonesia (PKI), berdiri menunggu hasil keputusan rapat dengar pendapat anggota Komisi III DPR di luar pagar Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2007. Mereka mengaku menjadi korban diskriminasi atas status mereka yang dikaitkan dengan PKI pada tahun 1965 silam. Foto: TEMPO.*

Dalam beberapa peristiwa saat warga harus berhadapan dengan aparat pemerintah, misalnya ketika ada rencana pengusuran, teman-teman dan saya berusaha untuk mendorong mereka tampil sebagai satu kelompok. Tetapi, ada beberapa alasan yang membuat hal itu sulit terwujud. Warga yang tinggal di bagian utara sungai tidak cocok dengan yang tinggal di bagian selatan. Warga Indramayu dan Madura yang jumlahnya dominan di Kampung Jembatan menyimpan sentimen satu sama lain. Betapa pun mereka mempertahankan rasa saling curiga satu sama lain, sesungguhnya tak satu pun di antara mereka mampu menjelaskan peristiwa khusus yang menjadi alasan kecurigaan-kecurigaan itu muncul. Jika kelompok sudah terbentuk pun, tak ada satu pun yang bersedia menjadi juru bicara. Alasan yang paling sering dikemukakan karena mereka tidak pintar berbicara. Warga juga menganggap



inisiatif untuk mengatasi persoalan kampung, seperti mengatasi banjir tahunan atau dampak dari banjir tahunan, harus datang dari ketua RW atau dari kami. Di sisi lain, ketua RW dianggap dan menganggap diri bukan bagian dari warga, karena ia adalah pemilik tanah yang disewa warga dan juga berasal dari etnis yang berbeda. Kalau ada program pemerintah, Pak RW hanya bermusyawarah dengan orang-orang tertentu yang dipilihnya sendiri dari kalangan warga. Kepada yang selebihnya, ia hanya memberi instruksi. Lima tahun belakangan, setelah mulai belajar sejarah pergerakan di Indonesia dan penghancurannya pada 1965, aku baru memahami mengapa sulit bagi warga Kampung Jembatan mengorganisasi diri demi membela kepentingannya dan, apalagi, bernegosiasi dengan aparat pemerintah. Mereka tidak mempunyai pengalaman itu karena negara tidak pernah mengizinkan. Bisa jadi kata berorganisasi atau bernegosiasi sendiri sudah membuat mereka jerih karena diasosiasikan dengan melawan negara. Sementara Pak RW, mungkin ia juga hanya meniru tingkah para pejabat negara.

Salah satu kegiatan lain JMJ adalah memfasilitasi mahasiswa dan kaum muda lainnya agar mampu membaca secara kritis situasi masyarakat sekaligus merekrut anggota baru. Kami kemudian membuat pelatihan analisis sosial. Aku dan teman-teman mengetahui bahwa menyelenggarakan kegiatan semacam ini bisa dianggap melawan pemerintah. Risikonya adalah dibubarkan dan ditangkap. Tetapi, asalkan hati-hati, program seperti ini bukan tak mungkin dilakukan.

Suatu hari aku membuat kecerobohan dengan memfotokopi dokumen-dokumen pelatihan analisis sosial di sebuah koperasi Angkatan Darat hanya karena pertimbangan menghemat ongkos. Pada saat itu tidak terjadi apa-apa sehingga kupikir aku beruntung. Pada hari-H, kami berangkat ke sebuah rumah di pinggiran

kota tempat pelatihan kami selenggarakan. Dua hari pertama acara berjalan lancar. Tetapi memasuki hari terakhir, Romo Sandyawan, Direktur ISJ, menelepon untuk memperingatkan agar kami segera membubarkan diri. Ia memberitahukan bahwa sejumlah tentara datang ke kantor ISJ dan mencari kami. Sebagai koordinator JMJ, aku yang harus menandatangani surat undangan, maka tentara juga mencariku. Teman-teman ISJ yang menghadapi para tentara itu berusaha menutupi keberadaan kami. Kami sendiri memutuskan untuk memulangkan peserta dan, setelah memindahkan lokasi, melanjutkan acara untuk internal kami sendiri.

Pada paro akhir 1990an itu, upaya Orde Baru untuk mencegah anak-anak muda mengenal dan menganalisis dampak dari kebijakan mereka terasa makin sia-sia. Setelah mengikuti pelatihan analisis sosial yang diselenggarakan oleh sejumlah kelompok mahasiswa di Yogya, setiap tiga hari dalam sebulan aku pergi ke sana untuk belajar lebih banyak tentang masyarakat. Beberapa teman JMJ berangkat ke Lampung juga untuk melakukan kegiatan yang sama. Aku memperhatikan kegiatan dan keanggotaan SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), organ kiri mahasiswa yang menjadi cikal bakal PRD (Partai Rakyat Demokratik) di Depok, makin membesar. Aku mulai belajar tentang kejahatan Orde Baru di Timor Leste dan Papua, penghisapan dan represi terhadap buruh, serta kontrol ketat mereka terhadap pers lewat diskusi-diskusi yang diselenggarakan SMID. Bagi JMJ, kegiatan pelatihan analisis sosial saat itu adalah alat melawan yang ingin kami bagikan kepada sesama anak muda. Oleh karena itu, sampai sebelum terjadi krisis ekonomi 1997-1998, kami masih sempat beberapa kali menyelenggarakannya di seputar Depok. Bahkan ayahku ikut memfasilitasi kegiatan kami ini untuk kaum muda di gereja. Tetapi, makin meningkatnya kegiatan anak muda, makin kasar pula represi rezim Orde Baru. Hingga pecahlah Peristiwa 27 Juli 1996.

## Pelajaran dari Represi Negara

Aku masih belum selesai memikirkan bagaimana caranya mendorong warga Kampung Jembatan belajar mengorganisasi diri sekaligus mengajak semakin banyak anak muda untuk mengurus masyarakat ketika persoalan-persoalan lain muncul susul-menyusul secara cepat: Peristiwa 27 Juli, lalu berbagai peristiwa penculikan dan penghilangan paksa, pembunuhan di Trisakti, Tragedi Mei 1998, Semanggi I dan II, Timor Leste, dan Aceh. Keterlibatan dengan warga Kampung Jembatan mendorongku untuk mulai berpikir tentang hubungan antara negara dan warga negaranya. Negara ternyata bisa dengan sistematis mengabaikan dan menyingkirkan warga negaranya. Tetapi peristiwa-peristiwa selanjutnya membuatku melihat bahwa penyingkiran negara terhadap warganya bahkan bisa berbentuk tindak pembunuhan, penghilangan paksa, pembakaran, pemerkosaan dan penyerangan seksual, dan penghancuran organisasi oposan. Aku ingin tahu apa yang sesungguhnya terjadi di negara ini? Mengapa negara bisa mempunyai kewenangan sedemikian besar sehingga dapat melakukan kekerasan luar biasa terhadap warganya? Aku mulai membagi perhatian antara kegiatan di Kampung Jembatan dan kegiatan advokasi korban yang diorganisasi Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK).

Salah satu pendiri TRuK adalah Institut Sosial Jakarta (ISJ), organisasi yang juga melahirkan JMJ pada 1990. JMJ menumpang sekretariat di kantor ISJ, tempat TRuK kemudian juga membangun sekretariatnya. Dalam banyak hal, JMJ selalu bekerja sama dengan Biro Advokasi Anak ISJ. Mungkin karena soal kedekatan itulah maka ketika ISJ bersama sejumlah organisasi dan tokoh masyarakat membentuk sebuah tim untuk menginvestigasi kasus 27 Juli – cikal bakal TRuK – namaku dicantumkan sebagai salah satu anggota. Itu adalah kali pertama aku terlibat dalam kegiatan investigasi sehingga aku sebenarnya tidak tahu

apa tepatnya yang harus kulakukan. Sementara itu semua orang begitu sibuk sehingga tidak ada yang mempunyai waktu untuk memberi penjelasan. Aku selalu mengingat peristiwa itu dan hari-hari selanjutnya sebagai saat paling membingungkan dalam keseluruhan pengalaman aktivismeku.

Awalnya adalah Sabtu, 27 Juli 1996, sore hari itu aku dan teman-teman sedang berjalan pulang dari Kampung Jembatan menuju kantor ISJ ketika kami memperhatikan ada yang tidak beres. Bus-bus berjalan di rute yang tidak seharusnya. Seorang teman yang tinggal di dekat markas PDI (Partai Demokrasi Indonesia) ditelepon oleh keluarganya, diperintahkannya untuk segera pulang. Awalnya kupikir keluarganya marah karena kegiatan temanku ini di JMJ. Ada beberapa teman yang keluarganya tidak setuju dengan keterlibatan mereka di JMJ karena dianggap aneh, tidak menjanjikan masa depan yang baik, dan mengganggu keseriusan belajar. Agar teman kami tidak menanggung sendiri kemarahan keluarganya, aku dan teman-teman lain memutuskan untuk menemaninya pulang. Teman kami sempat disambut dengan lemparan sepatu oleh ayahnya. Tapi kemudian kakak-kakaknya menjelaskan bahwa persoalannya mereka khawatir terjadi sesuatu yang buruk pada teman kami. Sejak pagi hingga sore hari itu mereka menonton peristiwa lempar-melempar batu di markas PDI yang berlanjut dengan penyerangan ke dalam markas. Keluarga temanku yakin pasti ada yang tewas, tapi mereka sendiri kemudian lari pulang agar tidak ikut menjadi korban. Mendengar itu, aku dan teman-teman menghubungi ISJ untuk menanyakan apa yang harus kami lakukan. Beberapa teman ISJ rupanya sudah ada di lokasi, hanya sekitar seratus lima puluhan meter dari rumah teman kami. Seorang teman diperintahkan menyusul ke sana untuk membantu memotret kejadian, sementara sisanya, termasuk aku, harus pulang ke kantor ISJ dan menunggu instruksi lebih lanjut. Dalam perjalanan pulang,





*Kegiatan di Plantungan. Foto: Syarikat*

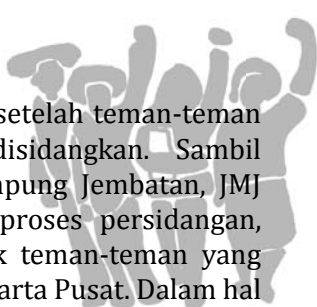
seingatku, aku melihat sejumlah tentara di depan Tugu Proklamasi. Suasananya begitu mencekam. Tetapi, hanya sekitar dua-tiga kilometer dari lokasi, di daerah Jatinegara, orang-orang beraktivitas seperti biasa, seolah tidak ada kejadian apa-apa. Aku menyaksikan beberapa laki-laki berjoget dangdut di pinggir Kebon Pala. Waktu itu aku merasa sedih sekali.

Berselang beberapa hari kemudian seorang teman dari ISJ memberi tahu bahwa telah dibentuk tim investigasi dan tugasnya adalah mendata korban. Keesokan paginya aku disuruh membawa setumpukan *flyer* ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aku tidak ingat apa isi *flyer* itu dan juga lupa ada peristiwa apa di pengadilan tersebut. Aku hanya diperintahkan untuk menyerahkannya kepada seorang anggota ISJ yang sudah berada di sana. Setelah itu aku memutuskan untuk mengajak seorang teman berkeliling ke tempat-tempat yang kuketahui sebagai tempat berkumpulnya para aktivis untuk mulai mendata korban. Kami pergi ke LBH, lalu ke sekretariat PIJAR, dan ke sebuah wisma di Depok tempat para anggota SMID

sering berkumpul. Aku tidak tahu bahwa selama itu kami dibuntuti oleh intel sampai kembali ke kantor ISJ. Aku dengan tenang meninggalkan kantor, mampir ke rumah teman, mandi, dan kembali lagi ke kantor. Begitu tiba di pintu, aku langsung dimarahi oleh dua teman ISJ. Aku merasa bodoh sekali. Peristiwa itu membuatku paham bahwa label subversif bukan hanya ditujukan kepada para aktivis dan kelompok yang menentang kebijakan pemerintah di garis depan, tapi juga kepada mereka yang berusaha melindungi dan membela para penentang. Pengalaman itu juga membuatku menjadi lebih mengerti apa yang harus kulakukan ketika Tragedi Mei '98 dan peristiwa-peristiwa selanjutnya terjadi.

Situasi setelah 27 Juli sungguh menekan perasaan. Anggota-anggota ISJ yang selama itu selalu menjadi teman diskusiku sering menghilang dari kantor. Aku pergi ke Yogya untuk mencari teman-teman aktivis lain, tapi mereka juga tampak begitu ketakutan. Istilah yang populer di kalangan aktivis saat itu adalah: tiarap. Semua aktivis berusaha untuk tidak melakukan kegiatan terang-terangan yang dapat mengundang kekerasan lebih lanjut. Di sisi lain, kecurigaan antar-aktivis juga meningkat. Seorang teman di Yogya sempat mencurigaiku sebagai agen ganda yang baru tiba dari Jakarta. Tetapi pengalamanku tidak berarti apa-apa dibanding pengalaman teman-teman yang mengikuti kongres pekerja anak di Medan. Ruangan kongres dikepung oleh tentara. Selama itu peserta diperintahkan untuk berjongkok dan tidak berbicara satu sama lain. Militer menganggap pertemuan membicarakan persoalan anak-anak yang bekerja di jalan membahayakan stabilitas negara. Selang beberapa waktu kemudian teman-teman PRD ditangkap dan Romo Sandyawan, Direktur ISJ, dan kakaknya, Pak Benny, ikut diseret ke pengadilan karena memberi perlindungan kepada mereka.

Untunglah periode tiarap itu tidak berlangsung lama.



Seingatku kantor ISJ kembali ramai setelah teman-teman PRD ditangkap dan kemudian disidangkan. Sambil tetap menjalankan rutinitas di Kampung Jembatan, JMJ bertugas mentranskripsi rekaman proses persidangan, selain menyediakan makanan untuk teman-teman yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal menyediakan makanan, aku dan teman-teman meminta ibu-ibu kami untuk bangun lebih pagi, bergantian memasak dengan dana minim yang diserahkan sekretaris ISJ. Saat gerakan reformasi dilancarkan pada 1998, pemandangan yang sama yaitu kaum ibu memasak sendiri-sendiri atau berkelompok untuk memberi makan para pemuda dan mahasiswa yang berdemonstrasi menjadi gerakan tersendiri yang meluas. Aku merasa masih dibutuhkan penelitian sejarah tentang peristiwa 27 Juli hingga saat para aktivis mendapatkan kembali kekuatannya untuk mengonsolidasi diri, melibatkan masyarakat yang lebih luas, dan melancarkan gerakan reformasi.

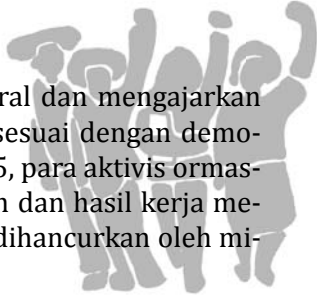
Gerakan reformasi memberiku pemahaman tentang sebesar apa kekuatan rakyat jika mereka bergerak. Tetapi, saat ini, sepuluh tahun sesudah kegegempitaan demokrasi jalanan berlalu, aku baru melihat di mana letak keroposnya gerakan itu. Rangkaian aksi jalanan besar-besaran selama era Reformasi tidak disertai dengan perluasan usaha pengorganisasian masyarakat. Saat itu aku sendiri tidak mampu melihat kaitan kerja JMJ di Kampung Jembatan dengan demonstrasi-demonstrasi yang dimotori mahasiswa. Di sisi lain, warga Kampung Jembatan juga banyak yang mengatakan kepadaku: kami percayakan saja kepada para mahasiswa. Di luar kegembiraan atas jatuhnya Soeharto, warga merasa peristiwa demi peristiwa bergerak di luar kendali mereka.

Ketika mulai belajar tentang sejarah Indonesia aku baru menyadari bahwa pada 1950an hingga paro awal 1960an, justru inilah yang sedang dikerjakan gerakan kiri. Mereka



*Kegiatan di Plantungan. Foto: Syarikat*

sedang meningkatkan usaha untuk mengaitkan revolusi kemerdekaan dengan masyarakat di wilayah-wilayah perkampungan urban maupun di pedesaan. Hingga proklamasi 1945, gagasan kemerdekaan Indonesia hanya beredar di kalangan sekelompok kecil kelas menengah dan atas. Baru sesudah itu hingga pecah perang kemerdekaan, kesadaran tentang keindonesiaan makin meluas di kalangan muda, bahkan hingga ke kampung-kampung. Tetapi masyarakat umum hanya berperan sebagai pihak yang dimobilisasi untuk menyediakan logistik, markas, dan perlindungan bagi para gerilyawan. Setelah kedaulatan penuh berhasil dicapai, barulah para mantan gerilyawan ini mempunyai kesempatan untuk membentuk ormas-ormas yang bekerja melakukan pendidikan dan pengorganisasian masyarakat. Mereka hendak menjadikan kerja-kerja merumuskan keindonesiaan di dalam kendali bersama masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, perdebatan tentang apa itu Indonesia begitu marak dan meluas pada 1950-1960an. Rezim Orde Baru melabel periode itu secara sewenang-



wenang sebagai era Demokrasi Liberal dan mengajarkan kepada generasiku bahwa itu tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Dalam peristiwa 1965, para aktivis ormas-ormas pendahulu ini beserta gagasan dan hasil kerja mereka yang belum sempurna itu yang dihancurkan oleh militer Soeharto.

## **Belajar dari Perempuan Pendahulu**

Pada awal 2000 kegiatanku di JMJ dan Kampung Jembatan semakin berkurang dan akhirnya berhenti sama sekali. Aku tidak ingat persis alasannya. Kurasa semua mengalir saja. Selang beberapa waktu, di TRuK aku mulai terlibat mengolah data korban konflik Aceh, mengurus jaringan dengan kelompok-kelompok di Aceh, dan mengorganisasi kampanye anti-darurat militer ke sekolah-sekolah serta sejumlah komunitas lain. Keterlibatan dalam persoalan Aceh membuatku sampai pada kesimpulan bahwa Indonesia adalah sebuah kesia-siaan. Jika memang Indonesia ada hanya untuk meniadakan warga negaranya, maka biarkan ia hancur. Saat itu aku belum memahami bahwa militer dan rezim Orde Baru tidak mewakili Indonesia yang diangankan oleh gerakan nasionalis yang tumbuh pada parawal abad ke-20. Aku baru memeriksa kembali kesimpulan awalku ketika pada akhir 2003, Agung Ayu dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) mengajakku terlibat mempersiapkan penerbitan kumpulan esai tentang pengalaman korban peristiwa 1965 yang berjudul *Tahun yang Tak Pernah Berakhir* (Januari 2004).

Yang membuatku tertarik kepada *Tahun yang Tak Pernah Berakhir* awalnya bukanlah kisah para korban itu sendiri, tetapi kepada metode sejarah lisan yang digunakan para penulisnya. Aku pernah menggunakan metode wawancara sejarah hidup saat ingin menelusuri asal-mula kemiskinan masyarakat Kampung Jembatan. Tetapi ketika itu aku belum menyadari bahwa sejarah lisan dapat menjadi alat untuk menciptakan ruang bicara bagi orang-orang yang

## Persekusi Berbasis Gender



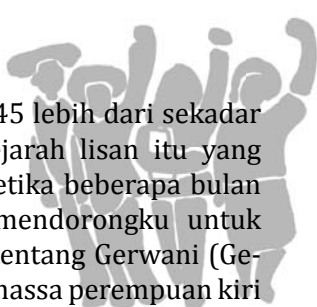
*Confession — Reni Anggraeni*

Persekusi adalah pengingkaran hak-hak dasar manusia atas dasar diskriminatif seperti agama, etnis, ras, budaya, jender, atau identitas politik. Persekusi termasuk pengingkaran hak-hak sipil politik, misalnya hak untuk rasa aman; untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; hak untuk berpendapat; untuk memeluk agama dan kepercayaan; dan untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Pengingkaran terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya juga menjadi bagian dari persekusi seperti pengingkaran atas hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak; untuk pendidikan; untuk kesehatan, untuk terlibat dalam aktivitas sosial budaya; dan untuk menjalankan hidup berkeluarga. Persekusi ini secara aktif dijalankan oleh aparat negara, dan mengukuhkan diskriminasi dan pengucilan dari masyarakat sekitar.

Terkait peristiwa 1965, persekusi dilakukan terhadap setiap orang yang dituduh memiliki kaitan dengan PKI maupun keluarganya. Misalnya saja, istri tahanan dipecat dari pekerjaannya dan anak-anak dikeluarkan dari sekolah. Persekusi berbasis jender terjadi terhadap perempuan yang dituduh sebagai anggota Gerwani, dengan alasan pandangan politik (komunisme) dan jender (karena sebagai Gerwani mereka dianggap perempuan amoral). Persekusi terus berlanjut meski mereka telah dibebaskan dari tahanan lewat berbagai pengingkaran terhadap hak mereka untuk bebas dari stigmatisasi, kebebasan bergerak, berpolitik, bekerja, dan pendidikan. Sepanjang hidupnya, hingga saat ini, mereka masih terus mengalami pengucilan dan stigmatisasi.

selama ini diabaikan dalam penulisan sejarah arus besar. Metode itu membuat jalannya sejarah bisa dilihat dari banyak sisi lain. Sejarah revolusi '45 misalnya, menjadi berbeda ketika dilihat dari sudut pandang seorang gadis Bali yang bertugas mengumpulkan dana gerilya dengan menyelenggarakan kursus bahasa Belanda. Tuturannya



membuatku paham bahwa revolusi '45 lebih dari sekadar cerita di medan perang. Potensi sejarah lisan itu yang membuatku langsung mengiyakan ketika beberapa bulan sesudahnya teman-teman di ISSI mendorongku untuk membuat proyek penelitian sendiri tentang Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), organisasi massa perempuan kiri yang dihancurkan oleh militer Soeharto dalam peristiwa 1965-1966.

Aku tidak pernah mempunyai kecurigaan baik terhadap Gerwani maupun organisasi-organisasi kiri lain. Entah mengapa, pelajaran sejarah di sekolah atau film Arifin C. Noer yang mendiskreditkan Gerwani sama sekali tidak berpengaruh terhadapku. Oleh karena itu, pada tahun 2000, ketika pertama kali membaca buku Saskia Wieringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (1999), aku tidak merasa mengalami konflik pengetahuan, konflik batin, atau konflik apa pun. Di sisi lain, aku juga tidak terkesan sama sekali terhadap Gerwani. Yang bisa kupahami dari buku itu hanyalah bahwa aktivis-aktivis Gerwani adalah korban kekerasan negara. Tentang organisasi dan peran mereka selama lima belas tahun awal Indonesia merdeka lepas dari perhatianku. Barulah ketika sedang membantu menyelaraskan bahasa dalam naskah *Tahun yang Tak Pernah Berakhir* aku ingin mengetahui lebih banyak tentang organisasi ini. Lagi-lagi cerita perempuan dari Bali tadi tentang Gerwani yang menarik perhatianku. Ia menuturkan bahwa salah satu kegiatan Gerwani adalah mendirikan Taman Kanak-kanak (TK) Melati. Taman kanak-kanak itu ikut hancur bersama hancurnya Gerwani pada 1965. Tema pendidikan jauh lebih kupahami daripada tema organisasi perempuan. Ketika aku memeriksa kembali buku Wieringa, di dalamnya tertulis, Gerwani mengklaim bahwa mereka memiliki lebih dari 1.400 TK Melati. Aku pun terdorong untuk mencari tahu lebih banyak tentang hal itu.

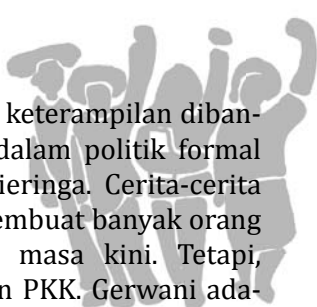
Pada awalnya penelitianku ingin mengungkap apa yang membuat Gerwani mampu mendirikan sekian banyak

taman kanak-kanak dengan kas yang bisa dikatakan kosong. Aku yakin Gerwani pasti mempunyai strategi yang canggih. Aku tidak bisa membayangkan ada organisasi masa kini yang bisa melakukan itu, bahkan dengan dukungan lembaga donor sekalipun. Tapi sampai setengah tahun penelitian berjalan, tidak satu pun perempuan yang kuwawancarai mengonfirmasi keberadaan strategi hebat itu. Setiap kali mereka justru memberikan jawaban: gotong royong dan perjuangan. Taman kanak-kanak itu didirikan atas kerja sama Gerwani dengan masyarakat kampung dan organisasi-organisasi kiri lain. Mereka mengumpulkan dengan sukarela peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk membangun taman kanak-kanak. Guru-gurunya tidak digaji atau, walaupun diberi honor, jumlahnya sangat minim. Guru-guru bersedia mengajar hampir tanpa imbalan karena merasa pekerjaan itu sebagai bagian dari perjuangan demi memajukan bangsa. Mereka percaya kepada ungkapan Soekarno: revolusi belum selesai. Sesederhana itu.

Dari para aktivis perempuan pendahulu itu aku baru mengetahui bahwa istilah gotong-royong, perjuangan, negara-bangsa, pernah mempunyai makna yang mendalam. Sementara bagiku dan mungkin juga orang-orang segenerasiku, istilah-istilah itu hanyalah slogan-slogan kosong rezim Orde Baru. Dari fakta kecil itu aku merasa ada Indonesia yang lain. Indonesia yang belum kukenal. Dan aku ingin mengenalnya dari sudut pandang perempuan-perempuan itu. Pada tahap itu aku memutuskan untuk memperluas tema penelitianku, bukan hanya tentang TK Melati, tapi tentang keseluruhan Gerwani: tentang gagasan-gagasan yang hidup dalam dan dirumuskan melalui kerja-kerja pengorganisasian mereka di lapangan.

Ibu-ibu yang kuwawancarai kebanyakan adalah anggota biasa Gerwani. Cerita-cerita mereka tentang Gerwani sangat sederhana. Mereka lebih bisa bercerita tentang





TK Melati, arisan, dan kursus-kursus keterampilan dibandingkan tentang keterlibatan Gerwani dalam politik formal negara seperti yang dicatat oleh Wieringa. Cerita-cerita mereka tentang kegiatan Gerwani membuat banyak orang menganggapnya seperti PKK pada masa kini. Tetapi, Gerwani sama sekali berbeda dengan PKK. Gerwani adalah organisasi massa otonom; keanggotaannya bersifat sukarela; dan kepemimpinannya tidak mengikuti status suami. Banyak ibu yang kuwawancarai tidak bisa menjelaskan tentang tuntutan politik Gerwani, tapi mereka dengan lancar menceritakan tentang hak perempuan untuk berkegiatan, mengembangkan diri, dan mengurus kesejahteraan kampung. Lagi-lagi pengamat selintas akan menganggap kesadaran mereka bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi cobalah tempatkan kesadaran itu di dalam konteks Indonesia 1950an dan 1960an: para perempuan kampung, yang kebanyakan pendidikan tertingginya hanya sekolah rakyat, yang baru saja bisa menyatakan diri sebagai bagian dari negara-bangsa merdeka, yang masih dilingkungi oleh pandangan budaya bahwa mereka adalah milik orangtua dan suaminya. Tidakkah kita bisa melihat ada suatu lompatan jauh? Baru 50-60 tahun sebelumnya Kartini menjerit di dalam surat-suratnya tentang hak-hak perempuan sebagai manusia dan sebagai anggota sebuah bangsa. Bagiku, di sinilah tepatnya sumbangan Gerwani, yaitu membuat perempuan-perempuan ini percaya bahwa kalau mereka berorganisasi, mereka akan mempunyai kekuatan untuk mengembangkan diri dan masyarakatnya. Melalui semua itu, Gerwani berusaha mengajak perempuan-perempuan ini untuk belajar memikirkan keindonesiaan; Indonesia yang dimulai dari kampung-kampung.

Dalam konteks itu aku menemukan bahwa TK Melati memiliki arti lebih dari sekadar sebagai institusi pendidikan taman kanak-kanak. TK Melati sekaligus menjadi institusi pendidikan bagi kaum perempuan juga. Para perempuan belajar untuk mengorganisasi masyarakat kampung untuk

mencapai tujuan yang mereka tetapkan, yaitu membangun taman kanak-kanak. Lantas beberapa di antara mereka mengikuti kursus yang diselenggarakan Gerwani agar dapat menjadi pengajar di taman kanak-kanak tersebut. Salah satu prioritas utama Indonesia yang saat itu baru merdeka adalah untuk menjadi setara dan diakui oleh bangsa-bangsa lain. Untuk itu bangsa Indonesia harus membuktikan bahwa mereka adalah bangsa yang maju. Dan kemajuan hanya bisa dicapai melalui pendidikan. Maka pendidikan menjadi program penting pemerintah dan profesi pendidik dianggap sebagai profesi terhormat. Partisipasi para perempuan ini dalam program pendidikan bangsa meningkatkan nilai penting mereka di mata pemerintah maupun masyarakat. Bagi para perempuan ini sendiri, keberhasilan mereka dalam mendukung program pendidikan pemerintah membuat kepercayaan diri mereka meningkat. Bagaimana keberhasilan tersebut mereka klaim untuk bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan lain baik di masyarakat maupun negara untuk mendesak kepentingan perempuan yang lain memang masih harus aku teliti lagi. Namun yang jelas, perempuan-perempuan aktivis seperti inilah, beserta gagasan-gagasan dan kerja-kerjanya, yang kemudian diberi label pelacur dan pembunuh berdarah dingin oleh Soeharto dan militernya. Mereka diburu, ditangkap, dibunuh, dihilangkan paksa, disiksa, dan diperkosa oleh militer Soeharto pada 1965-1966. Setelah ditahan dan dibuang selama belasan tahun oleh rezim Orde Baru, mereka masih terus dijadikan pesakitan hingga sekarang.

Penelitian tentang Gerwani mendorongku mempelajari sejarah gerakan perempuan selama paro awal abad ke-20. Ada banyak hal tentang mereka—manusianya, organisasinya, gagasan-gagasannya, maupun kerja-kerjanya—yang baru kuketahui beberapa tahun belakangan ini. Semua itu seperti hilang dari catatan sejarah maupun dari ingatan kolektif. Bahkan ketika membaca surat-surat



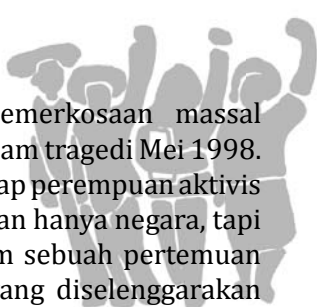
*Audiensi korban stigmatisasi Partai Komunis Indonesia. Foto: ISSI*

Kartini – feminis pertama dalam catatan sejarah nasional –maupun membaca berbagai karya tentangnya, aku merasa seperti menemukan tokoh yang berbeda dari yang selama ini dirayakan setiap 21 April. Kegiatan paling umum setiap 21 April adalah lomba kebaya dan sanggul. Tapi entah dalam buku apa, seingatku dalam surat Roekmini – adik Kartini – kepada Ny. Abendanon, diceritakan bahwa Kartini terlalu sibuk berpikir, membaca, menulis, membatik, atau mengatur pesanan ukiran sehingga sering lupa memperhatikan pakaiannya. Ia kerap memakai pakaian yang sudah ditambal di sana-sini. Yang aku pelajari, Kartini bukan hanya menuntut emansipasi perempuan, ia menuntut emansipasi perempuan demi tujuan lain, yaitu emansipasi bangsa. Pada zaman Kartini, belum lahir satu pun organisasi pribumi. Empat tahun setelah kematian Kartini barulah lahir Boedi Oetomo, organisasi pribumi pertama. Empat tahun kemudian organisasi perempuan mulai bermunculan dan menginspirasi diselenggarakan kongres perempuan pertama pada 1928. Dinamika gerakan perempuan yang demikian kaya pada 1930an hingga

tahun-tahun selanjutnya juga hilang dari perbincangan publik.

Apa yang kupelajari lima tahun belakangan membuatku sadar bahwa Orde Baru telah merusak dan merampok habis-habisan ingatan masyarakat. Sebagai pengganti, mereka membangun Monumen Lubang Buaya dan mematrikan konsepsi mereka tentang perempuan ideal: perempuan yang mengabdikan kepada kejantanan yang militeristik. Dengan demikian, di atas tubuh-tubuh perempuan, penodaan sejarah Gerwani, dan pemungggungan terhadap sumbangan gerakan perempuan bagi perjalanan bangsa itulah Orde Baru membangun rezimnya. Selama monumen itu tetap berdiri, maka gagasan tentang ketertundukan perempuan tetap menemukan pembenarannya. Dan seluruh praktik penodaan, perampokan, kejahatan itu lestari. Pemerintah sesudah Soeharto masih mewarisi tradisi menyelenggarakan upacara peringatan di Lubang Buaya tiap tahun dan bahkan saat ini sudah semakin mempercantik monumen dengan gapura baru yang juga berhias relief.

Rezim Orde Baru tidak pernah melarang perempuan mengakses pendidikan dan menekuni profesi yang diinginkan. Justru pada masa Soeharto, angka perempuan terdidik dan perempuan pekerja semakin meningkat. Yang menjadi persoalan, rezim Orde Baru tidak menginginkan perempuan-perempuan terdidik ini bersikap kritis terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan kesewenang-wenangan negara yang mengorbankan masyarakat. Sama seperti pada 1965-1966, perempuan-perempuan yang berurusan langsung dengan masyarakat maupun dengan korban adalah pihak yang paling rentan terhadap kekerasan. Pada awal 1990an, rezim Orde Baru menyiksa dan membunuh Marsinah, aktivis buruh yang memperjuangkan hak-haknya dan rekan-rekannya. Akhir 1990an, mereka membunuh Ita Marta Dinata, pelajar SMA yang hendak berangkat ke Jenewa



untuk memberi kesaksian atas pemerkosaan massal perempuan-perempuan Tionghoa dalam tragedi Mei 1998. Sampai saat ini pun, kekerasan terhadap perempuan aktivis masih terus berulang. Pelakunya bukan hanya negara, tapi juga kelompok-kelompok sipil. Dalam sebuah pertemuan perempuan aktivis lintas generasi yang diselenggarakan Komnas Perempuan tiga tahun lalu, beberapa perempuan muda yang bekerja mengorganisasi masyarakat menceritakan bagaimana mereka diteror, dituduh ‘Gerwani’— yang berarti pelacur atau penganut seks bebas, dan bahkan mengalami kekerasan fisik. Sementara di Bandung, beberapa temanku yang menyelenggarakan temu rindu bagi para perempuan korban peristiwa 1965 ditangkap dan diinterogasi oleh polisi setelah sebelumnya polisi membiarkan kelompok-kelompok paramiliter menyerbu dan membubarkan acara mereka. Menurutku, perempuan aktivis sangat berkepentingan atas penyelesaian masa lalu ini demi keselamatan dirinya.

Penyelenggara negara saat ini yang makin dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan kanan, baik yang berbasis Islam maupun pasar bebas, memroduksi lebih banyak lagi landasan aturan dan perundang-undangan yang memiskinkan dan memperketat kontrol terhadap seluruh warga negara. Dan sejarah mengajarkan bahwa dalam situasi seperti itu selalu kaum perempuan yang paling rentan dan paling awal dikorbankan. Agung Ayu Ratih, dalam pidato kebudayaan yang ia bacakan dalam rangka ulang tahun Dewan Kesenian Jakarta tahun lalu, kira-kira mengatakan demikian: kaum perempuan akan dikorbankan dua kali oleh kebijakan ekonomi pro-pasar bebas dan Undang-Undang Anti-Pornografi. Setelah dimiskinkan, banyak dari mereka yang akan terdorong untuk menjual tubuhnya demi bertahan hidup. Pada saat itulah mereka akan kembali dikorbankan atas nama moralitas. Kembali pengalaman para perempuan aktivis pendahulu mengajarkanku bahwa upaya penundukan perempuan adalah awal dari tujuan

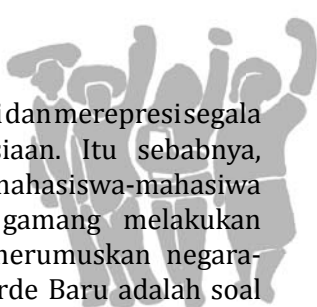


*Foto: Lingkar Tutar Perempuan - Institut Sejarah Sosial Indonesia.*

yang lebih luas, yaitu mengubah sistem kenegaraan. Kurasa itulah yang sedang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam kanan saat ini. Mereka sedang mengambil langkah awal memperjuangkan konsep negara Islam berbasis syariah, konsep yang justru ditolak dalam kesepakatan awal pendirian negara-bangsa ini. Dalam upayanya, mereka bergandengan tangan dengan para pendukung pasar bebas, serupa dengan yang terjadi pada saat pengesahan Undang-Undang Anti-Pornografi di parlemen maupun yang terjadi dalam peristiwa 1965-1966. Oleh karena itu, kupikir ini saat yang paling tepat untuk memeriksa kembali kesepakatan-kesepakatan awal yang melahirkan bangsa ini dan untuk belajar dari kerja-kerja pengorganisasian masyarakat yang sempat dilakukan para aktivis pendahulu.

## **Sejarah dan Kekinian**

Militer Soeharto menghancurkan Gerwanid dan ormas-ormas kiri lain pada 1965-1966, ketika mereka sedang giat-giat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bangsa. Rezim Orde Baru kemudian menutup ruang gerak



masyarakat untuk mengorganisasi diri dan merepresis segala upaya memperdebatkan keindonesiaan. Itu sebabnya, warga Kampung Jembatan, bahkan mahasiswa-mahasiswa penggerak reformasi, sama-sama gamang melakukan kerja-kerja pengorganisasian dan merumuskan negara-bangsa. Keindonesiaan bagi rezim Orde Baru adalah soal teritorial, sedang rasa nasionalismenya dibangun di atas dasar negasi terhadap berbagai kelompok sipil: pertamanya terhadap gerakan kiri, kemudian kepada kelompok Islam, parpol-parpol di luar Golkar, mahasiswa dan aktivis yang mengorganisasi massa, perempuan-perempuan yang berpolitik melalui saluran yang tidak direstui rezim. Daftar ini akan semakin panjang kalau diteruskan. Dengan kekuasaan yang sedemikian besar, rezim Orde Baru tidak mengalami banyak tantangan dalam menjual aset-aset negara, menghancurkan perekonomian desa, membuat masyarakatnya tercerai-berai, menyerang aktivis, mengorganisasi berbagai kerusuhan dan pemerkosaan massal. Politik negasi yang sama terus diawetkan bahkan ditingkatkan hingga saat ini. Penggusuran terhadap masyarakat miskin kota dan petani, pengabaian terhadap kesejahteraan buruh dan guru, hanyalah beberapa contoh.

Gerakan reformasi menurut kutelah berhasil merebut kembali ruang gerak masyarakat dan memperlihatkan kebobrokan tatanan kebenaran yang dibangun Orde Baru. Persoalannya, kekuatan-kekuatan yang anti-kebangsaan kerap kali lebih agresif dan militan dalam memanfaatkan ruang gerak itu untuk mengorganisasi diri dan membangun kebenaran baru, baik berdasarkan agama, kepercayaan pada manjurnya pasar bebas, atau perkawinan siri antara keduanya. Evaluasi atas tatanan kebenaran yang kita yakini selama ini penting, baik untuk melawan politik menegasi yang makin berkembang maupun untuk menyusun arah baru bagi bangsa ini. Tetapi, di luar upaya-upaya yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, negara justru menutup peluang untuk memeriksa masa lalu. Sepuluh tahun belakangan masyarakat



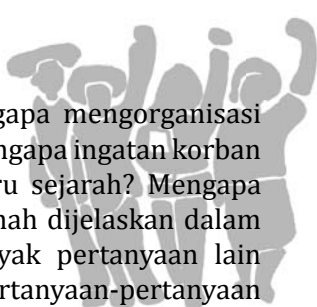
*Kegiatan di Plantungan. Foto: Syarikat*

sipil lebih giat mengungkap kebenaran. Namun, keluasan dampak dari upaya pengungkapan itu pun sebenarnya masih perlu diperiksa. Dari sejumlah wawancara terhadap masyarakat non-korban yang kulakukan baik di Solo maupun Jakarta tentang ingatan mereka mengenai peristiwa 1965-1966 maupun dari kegiatan-kegiatan

lain bersama kalangan muda, aku menemukan masih kuat keengganan untuk belajar dari masa lalu. Ada sebagian orang yang tetap bertahan di dalam bangunan kebenaran rezim Orde Baru yang sudah bobrok karena malas mengakses temuan-temuan sejarah baru atau tidak merasa mempunyai kepentingan dengan masa lalu. Tetapi ada pula yang sengaja tutup mata-tutup telinga terhadap fakta lain yang tidak mendukung keyakinan lamanya. Pada sebagian yang lain aku justru menemukan sikap 'yang penting anti' terhadap kebenaran rezim Orde Baru. Jawaban mereka kacau-balau ketika kutanya: lantas menurutmu apa yang benar?

Bagiku, mengungkap masa lalu terutama bukanlah untuk membuktikan kebohongan rezim Orde Baru. Mengungkap masa lalu adalah memahami dan memaknai berbagai fenomena yang terjadi di sekelilingku. Kurasa setiap pengalaman selalu melahirkan pertanyaan mengapa. Mengapa orang-orang Kampung Jembatan miskin? Mengapa mereka tidak terorganisasi? Mengapa negara





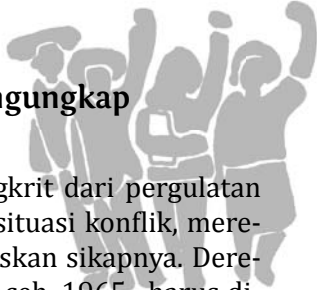
membunuh warga negaranya? Mengapa mengorganisasi masyarakat dianggap berbahaya? Mengapa ingatan korban berbeda dengan yang diajarkan guru sejarah? Mengapa sejarah gerakan perempuan tak pernah dijelaskan dalam pelajaran sejarah? Dan sekian banyak pertanyaan lain mengapa. Kerap kali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu bisa kutemukan di masa lalu. Dengan mengetahui akarnya, aku dan generasiku paham apa yang sedang kami hadapi dan bisa memikirkan cara untuk mengatasinya. Dalam upaya menelusuri masa lalu itulah, aku bertemu dengan orang-orang, gagasan-gagasan, dan kerja-kerja yang dihancurkan, dpendam, ditinggalkan, dan dipinggirkan oleh rezim Orde Baru. Gagasan-gagasan dan kerja-kerja itu justru makin relevan dalam konteks kekinian. Dalam banyak hal aku bisa mengatakan bahwa aku dan para aktivis segenerasiku sesungguhnya tidak sedang memulai sesuatu yang baru. Keyakinan bahwa semua ini akan menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa sekaligus sejarah gerakan perempuan menjadikan kerja-kerja ini menjadi lebih bermakna.

## Epilog

# Ketika Konflik Dilihat dengan Netra Perempuan

### Pembuka

Menuliskan refleksi untuk menelusur pengalaman dalam buku ini harus menyiapkan sejumlah energi untuk memanggil memori kelam, mengurai, memilah hingga berfikir tentang aspek-aspek mana yang bisa ditular menjadi virus untuk perdamaian dan penegakan HAM. Penulis-penulis buku ini, diluar berproses yang tak henti sebagai pembela HAM, selebihnya adalah manusia biasa, yang tidak serta merta bersiaga batin untuk bertutur seluruh persoalan yang dialaminya. Apalagi para penulis ini saat konflik berlangsung, harus punya ribuan telinga untuk para perempuan di sekitarnya. Menuliskan kembali semua pengalaman, seperti membaca diri dalam cermin, merasa sekeping dengan korban, atau bahkan seperti diajak memanggil semua lembar-lembar muram yang pernah dialaminya bertaut dengan pengalaman korban. Tak jarang, dokumentator menjadi “korban” dari pusaran proses ini.



## Pergulatan dan Pertaruhan Mengungkap Sejarah Perempuan dan Konflik

Buku ini merupakan hamperan kongkrit dari pergulatan dokumentator yang menyejarahkan situasi konflik, mereka berada di tengahnya, dan menegaskan sikapnya. Deretan peristiwa Mei 98, Ambon, NTT, Aceh, 1965, harus diungkap untuk menangkap dimensi pelanggaran HAM dari perspektif perempuan. Mengungkap persoalan ini dan berada dalam magma konflik saat itu, bukan hanya berhadapan dengan kepelikan politik pada masanya, bersiap dengan pertaruhan nyawa, mengungkap isu kekerasan yang nanar dan dengan segala aktor-aktornya. Belum lagi mengungkap kekerasan seksual yang harus menembus lapis-lapis benteng misteri politisasi identitas, menghitung nasib dan masa depan korban, menimbang insecurities minoritas, dibalut tabu dan malu, dan sederet persoalan kekerasan berbasis gender lainnya.

Karenanya, mengapa dokumentator pelanggaran HAM, yang sejati kerap disebut **WHRD (Women Human Rights Defender)**. Selain mengungkap kebenaran seperti disinggung di atas, juga kejelian memetakan masalah, dan membangun kunci-kunci siratan rekomendasi untuk perjuangan lanjut.

Data mendalam, dalam mekanisme HAM adalah hal mutlak, untuk melihat siapa pelaku agar tak ada impunitas, siapa dan bagaimana korban, untuk memastikan pemuliharaan hak-hak mereka dengan utuh. Selain itu, penting untuk melihat langkah strategis apa yang harus dilakukan negara untuk memenuhi prinsip *due diligence* yaitu *to promote, to protect* dan *to fulfill*, juga bagaimana peran komunal maupun individual dalam memastikan hak-hak tersebut.

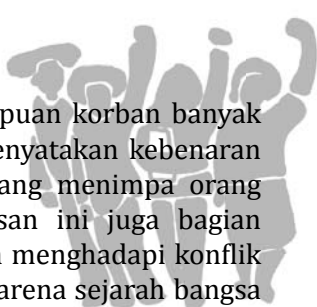
## Menggumuli Isu Konflik, WHRD dan Maknanya Bagi Kerja Strategis Komnas Perempuan

Dari proses penyejaraan melalui buku ini dan juga kerja memantau wilayah konflik, serta menemani WHRD, **Kom-**

**nas Perempuan (KP)** mendapatkan sederet pengetahuan. Dari pola-pola kekerasan yang dihadapi perempuan di wilayah konflik, cakupan kekerasan yang bukan hanya fisik, tetapi psikologis juga harus dihitung. Kekerasan domestik penting disoal ditengah situasi konflik, agar tidak terselubung dalam pagar dunia *private* yang tidak tersentuh dan tak berhenti dengan redanya konflik. Kekerasan berbasis ketubuhan, utamanya kekerasan seksual dengan pelaku siapa pun bahkan orang dekat adalah temuan lain yang menggoyang asumsi bahwa rumah atau orang dekat yang harusnya tempat berlabuh bagi perempuan saat konflik, justru menjadi aktor yang menganga dan tidak bisa didiamkan.

Pendokumentasian melalui tuturan ini, sedang menyoal dan menggugat bahwa aparat negara khususnya aparat keamanan tidak bisa “aman” dengan segala impunitasnya. Seluruh temuan di atas, harus digerakkan ke dalam mekanisme kongkrit untuk melindungi korban, terutama korban kekerasan masa lalu dan harus jadi pembendung agar kejadian serupa tidak berulang.

Pengalaman mendokumentasi juga punya berbagai dimensi misi yang coba dilakukan KP, dari membangun instrumen bersama dengan mitra, mendokumentasi yang partisipatif untuk menguatkan mekanisme pendokumentasian berperspektif HAM bagi gerakan perempuan untuk menguatkan radar bersama bahwa kapan pun pelanggaran HAM akan diingat oleh korban dan akan dipantau oleh perempuan. Kasus paling kongkrit, 40 tahun kekerasan yang terjadi di Papua, mama-mama tua yang bicara terbata-bata, masih lekat ingat seluruh peristiwa perkosaan keji yang dialaminya, lengkap dengan nama pelaku dan dari kesatuan apa. Peristiwa bisa dibekamnya dari keluarga untuk tidak melukai hati orang-orang yang dikasihinya dan sebagai upaya membangun keberterimaan berbagai pihak, salah satunya hindari stigmatisasi komunitasnya.



Tetapi suatu kali, perempuan-perempuan korban banyak yang akan memilih bicara, untuk menyatakan kebenaran dan memastikan untuk tidak berulang menimpa orang lain maupun anak-cucunya. Penulisan ini juga bagian dari membangun sejarah perempuan menghadapi konflik dengan segala kecerdasan mereka. Karena sejarah bangsa ini, banyak yang maskulin, militeristik, politis atau mewakili suara *mainstream*. Sejarah korban, sejarah perempuan kerap buram atau bahkan tidak ada.

Menyadari proses dokumentasi adalah proses mengaduk luka, Komnas Perempuan juga mencoba membangun mekanisme pemulihan bagi pemantau, pendamping bahkan bagi korban sendiri. Ada sederet upaya, seperti mengajak duduk dalam *Healing of Memories*, atau *training* untuk menghindari *burn out* bagi tim pendamping korban yang sehari-hari menerima kasus.

Yang cukup menantang, KP bersama kawan-kawan WHRD Papua sedang merintis “anyam noken” sebuah mekanisme pendokumentasian yang terintegrasi dengan pemulihan bagi korban maupun dokumentator yang berbasis adat, untuk mendapatkan kedekatan kesejarahan dengan perempuan.

Lebih jauh lagi, seperti proses dalam buku ini, KP mengajak para WHRD untuk bertukar catatan perjuangannya dan diformulasi menjadi pengetahuan tentang WHRD yang dibawa ke advokasi nasional, regional hingga advokasi internasional, untuk memastikan bahwa keterancaman WHRD yang berlapis dari domestik-publik, sigmatisasi hingga ancaman nyawa harus mendapat ruang untuk dilindungi.

Untuk itu, Komnas Perempuan sebagai salah satu institusi yang turut membangun LPSK th 2006, yang diharap bi-

sa menjadi payung bagi pembela HAM. Tentu dalam perjalanannya kepentingan perempuan tidak mudah dirawat, tetapi setahun terakhir **LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban)** dan KP mencoba mengukuhkan sinergi agar kepentingan perempuan, baik korban maupun WHRD mendapat ruang, tidak tergusur oleh isu politik maskulin.

Wujud kongkrit lain untuk menghargai WHRD, tahun 2010, KP merintis upaya “care for caregivers” untuk memberi dukungan dana sehat bagi tokoh WHRD. Langkah menghargai WHRD ini perlu terus dilanjutkan, utamanya memikirkan WHRD yang potensial sunyi di usia tuanya, karena banyak yang tidak berkeluarga karena curahan perjuangannya untuk orang lain. Tidak ada jaminan sosial, karena perjuangannya adalah pengabdian, dan belum ada perhatian serius negara untuk menghargai seluruh peluh bahkan nyawa mereka untuk bangsa ini. Sudah seharusnya bangsa memikirkan mereka, bukan hanya pegawai negeri atau tentara yang dianggap berjasa di nusantara ini.

## Penghargaan

Penerbitan buku ini memakan waktu dua tahun lebih, untuk memastikan berbagai pihak siap untuk berbagi persoalan ini, keluar dari ruang nyaman dan aman demi sesama perempuan dan kemanusiaan.

Buku yang dirangkai dari pergulatan tajam dan dalam oleh Meri Djami, Baihajar Tualeka, Andy Yentriyani, Feri dan Th. J. Erlijna ini bentuk dari kedaulatan perempuan membangun sejarahnya dan perjuangan meletakkan dirinya untuk dibaca dunia. Melalui netra kawan-kawan, melumerkan peti es, membunyikan kisah yang disunyikan, dan menyawakan cerita menjadi titik perjuangan bersama.

### **Yuniyanti Chuzaifah**

Ketua Komnas Perempuan 2011-2014